# Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama-Agama


**Oleh:**

**Gitri Eka Wulan Sari**

**NIM: E92217069**

**PRODI STUDI AGAMA AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**


**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gitri Eka Wulan Sari

Nim : E92217069

Program Studi : Studi Agama-Agama/ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Judul : Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 5 Mei 2021

Gitri Eka Wulan Sari

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gitri Eka Wulan Sari

Nim : E92217069

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul :Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Sidoarjo, 5 Mei 2021

Pembimbing

Dr. H. Andi Suwarko, M.Si.
NIP : 197411102003121004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020" yang ditulis oleh Gitri Eka Wulan Sari ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Juni 2021.

Mengesahkan,

**Dr. Kunawi, M.Ag**

**NIP: 196409181992031002**

**Penguji I**

**Dr. H. Andi Suwarko, M.Si**

**NIP: 197411102003131004**

**Penguji II**

**Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag**

**NIP: 19711207199703200**

**Penguji III**

**Feryani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil.I**

**NIP: 196902081996032003**

**Penguji IV**

**Dr. Nasruddin, S.Pd. S.Th.I, MA**

**NIP: 197308032009011005**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademk UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gitri Eka Wulan Sari
NIM : E92217069
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/ Studi Agama-Agama
Email : gitriekaw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atau karya ilmiah:

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain
(.....)

Yang berjudul:

**MAKNA AGAMA DALAM KONTESTASI PILKADA SIDOARJO 2020**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini perpustakan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 19 Juli 2021

(Gitri Eka Wulan Sari)

# ABSTRAK

**Judul : Makna Agama dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020**

**Penulis : Gitri Eka Wulan Sari**

**Pembimbing : Dr. H. Andi Suwarko S.Ag, M.Si**

Skripsi ini mengkaji tentang makna agama dalam kontestasi Pilkada Sidoaro 2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana makna agama dalam kontestasi politik dari setiap pelaku politik yang terdiri dari penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada berupa kandidat dan tim sukses serta masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna agama bagi para pelaku politik di Sidoarjo dalam kontestasi Pilkada 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan varian studi kasus. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis versi John W. Creswell terdiri dari pengolahan data, membaca keseluruhan data, mengcoding data, menerapkan proses coding, menghubungkan tema-tema terkait dalam bentuk narasi atau laporan dan kemudian menginterpretasikan data. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data tediri dari uji derajat kepercayaan (*credibility)*, keteralihan (*transferability),* kebergantungan (*dependability),* dan kepastian (*confirmability)*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial milik Max Weber serta beberapa teori yang relevan mengenai hubungan agama dan politik.

Temuan dalam penelitian ini adalah agama dimaknai oleh penyelenggara pilkada sebagai (rasionalitas instrumental) karena tindakannya lebih mengedepankan manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu serta membutuhkan aktualisasi dalam mencapai inti dari dari persoalan yang lebih spesifik dan terstruktur. Sedangkan peserta Pilkada, kususnya kandidat memaknai agama sebagai (rasionalitas nilai) dan tim sukses memaknai agama sebagai (rasionalitas instrumental) karena menggunakan unsur-unsur agama dalam berkampanye. Adapun pemilih memaknai agama sebagai (rasionalitas nilai) karena hanya memperhitungkan manfaat namun tujuannya tidak terlalu dipertimbangkan.

**Kata kunci: Makna Agama, Pilkada**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL……i**

**HALAMAN SAMPUL……ii**

**ABSTRAK……...iii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING…….....iv**

**PENGESAHAN SKRIPSI……..v**

**PERNYATAAN KEASLIAN……vi**

**DAFTAR ISI……..vii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang……1
B. Batasan Penelitian……...7
C. Rumusan Masalah……...7
D. Tujuan Penelitian……8
E. Kegunaan Penelitian……...8
F. Penelitian Terdahulu……10
G. Kajian Teori…..……15
H. Metodologi Penelitian……...…37
I. Sistematika Pembahasan……...…49

**BAB II KONTEKS PENELITIAN**

A. Deskripsi Kabupaten Sidoarjo
   1. Letak Geografis……..51
   2. Aspek Ekonomi……..52
   3. Aspek Sosial Keagamaan……...53
   4. Aspek Politik……..64
B. Deskripsi Pilkada Kabupaten Sidoarjo
   1. Gambaran Umum Peta Politik di Kabupaten Sidoarjo……..67
   2. Pengertian dan Tujuan Pilkada……..85
   3. Tahapan Pilkada……89
   4. Penyelenggara Pilkada……...93
   5. Peserta Pilkada……109
   6. Pemilih Pilkada……115
   7. Hasil Pilkada……116

**BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Makna Agama bagi Penyelenggara Pilkada……..119
B. Makna Agama bagi Peserta Pilkada……..134



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Makna Agama bagi Pemilih Pilkada……..…….151

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan…….…….……....171
B. Saran…….….….....173

**DAFTAR PUSTAKA**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan tersebut diperoleh manusia dari pengetahuan diri seperti yang dialami nabi Ibrahim, saat nalarnya mencoba menelusuri alam ciptaan Tuhan, Ia menemukan bahwa ada zat yang layak di sembah karena zat tersebut maha pencipta alam semesta. Selain pengetahuan diri, pengetahuan seseorang terhadap zat Tuhan juga berasal dari luar misalnya, infomasi dari orang tua, guru, atau dari tokoh agama yang mempunyai otoritas ilmu pengetahuan. Singkatnya, ketika ada orang yang percaya akan adanya zat Tuhan, maka ia sudah beragama. Terkait siapa Tuhan yang mereka sembah adalah hak setiap orang sesuai dengan latar belakang pengetahuan individu tersebut.[1]Selain itu, agama juga bisa diartikan sebagai sistem kepercayaan yang mana di dalamnya memuat aspek-aspek hukum, moral serta budaya.

Agama juga diyakini manusia sebagai bentuk yang bersifat adikodrati yang menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupannya. Agama memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari karena di dalamnya memiliki nilai-nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Para ahli sosiologi menyatakan bahwa agama merupakan suatu pandangan hidup yang harus

[1] Ali Amran, "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat", *Jurnal Hikmah*, Vol. II, No. 01 (Januari – Juni 2015), 24.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan dalam kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Agama dan kehidupan sosial memiliki hubungan resipokral terhadap semua faktor yang membentuk struktur sosial masyarakat.[2] Menurut salah seorang sosiolog Emile Durkheim menyatakan bahwa suatu sistem kepercayaan dan praktek-praktek ritual yang telah dipersatukan menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Yang artinya ada dua unsur penting sesuatu dapat disebut sebagai agama yakni "sifat kudus" dari agama serta "praktek-praktek ritual" dari agama. Ketika salah satu unsur tersebut terlepas, maka hal tersebut menjadi bukan agama lagi. Dalam hal ini agama bukan dilihat dari substansi isinya melainkan dari bentuknya, yang melibatkan dua unsur tersebut.[3]

Sedangkan menurut Hendro Puspito, agama merupakan suatu entitas sosial yang dibuat oleh para penganutnya yang percaya pada kekuatan *non-empiris* serta didayagunakan oleh mereka untuk mencapai keselamatan bagi hidupnya dan masyarakat luas. Tingkat perkembangan agama dan kepercayaan dalam suatu masyarakat di pengaruhi oleh seberapa jauh tingkat peradaban masyarakat tersebut. Seperti halnya agama masyarakat primitif di suatu tempat bersesuaian dengan keadaan dan peradaban masyarakat di tempat itu.[4] Agama berkaitan dengan pengalaman manusia yang bersifat individu ataupun kelompok. Sehingga dalam hal ini setiap perilaku yang dilakukan individu atau kelompok akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku tersebut digerakkan oleh kekuatan dalam diri manusia yang

---

[2] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 15.
[3] Amran, Peranan Agama, 25.
[4] Dadang Kahmad, *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasar dari nilai-nilai ajaran agama yang sebelumnya sudah menginternalisasi.[5]

Terkait fungsi, masyarakat dan agama berperan dalam mengatasi segala persoalan yang dialami masyarakat yang tidak bisa dipecahkan secara empiris oleh individu tersebut karena keterbatasan dan ketidakmampuan akal manusia. Selain itu sistem nilai dalam ajaran agama dapat memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur perilaku manusia, baik dalam tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, dalam al-Qur'an terdapat kata wahai orang-orang beriman yang selalu diiringi dengan aktivitas beramal saleh. Hal ini menunjukkan bahwa disaat individu menyatakan dirinya beriman, maka ia juga harus melakukan kegiatan beramal saleh (berbuat kebaikan) sesuai dengan kondisi sekitarnya.[6] Agama telah menjadi suatu kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia.

Selain itu agama juga diyakini sebagai sesuatu yang tidak hanya berbicara soal ritual semata, namun juga berbicara terkait nilai-nilai yang harus dihidupi dalam kehidupan sosial serta dalam ranah kenegaraan. Sehingga dalam hal ini muncul suatu tuntutan supaya nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara.[7] Politik bisa digunakan untuk mengkonstruksi kerangka nilai serta norma terhadap suatu negara supaya terstruktur dan disiplin.

---

[5] Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1 (Januari – Juni 2017), 2.
[6] Ibid.
[7] Azyumardi Azra, *Resposisi Hubungan Negara dan Agama Merajut Hubungan Antar Umat* (Jakarta: Buku Kompas, 2002), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan politik sendiri menggunakan agama dengan tujuan sebagai alat legitimasi dogmatik agar bisa mengikat warga negara dalam mematuhi aturan yang dibuat oleh negara. Hubungan timbal balik tersebut menimbulkan kesalingan antar kedua entitas tersebut.[8]

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Islam sebagai agama pada awal perkembangannya ialah kejayaan dalam bidang politik. Dari sini islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai sekelompok kaum beriman yang hanya menyakini kebeneran tunggal dan sama, melainkan juga sebagai masyarakat yang total.[9] Dalam kehidupan masyarakat Indonesia hampir tidak ada ranah yang luput dari pengaruh agama, termasuk dunia politik. Seperti halnya pelaksanaan suksesi kepemimpinan pada tingkat legislatif maupun tingkat eksekutif. Saat awal reformasi melanda Indonesia, Amien Rais pernah mengatakan; "apabila sebuah simbol dan ungkapan keagamaan digunakan dalam meningkatkan partisipasi politik, maka agama akan menjadi isu yang akan memecah belah umat muslim, serta adanya prinsip dan keyakinan yang sensitif kemungkinan dapat membebani politik pemilu".[10]

Apabila dikaitkan dengan masa kini, penggunaan simbol sesuai dengan agama yang dianut sangat rentan sekali terhadap perpecahan yang berasal dari dalam maupun antar umat beragama sendiri. Hal ini dikarenakan penggunaan simbol keagamaan merupakan suatu hal yang dapat menyentuh

---

[8] Wasisto Raharjo Jati, "Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama", *Journal Walisongo*, Vol. 22, No. 1 (2014), 134.
[9] Nurcholis Madjid, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), 9.
[10] Amien Rais, *Islam and Politics in Contemporary Indonesia* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1999), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sentimen dan emosi umat beragama, sehingga sulit untuk dimusyawarakan apabila terjadi ketersinggungan pada diri setiap umat beragama. Fenomena penggunaan simbol keagamaan bisa berupa penampilan yang bersifat religius, ataupun sebuah slogan seperti halnya amanah, jujur dan juga isu-isu kehidupan religius lainnya yang terpampang pada poster di jalan-jalan dan tempat umum.[11]

Apabila di lihat secara objektif diakui bahwa ada korelasi antara perkembangan demokratisasi dengan tingkat rasionalitas masyarakat. Semakin tinggi tingkat intelelektual masyarakat, maka ia dapat mengesampingkan sentimen dan emosi keagamaan, kesukuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kelompok masyarakat semacam ini tidak mudah terpengaruh oleh janji yang diucapkan calon kandidat yang kebanyakan bersifat pragmatis. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat intelektual masyarakat rendah, maka masyarakat mudah sekali terpengaruh oleh tampilan luar dari kandidat yang ada. Dan hal tersebut seringkal dimanfaatkan oleh seorang pemimpin dengan menggunakan simbol keagamaan.[12]

Pada era demokrasi saat ini, pemilhan kepala daerah menjadi pertandingan yang penting bagi setiap daerah. Pada era ini kandidat kepala daerah dituntut untuk melakukan strategi pendekatan yang efektif guna melakukan promosi dirinya kepada masyarakat.[13] Dalam konteks ini Sidoajo

---

[11] Idrus Ruslan, "\Paradigma Politsasi Agama: Upaya Reposisi Agama dalam Wilayah Publik", *Jurnal Madania*, Vol. XVII, No. 2 (Desember 2014), 17.
[12] Ibid.
[13] Muchammad Hadiq Abrori, "Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, 2019), 1.dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki *setting* wilayah fenomena politik, yang mana hal ini ditunjukkan dalam relasi antara organisasi masyarakat dengan partai politik tertentu.[14] Pada wilayah Sidoarjo ada suatu hal yang memungkinkan adanya keterkaitan yang cukup relevan antara agama dan politik, yakni NU dan PKB. Belum lagi latar belakang organisasi masyarakat penduduk Sidoarjo kebanyakan adalah Nadhatul Ulama baik dari segi struktural atupun kultural. Mereka yang berlatarbelakang ormas NU ataupun mereka yang juga dinaungi NU sebanyak 79,5% (N=430).[15] Oleh karena itu kemungkinan bahwa ada dukungan yang cukup solid dari NU untuk para paslon yang dinaungi oleh PKB.

Di Sidoarjo sendiri, pada awal berdirinya Nadhatul Ulama tidak memiliki banyak peran. Dikarenakan lebih memfokuskan pada penyebaran tentang pemahaman keagamaan yang diyakini oleh lembaga tersebut. Akan tetapi pada abad ke-21, peran Nadhatul Ulama begitu kentara dalam berbagai bidang. Nadhatul Ulama mulai menampakkan peran yang dominan melalui Badan Otonom dan lembaga-lembaga yang dimiliki. Hal ini dibuktikkan dengan menyemarakan dalam kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan politik.[16] Seperti halnya dalam bidang politik, baik pemilu, pilpres bahkan pilkada Nadhatul Ulama cukup ikut andil didalamnya. Peran tersebut ditunjukkan mulai dari pemberian dukungan, hingga dukungan suara dari

---

[14] Dimas Lazuardy Firdaus, "Orientasi Pemilih PKB terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful llah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015" (2015), 1.
[15] KPUD Sidoarjo, "Laporan Hasil Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu: Kesukarelaan Warga dalam Politik", (2015), 6.
[16] Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usa di Nusantara* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Nahdliyin.[17] Dari adanya partisipasi tersebut, didalamnya akan muncul suatu perubahan dalam bentuk sekecil apapun itu.[18] Selain itu, dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020 satu dari ketiga kandidat yang ada ialah putra dari seorang ulama Sidoarjo dan merupakan salah satu tokoh Nadhatul Ulama. Maka dari penjelasan tersebut peneliti ingin mengetahui makna agama dalam kontestasi pilkada Sidoarjo 2020.

## B. Batasan Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas adalah terkait makna agama dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020 serta hubungan agama dan politik dan politik di Sidoarjo. Oleh karena itu peneliti akan membatasi fokus penelitian yang tertera dalam rumusan masalah penelitian. Yang mana cakupan penelitian ini berupa makna agama dari berbagai elemen masyarakat dalam Pilkada serta hubungan antara agama dan politik di Sidoarjo.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna agama bagi penyelenggara pemilu dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020 ?
2. Bagaimana makna agama bagi kandidat dan tim sukses dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020 ?
3. Bagaimana makna agama bagi pemilih dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020 ?

---

[17] Miftakhul Jannah, "Peran Nadhatul Ulama Sidoarjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Sidoarjo Tahun 2005-2015" (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, 2015), 10.
[18] Maya Nur Agustin, "Partisipasi Fatayat Nadhatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 03, No. 04 (2016), 1074.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagaimana hubungan agama dan politik di Sidoarjo dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?

**D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah dirumuskan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui serta menganalisa makna agama bagi penyelenggara pemilu, sehingga bisa mengetahui apakah agama ikut andil dalam proses penyelenggaran pemilu.
2. Untuk mengetahui serta menganalisa makna agama bagi kandidat dan tim sukses, sehingga bisa mengetahui apakah agama ikut andil dalam menentukan setiap tindakan para peserta Pilkada Sidoarjo 2020.
3. Untuk mengetahui serta menganalisa makna agama bagi pemilih sehingga bisa mengetahui apakah agama dari setiap paslon turut andil dalam menarik simpati masyarakat.
4. Untuk mengetahui serta menganalisa hubungan antara agama dan politik di Sidoarjo, sehingga bisa mengetahui hubungan keduanya dalam kontetasi Pilkada Sidoarjo.

**E. Kegunaan Penelitian**

Dari beberapa tujuan penelitian yang telah disebutkan, peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa berguna secara teoritis dan praktis. Kegunaan secara teoritis diantaranya:

1. Penelitian ini dapat memberikan dorongan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terkait tema yang telah dibahas dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks yang berbeda. Sehingga dalam hal ini bisa memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan konteks penelitian kepada pembaca terkait makna agama dalam kontestasi politik.

2. Penelitian ini dapat memberikan dorongan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terkait tema yang telah dibahas dalam konteks yang berbeda. Sehingga dalam hal ini bisa menambah perbendaharaan pengetahuan terkait hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi pesta politik.
3. Penelitian ini, besar kemungkinan juga akan tetap berguna terutama dalam konteks segi agama dan politik dalam bidang fenomenologi agama terkait makna agama bagi setiap orang yang beragama dalam kontestasi politik.

Sedangkan kegunaan secara praktis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat ataupun lembaga kemasyrakatan lainnya, khususnya para elit politik dalam memberikan sebuah kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kepada masyarakat dalam menentukan sebuah pilihan saat Pilkada supaya tidak terjerumus akan adanya isu agama.
3. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi masyarakat beragama di daerah lain dalam melihat makna agama saat kontestasi Pilkada, sehingga mampu membangun politik yang sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aturan negara dan aturan keagamaan yang relevan di daerah tersebut.

## F. Penelitian Terdahulu

Beberapa tulisan yang telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal- jurnal hasil dari penelitian yang terkait dengan makna agama dan politik yaitu:

"*Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi PILGUB Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucoult"* jurnal yang ditulis oleh Joko Priyanto mencatat bahwa gerakan massa masyarakat Islam merupakan hasil dari produksi masyarakat Islam. Dalam konteks kasus gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, sebuah pengetahuan yang ada dalam bentuk agama dalam keyakinan masyarakat Islam memproduksi kekuasaan dalam bentuk resistensi atas dominasi preventif perihal wacana keagamaan, dan resistensi ini berwujud aksi masa yang menuntut proses hukum kepada gubernur Ahok.[19]

"*Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017-2022: Studi atas Fraksi Politik-Agama dan Pembentukan Jejaring Konstituen Anies*-Sandi" sebuah jurnal yang ditulis oleh Sofyan Sawri mencatat bahwa praktik populisme Islam merupakan ekspresi politis dari sebuah penolakan masyarakat muslim terhadap elit yang berkuasa. Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama selaku petahana mempresentasikan elit yang harus dimusuhi.

[19] Joko Priyanto, "Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi PILGUB Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucoult", *Jurnal alQalam*, Vol. 34, No. 2 (Juli-Desember 2017), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemenangan Anies-Sandi secara mendasar tidak bisa dilepaskan dari faktor agama. Pilkada daerah di Jakarta 2017 memperlihatkan bukti nyata bahwa preferensi utama masyarakat yang memilih pasangan Anies-Sandi ada keterkaitan dengan agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa simpul konstituen pasangan Anies-Sandi adalah identitas agama.[20]

"*Menakar Kekuatan Simbol Agama dalam Kontestasi Politik Lokal*", jurnal yang ditulis oleh Agus memperlihatkan penelitiannya yang dilakukan di NTB bahwa ada tiga kekuatan politik yaitu birokrat, politisi dan ormas keagamaan. Dalam menanggapi tiga kekuatan tersebut, pola penempatan para kandidat yang diajukan oleh partai politik berusaha menggunakan metode saling silang antara ketiga kekuatan tersebut. Ada penggunaan simbol agama yang dilakukan oleh kedua kandidat tersebut, dan mampu memberi kontribusi terhadap kemenangan kandidat. Dari hal tersebut nampaknya terlihat jelas bahwa penggunaan simbol agama mampu mendulang suara untuk memenangkan sebuah kontestasi Pilkada.[21]

*"Nadhatul Ulama dan Pilkada Gubernur Jawa Timur"* , jurnal yang ditulis oleh Inggriht Fatamorgana mencatat bahwa keberadaan kiai dan ulama selama proses kampanye politik yang dilakukan oleh Muslimat, Fatayat dan IPPNU memiliki peranan yang cukup krusial. Budaya masyarakat nadliyin yang sangat menghormati kiai dan ulama membuat mereka memiliki posisi

[20] Sofyan Sawri, "Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017-2022: Studi atas Fraksi Politik-Agama dan Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi", *Politiea:Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1 (2020), 26.
[21] Agus, "Menakar Kekuatan Simbol Agama dalam Kontestasi Politik Lokal", *Jurnal Tasamuh*, Vol. 14, No. 2 (Juni 2017), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang cukup tinggi dalam strata sosial masyarakat. Dikarenakan kiai dan ulama yang dpercayai mampu memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan serta mengembangkan ajaran Islam, juga diberikan kepercayaan untuk memberikan pengarahan dalam urusan duniawi termasuk dalam hal politik. Preferensi politik para ulama atau kiai sangat mempengaruhi preferensi politik konstituennya. Bahkan dalam dunia politik terbentuk konstruksi politik yang diyakini benar adanya, misalnya beberapa calon wakil rakyat yang ingin maju ke dalam pemilihan umum selalu sowan kepada beberapa ulama yang dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat. Ketika paslon tersebut mendapat dukungan, maka mereka akan mengumumkan kepada masyarakat luas terkait dukungan yang diperoleh dari ulama tersebut. Namun ketika hal sebaliknya terjadi (tidak mendapat dukungan) maka bisa dijadikan semacam senjata bagi pesaing politiknya untuk menjatuhkan perolehan suara pesaingnya.[22]

"*Orientasi Pemilih PKB terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful Ilah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015",* sebuah jurnal yang ditulis oleh Dimas Lazuardy Firdauz mencatat bawha orientasi dalam memilih merupakan wilayah khusus yang menjadi domain seseorang dalam menentukan preferensi pilihan politik mereka. Diantaranya yakni aspek kultural, ekonomi, dan juga politik (partai) yang juga mampu menjawab persoalan orientasi memilih. Esensi dari penelitian ini adalah bahwa dalam hal menentukan pilihan, individu

[22] Inggriht Fatamorgana, "Nadhatul Ulama dan Pilkada Gubernur Jawa Timur", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (Juli-September 2012), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pemilih) tidak dapat lepas dari kemana arah predisposisi lingkungan sekitar. Hal ini termasuk kecenderungan sosial maupun lingkungan serta perubahan iklim politik.[23]

"*Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi*", sebuah jurnal yang ditulis oleh Ilim Abdul Halim menjelaskan bahwa agama dan negara memiliki peran dalam proses pendirian rumah ibadat di wilayah yang keadaan masyarakatnya mayoritas keagamaan. Peran agama dalam hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan kelompok Katolik, kelompok Muslim yang tergabung dalam Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi. Peran yang ditunjukkan oleh kedua kelompok tersebut adalah peran integrasi. Sedangkan pemerintah dalam konteks ini berperan sebagai pemberi legitimasi serta mengatur ketertiban melalui kebijakannya. Oleh karena itu agama dan negara dalam konteks ini memiliki peran yang tidak sama, yakni integrasi, kontrol sosial dan legitimasi.[24]

"*Model Relasi Islam dan Negara di Indonesia"*, sebuah jurnal yang ditulis oleh Dadang Darmawan menunjukkan bahwa relasi antara Indonesia dan masyarakat Islam diwakili oleh sebuah organisasi afiliasi Islam pada awal kemerdekaan sampai pada masa reformasi tahun 1998. Hal ini dapat dilhat dari banyaknya organisasi keagamaan yang muncul, mulai dari fundamental, sekuler, radikal hingga sinkretisme. Dalam hal ini fenomena yang diprakarsai

---

[23] Dimas Lazuardy Firdauz, "Orientasi Pemilih PKB Terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful Ilah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015", *Jurnal Fisip Unair*.
[24] Ilim Abdul Halim, "Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi", *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol. 3, No. 1 (2018), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pemerintah serta umat Islam Indonesia, yang mana dalam hal ini diharapkan bisa menjadi model Islam yang mewakili bangsa Indonesia di mata dunia.[25]

"*Religion in Politics:How Does Inequality Affect Public Secularization?"*, sebuah jurnal yang ditulis oleh Ekrem Karakoc dan Birol. Dalam penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi variasi sikap sekuler terhadap politik. Yang mana penelitian ini menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi meningkatkan evaluasi positif peran agama dalam politik melalui pengaruhnya terhadap religiusitas dan partisipasi dalam organisasi keagamaan. Dengan menggunakan analisis multilevel di 40 negara, studi ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan menurunkan sikap terhadap dukungan untuk dua dimensi sekularisasi publik, yakni: sekularisasi pemegang jabatan publik dan pengaruh pemimpin agama dalam politik.[26]

"*The Effect of Religiosity on Political Attitudes in Israel",* sebuah artikel yang ditulis oleh Olena Bagno-Moldavski mempelajari pengaruh agama pada sikap politik di Israel dengan menguji dua proposisi yakni: demokratisasi ramah agama dan sosialisasi yang serakah. Yang pertama mengatakan bahwa akomodasi tuntutan agama mendorong demokratisasi, dan yang kedua berpendapat bahwa mendominasi sosialisasi agama tidak memotivasi sikap demokratis.[27]

---

[25] Dadang Darmawan, "Model Relasi Islam dan Negara di Indonesia", *Jurnal Religious: Studi Agama-agama dan Lintas Budaya,* Vol. 2, No. 1 (September 2017), 34.
[26] Ekrem Karakoc, "Religion in Politics: How Does Inequality Affect Public Secularization?", *Jurnal Comparative Political Studies*, Vol. XX, No. X (September 2012), 2.
[27] Olena Bagno, "The Effect of Religiosity on Political Attitudes in Israel", *Jurnal Religion and Politics Section of The American Political Science Asosiacition*, Vol. 8, No. 3 (September 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai pro dan kontra telah tertuang dalam penelitian terdahulu terkait agama dan politik. Sejauh penulis ketahui, fungsi agama dalam hal politik cukup memberikan pengaruh didalamnya. Seperti halnya untuk mempertahankan kekuasaan, menjulang kemenangan dan sebagainya. Namun dari penelitian terdahulu, para penulis masih belum menjelaskan makna agama dalam sudut pandang perilaku politik, seperti halnya para pemilih, tim sukses dan kandidat. Selain itu di Sidoarjo sendiri khusunya, masih belum ada penelitian terkait fungsi agama dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020, apakah ada isu agama yang digunakan dalam konteks ini ketika ada seorang putra ulama yang mencalonkan diri sebagai Bupati, bagaimana keterkaitan antara isu tersebut dengan keadaan keagamaan pemilih serta adanya perbedaan dalam penggunaan teori yang digunakan. Oleh krena itu, dalam ruang kosong ini peneliti ingin mendalami fenomena tersebut sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## G. Kajian Teori

Politik merupakan suatu proses dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah. Esensi dari adanya politik tersebut adalah untuk mencapai kehidupan sosial yang lebih baik. Maka dari itu akan timbul sebuah aktivitas sosial untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, di dalam suatu unsur masyarakat akan ada yang menjadi pemimpin. Yang mana pemimpin itulah akan merumuskan serta membuat kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan mekanisme kekuasaan dalam mengatur kehidupan bersama menuju tujuan masyarakat yang diinginkan.[28]

Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk analisis penelitian ini adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Max Weber lebih menekankan kajiannya pada tindakan sosial, yang mana tindakan tersebut memberikan pengaruh terhadap orang lain dan tidak lepas dari adanya hubungan dengan orang-orang sekitar. Salah satu pemikiran yang ada dalam karyanya ialah bahwa tindakan sosial yang dilakukan manusia juga diiringi dengan adanya motivasi dalam diri individu. Metode dalam pemikiran ini dinamakan *Vertehen*, yang artinya berupaya menemukan pemahaman yang benar dan jelas mengenai maksud dari tindakan sosial. [29]

Tindakan sosial yang dimaksud oleh Weber merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu yang mana tindakannya memiliki makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain. Tindakan yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi akibat pengaruh dari kondisi tertentu serta bisa juga merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh kondisi tertentu atau bisa berupa pesetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Oleh karena itu setiap tindakan yang diarahkan kepada benda

[28] P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 4.
[29] Ahmad Putra, "Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber", *Journal of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1 Juni (2020), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati atau tindakan religius yang dilakukan sendiri tidak bisa disebut dengan tindakan sosial.[30]

Menurut Weber sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial (*social action*), sebagaimana pada perumusan berikut ini:

> Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial agar dapat sampai kepada penjelasan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya.[31]

Dalam bukunya yang berjudul *Economy and Society*, Max Weber menguraikan tentang tindakan sosial sebagai suatu tindakan individu yang memiliki makna subyektif untuk individu tersebut, tetapi juga memiliki dampak terhadap individu lainnya, serta adanya harapan reaksi oleh individu lain.[32]

Dalam buku tersebut, ada tiga unsur yang mencakup didalamnya yaitu: *pertama*, sebuah tindakan tentu berbeda dengan perilaku, yang mana sebuah perilaku tentu tidak mungkin mempunyai makna subyektif. Misalnya, melewati jalan raya sendirian di tengah malam merupakan perilaku tetapi bukanlah tindakan. *Kedua*, sebuah aksi yang dilakukan harus bersifat sosial, yaitu harus memuat atau melambangkan yang lain, tidak sendiri saja. *Ketiga*, sebuah tindakan sosial harus memasukkan unsur-unsur maksud dan tujuan

---

[30] Usman Pelly, *Teori-teori sosial Budaya* (Jakarta: Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 144-145.
[31] Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), 14.
[32] Muhammad Agus Mushodiq, "Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19, Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 5 (2020), 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pokok.[33] Menurutnya, dunia yang saat ini kita saksikan terwujud karena adanya tindakan sosial. Hal ini karena ketika manusia melakukan sesuatu disebabkan mereka memutuskan untuk melakukannya dan ditujukan untuk mencapai apa yang dikehendakinya.[34]

Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan serta memahami (*interpretative Understanding*) tindakan sosial dan antar hubungan sosial untuk mencapai sebuah penjelasan kausal. Dalam definisi tersebut terkandung dua konsep dasar, yaitu konsep tindakan sosial dan konsep penafsiran serta pemahaman. Konsep yang terakhir ini menerangkan konsep yang pertama. Bagi Weber konsep rasionalitas merupakan kunci dari suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga sebagai dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Pembedaan pokok yang diberikan berupa tindakan rasional dan nonrasional.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Max Weber membagi empat tipe tindakan sosial yaitu, tipe tindakan rasional instrumental (*zwerkrational*), tindakan rasional nilai (*werkrational action*), tindakan tradisional (*traditional action*), dan yang terakhir tindakan afektif (*affectual action).*[35] Mengenai tipe tindakan sosial ini, Weber beranggapan bahwa sebuah bangunan sosial secara

[33] Roderick Martin, *Sosiologi Kekusaan*, terj. Herry Joediono (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 46-47.
[34] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 38.
[35] Bryan S, Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari tindakan-tindakan sosial masyarakatnya serta pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat atas tindakan tersebut.[36] Tipe-tipe tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut:[37]

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

   Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan yang secara rasional diperhitungkan serta diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Individu dalam hal ini dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria individu terebut menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaingan. Syarat untuk mencapai tujuan tersebut seorang individu harus memiliki alat yang mendukung atau cara yang paling efesien dan efektif untuk mencapainya.

   Tindakan ini lebih mengedepankan sebuah tindakan yang memiliki manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu, dan juga memerlukan cara sebagai aktualisasi dalam mencapai inti dari persoalan yang lebih spesifik dan terstruktur. Contoh: Penyelenggara pemilihan umum menyediakan aplikasi KPU yang bernama Sirekap untuk mengetahui hasil rekapitulasi perolehan suara yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara

[36] Max Weber, *Sosiologi*, terj. Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 66.
[37] Bryan S, *Teori Sosial*, 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disebabkan mengacu pada asas-asas yang sudah terdapat dalam kode etik penyelenggara pemilihan.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan rasionalitas nilai ialah tindakan rasioanl yang berdasarkan nilai yang diyakni secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang ada hubungannya dengan berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. Sebuah alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Setiap tujuan yang ada sudah tercantum dalam hubungannya dengan nilai-nilai indivdu yang bersifat absolut. Tindakan rasionalitas nilai dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya namun tujuan dari tindakan tersebut tidak terlalu dipertimbangkan. Tindakan ini semata tidak untuk mendapatkan kriteria baik dan benar dalam masyarakat. Tindakan yang paling mungkin menjadi dasar dari tindakan rasionalitas berorientasi nilai yaitu tindakan religius.[38]

Tercapai atau tidaknya sebuah tujuan bukan menjadi masalah utama, yang penting adalah kesesuaian tindakan tersebut dengan nilai-nilai dasar yang berlaku seperti nilai perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain yang terlepas dari prospek keberhasilannya. Contoh: sebagai seorang kandidat dari wakil bupati dalam berkampanye memakai bahasa yang baik serta tindakan yang baik.

[38] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan yang dilakukan seorang calon pemimpin tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam agama, salah satunya yaitu bersikap baik kepada siapapun serta memanusiakan manusia.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan tradasioanl adalah tindakan yang muncul karena kebiasaan atau tradisi pendahulunya. Tindakan tradisional merupakan salah satu tindakan pelestarian budaya dari orang terdahulu dan dilakukan berulang kali oleh masyarakat sekarang dengan alasan untuk penghormatan kepada nenek moyang. Tindakan ini bisa disebut sebagai non rasional dikarenakan dalam melakukannya yang tidak memerlukan kesadaran akan alasan dan penejelasan mengapa harus dilakukan tradisi ini secara turun-temurun.[39] Budaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok tergolong sebatas mengikuti apa yang sudah dipraktikkan oleh pendahulu (nenek moyang) mereka sebagai pelestari budaya.

Apabila dalam suatu kelompok atau masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka didukung oleh kebiasaan tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya dan diterima begitu saja. Singkatnya, tindakan ini dilakukan atas dasar kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu.

[39] Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Generik Sampai Post-Modernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tindakan Afektif

Tindakan ini terjadi dikarenakan dorongan emosi serta tidak mengutamakan pertimbangan rasional.[40] Tindakan ini dilakukan akibat atas dasar perasaan afeksi yang mengontrol individu seperti perasaan marah, sedih, senang, cinta atau perasaan lainnya. Tindakan afeksi muncul tidak berdsarkan rencana, serta tidak berdasar penyesuaian dengan tujuan yang mungkin akan dilakukan, dan tidak pula atas dasar kewajiban atau adat istiadat.

Dari keempat tipe tindakan sosial di atas harus di lihat sebagai tipe-tipe ideal. Pola perilaku khusus yang sama mungkin bisa sesuai dengan kategori tindakan sosial yang bebeda dalam situasi yang bebeda, tergantung pada orientasi subyektif dari setiap individu. Maka, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial dari Weber ini kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing aktor yang melakukan tindakan tersebut. Weber mengatakan bahwasanya setiap tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dipahami menurut arti subyektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan hal tersebut.[41]

Selain itu, Max Weber juga mengurai tentang ciri-ciri pokok tindakan sosial manusia: *pertama,* tindakan manusia yang mengandung makna subyektif ini terdiri dari berbagai tindakan-tindakan nyata.

[40] George Ritzer, *Teori Sosiologi* (Bnatul: Kreasi Wacana, 2011), 137.
[41] J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua*, tindakan manusia nyata itu dapat berbentuk tindakan membatin. *Ketiga*, tindakan tersebut dapat berasal atau dipengaruhi oleh hal-hal positif terhadap suatu kondisi, tindakan yang sengaja diulang, atau dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak luar. *Keempat*, tindakan tersebut diarahkan kepada individu atau kelompok. *Kelima*, tindakan tersebut memperhatikan tindakan yang dilakukan orang lain serta tertuju kepada orang lain tersebut.[42]

Selain lima ciri pokok tindakan sosial diatas, Weber juga mengkategorisasikan dua tindakan sosial yaitu berdasarkan konteks waktu dan berdasar atas kontesks sasarannya. Berdasar konteks waktu, ada tindakan yang diarahkan pada waktu sekarang, waktu lalu, dan waktu yang akan datang. Sedangkan dalam konteks sasaran, tindakan sosial bisa saja ditujukan kepada seorang individu atau sekelompok orang.[43]

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber merupakan sumbangan keilmuan bidang sosiologi yang penting, yakni mengenai rasionalitas. Yang mana rasionalitas ini merupakan konsep dasar yang digunakan oleh Weber tentang tipe-tipe tindakan sosial. Menurutnya, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar serta pilihan bahwa tindakan itu dilakukan oleh individu. Sejauhmana

[42] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 140.
[43] Fathur Rosi, "Kompetisi Politik Antar Aktor Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Alang-Alang Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan)" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan tersebut memberikan suatu makna subyektif bagi individu dan diarahkan kepada tindakan orang lain, maka hal tersebut dinamakan tindakan sosial.

Namun, apabila tindakan tersebut ditujukan kepada benda mati atau objek fisik tanpa dihubungkan atau diarahkan kepada tindakan orang lain, hal tersebut bukanlah tindakan sosial. Oleh karena itu, berawal dari tindakan sosial tersebut kita bisa mengetahui bagaimana makna agama bagi para pelaku politik dalam kontestasi Pilkada.

Sedangkan terkait agama dan politik, beberapa orang ada yang beranggapan bahwa agama dan poltik adalah dua unsur yang harus dipisahkan. Dikarenakan menyatunya agama dan poltik akan menimbulkan potensi penjualan ayat-ayat agama untuk kepentingan pribadi atau golongan. Akan tetapi meskipun demikian, fenomena antara agama dan politik hingga saat ini masih sering dibicarakan. Dalam politik, sebuah efek yang ditimbukan oleh agama bisa dideteksi dari segala segi. Dalam tingkat budaya poltik, keyakinan agama memberikan berbagai macam kontribusi karena dalam diri manusia agama selalu menjadi sumber pengalaman emosional yang cukup mendalam. Misalnya di beberapa negara berkembang agama bisa dijadikan sebagai dasar konstitusi.[44]

[44]Emmons. dkk., “Psikologi Agama”, www.annualreview.org/ Diakses 11 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *politik* berasal dari *polis* yang artinya negara kota (Yunani). Maka dari itu secara etimologi atau harfiah, apabila berbicara tentang politik adalah berbicara tentang negara[45] Sedangkan secara teoritis, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah serta lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Selain itu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya dipimpin oleh sejumlah pejabat atau mereka yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui kontrol kekuasan.[46]

Secara garis besar, politik berkaitan dengan kekuasaan pengaruh, kewenangan pengaturan, serta ketaatan atau ketertiban. Thompson mengemukakan politik berada pada dunia kekuasaan. Sedangkan agama merupakan suatu sistem tata keyakinan (*kredo*) dan peribadatan (ritual) manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta suatu sistem terkait norma-etika yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sesuai dengan tata keyakinan dan peribadatan.[47]

Surbakti menyatakan ada dua konsep mendasar apabila melihat pentingnya agama bagi kehidupan manusia, yaitu agama dalam arti *what religion does* dan *what is religion*. Pengertian pertama mengacu

[45] Winardi, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Mandar Maju, 1994), 4.
[46] Kaclan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010), 126.
[47] Endang Saifudin Anshari, *Kuliah al-Islam* (Jakarta: Rajawali, 1992), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada apa fungsi agama untuk kehidupan manusia, sedangkan pengertian kedua mengacu pada apa makna agama bagi kehidupan manusia.[48] Dalam realitasnya, semua pemeluk agama menyakini bahwa agama memberikan kerangka makna serta cara pandang bagi individu ataupun masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu aspek politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kuntowijoyo menyatakan bahwa agama dan negara adalah dua satuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama berisi kabar gembira dan peringatan (*basira wa nadzira*), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (*coercion*) . Agama memiliki *khatib,* juru dakwah, dan ulama. Sementara negara mempunyai birokrasi pengadilan dan tentara. Agama bisa memengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama, sementara negara mempunyai pengaruh terhadap sejarah melalui keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama merupakan kekuatan dari dalam, sementara negara merupakan kekuatan dari luar.[49]

Sedangkan politik merupakan berbagai macam aktivitas dalam suatu sistem negara yang berkaitan dengan proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem tersebut. Surbakti menjelaskan lebih rinci bahwa politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan

[48] Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 187-188.
[49] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan yang mengikat terkait kebaikan bersama dengan masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Maka, berdasar definisi tersebut Surbakti menyimpulkan bahwa terdapat empat aspek dalam politik, diantaranya: perilaku politik, pemerintah dan masyarakat, keputusan untuk kebaikan bersama, konflik, konsensus, serta perubahan.[50]

Dalam konteks keindonesiaan, Adnan mengatakan bahwa hubungan agama dan negara dapat dibagi menjdai tiga kategori. *Pertama,* kelompok akomodatif, yang berpandangan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh agama dan kehidupan duniawi diatur oleh logika duniawi. Pemikiran ini dipelopori oleh Nurcholis Madjid, yang seolah mengandung elemen sekularistik karena adanya upaya memisahkan antara agama dengan dunia, meskipun sebenarnya hanyalah pembedaan wilayah.[51] Pemikiran seperti ini dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari "Islam Politik" ke "Islam kultural" serta mengakibatkan Islam lebih berwatak liberalis dan humanis daripada watak politis yang menakutkan, utamanya bagi penyelenggara negara.[52]

*Kedua,* kelompok moderat, yang berpandangan bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, melainkan juga sebagai ideologi. Islam adalah agama totalistik (*kaffah*) yang mengatur segala asek

[50] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), 11.
[51] Nurcholis Madjid, *Islam Keindonesiaan dan Kemoderan* (Jakarta: Paramadina, 1993), 92.
[52] Muhammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 231-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan sosial-politik. Tokoh dari kelompok ini yaitu Amien Rais, Jalaluddin Ramat, dan Imaduddin Abdurrahim. *Ketiga*, kelompok idealis-radikal, yang beranggapan bahwa Islam berada di atas semua ideologi sehingga untuk memperjuangkannya dibutuhkan cara-cara kekerasan serta menolak ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan organisasi sosial kemasyarakatan. Pandangan seperti ini dapat kita lihat pada tindakan Abdul Qadir Jaelani.[53]

Pada masa kini praktik kehidupan kenegaraan terkait hubungan agama dan negara di Indonesia, Din Syamsudin mengklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: *Pertama, integrated* (hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral). Dalam hal ini domain agama juga menjadi domain negara, begitu pula sebaliknya, sehingga agama dan negara berjalan menjadi satu kesatuan karena tidak ada jarak diantara keduanya. *Kedua, intersectional* (agama dan negara berjalan berdampingan atau bersimpangan). Maksud dari hal tersebut bahwa agama dan negara berjalan secara simbiotik serta dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung sehingga keduanya masih ada kontrol masing-masing. Dalam hal ini keduanya bertemu untuk kepentingan masing-masing, yang mana agama memerlukan lembaga negara untuk akselerasi pengembangannya, begitu juga lembaga negara memerlukan

[53] Hasan, *Modernisasi Indonesia*, 244-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama untuk membangun negara yang adil serta sesuai dengan spirit ketuhanan.[54]

*Ketiga*, sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). Dalam klasifikasi ini terjadi pemisahan hubungan antara agama dan negara/politik. Oleh karenanya, golongan ini menolak dasar yang berasal dari agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara.[55] Menurut Peter L. Berger sekularistik merupakan sebuah proses di mana segala sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga serta simbol-simbol keagamaan. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sedangkan di negara-negara Eropa selain Peranciss penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga dalam hal tertentu masih terlihat jelas hubungan antara agama dan negara, seperti hari libur agama dijadikan hari libur nasional, adanya partai agama, dan sebagainya.[56]

Donald Eugen Smith mengatakan bahwa sebenarnya sekularisasi politik dan pelibatan agama dalam politik berjalan secara bersamaan.[57] Sekularisasi politik tidak hanya terjadi di negara maju, karena dalam hal dan tingkat tertentu memang terjadi di negara-negara berkembang,

---

[54] Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", Vol. 14, No. 1, (Juni 2014), 16.
[55] Ibid., 16.
[56] Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2013), 248.
[57] Donald Eugen Smith, *Religion and Political Development* (Boston: Little Brown and Company, 1970), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk negara Muslim. Islam dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena relasi keduanya telah menjadi bagian dari kekayaan peradaban dunia. Apapun bentuk alasan untuk menyikapi Islam sebagai agama dan politik tidak menggesernya sebagai bagian peradaban besar dunia. Hal ini disebabkan karena keajegan (kokoh dan utuh) Islam yang memuat dua keimanan pokok berupa, iman terhadap al-Qur'an sebagai firman Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sebagai *role* model manusia sempurna serta ekspetasi setiap muslim.[58]

Hubungan fundamen keimanan yang pertama dengan yang kedua mengandaikan adanya acuan sumber petunjuk dan implementasi. Lantas kemudian keterkaitan keduanya menempatkan Islam sebagai agama paripurna yang meliputi segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya politik itu sendiri. Hal yang paling penting mengenai hubungan Islam dan politik sebenarnya bukan pada perdebatan integralitas atau disintegralitasnya, melainkan bagaimana realitas keduanya membentuk diskursus baru. Sebab pada awalnya Islam memang hanya diyakini sebagai sistem kepercayaan dan budaya. Namun dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami krisis dari berbagai sektor termasuk politik dan krisis tersebut memerlukan suatu pendekatan baru yang betul-betul memadai. Oleh karena itu, darisinilah Islam mengambil posisi tidak hanya sekadar

[58] John M. Owen, *Confronting Political Islam* (New Jersey: Princeton University Press, 2015), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem kepercayaan melainkan juga telah memasukkan politik sebagai realitas yang perlu dituntaskan.[59]

Islam sebagai *addin wa daulah* menjadi suatu keterhubungan yang sangat simbolik-formalistik serta keterhubungan pada persoalan sentral moral. Dalam hal ini Islam berfungsi sebagi sumber dan pusat moralitas dalam menata masyarakat, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam piagam Madinah yang bisa dibilang sebagai nota politik dan dasar kehidupan sosial masyarakat Madinah sebagai suatu negara pada saat itu. Inilah bentuk integralitas Islam dan politik, yang mana esensi dari Islam sebagai sumber moral diutamakan daripada unsur simbolik-formalistiknya.[60]

Perdebatan pemisahan Islam dan politik tidak seramai yang terjadi di Barat karena sejak awal universalitas Islam tidak mengalami kendala terhadap berbagai aspek, sehingga tidak memicu lonjakan perdebatan yang berarti. Berbeda halnya dengan Barat yang sejak awal memiliki problem keutuhan yang lemah, khususnya antara dominasi agama (gereja) dan kekuasaan yang menampilkan persetegangan agama dan kekuatan ilmu pengetahuan. Pada saat itu pengetahuan diklaim menjadi unsur penyelamatan terhadap Barat sehingga muncullah era *Renaissance* atau pencerahan yang pada intinya rasionalitas telah menggeser pengaruh agama. Pada saat itu

[59] Bassam Tibi, *Islam Between Culture and Politics* (New York: Palgrave Macmilan, 2001), 100.
[60] Nazih N Ayubi, *Political Islam: Religion and Politic in The Arab World* (New York: Taylor and E Library, 1991), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama hanya menjadi ruang personal sedangkan ruang sosial dan politik menjadi tugas ilmu pengetahuan untuk mengaturnya. Hal tersebut merambah pada kehidupan politik sehingga memperkuat pemisahan antara agama dan politik (sekularisasi).[61]

Adanya persoalan penolakan integralitas agama dan politik yang terjadi di tengah umat Muslim secara tidak langsung banyak dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di Barat karena dalam beberapa hal umat Muslim juga banyak berkiblat ke Barat.[62] Seperti yang terjadi pada peristiwa revolusi Turki tahun 1924 di bawah pimpinan Mustafa Kemal yang berdampak pada penghapusan *khilafah* di Turki serta dilepaskannya Islam sebagai negara dan dihapusakannya syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara. Sehingga kemudian Turki lahir sebagai negara republik sekuler yang tegas memisahkan urusan kenegaraan dan keagamaan.[63]

Akan tetapi dalam realita saat ini, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun negara tersebut telah melakukan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Hal ini terjadi karena karakteristik dari ajaran Islam itu sendiri yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga berisi tentang standar etika moral dan

---

[61] Peter Mandaville, *Global Politic Islam* (New York: Taylor and E-Library, 2007), 9-10.
[62] Abdul Mukti, "Ulama, Masjid dan Ruang Demokrasi: Pergumulan Elit Agama Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kalimantan Barat", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2 (November 2019), 69.
[63] Muhammad Anang Firdaus, "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya", Vol. 13, No. 3 (September – Desember 2014), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma-norma kehidupan masyarakat dan negara.[64] Dengan demikian Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, tapi juga tidak dapat dituduh sebagai penghalang pandangan objektifitas keduniaan, karena keterpaduan terletak pada tujuan bukan pada simbolnya.

Islam tidak sepenuhnya membedakan antara hal-hl yang sakral dan profan, sehingga Muslim yang taat menolak pemisahan antara agama dan negara. Maka dari itu, sekularisasi yang terjadi di negara yang mayoritas Muslim umumnya tidak sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Bahkan mengadopsi sistem sekuler, seperti sistem demokrasi dan penegakan hak asasi manusia yang dalam banyak hal dilakukan dengan pemberian legitimasi keagamaan melalui ijtihad dan penyesuaian-penyesuaian tertentu.[65]

Menguatnya kembali orientasi keagamaan dan penolakan terhadap sekularisme telah menjadi fenomena di seluruh dunia Islam sejak akhir dasawarsa 1970-an. Hal ini karena semakin tingginya tingkat pendidikan umat Islam sehigga memunculkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang karakteristik ajaran Islam yang memang tidak memisahkan antara agama dan negara. Bahkan, kebangkitan dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial cukup nampak sejak

[64] Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama", 249.
[65] Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy 1966-1993* (Hambur: Abera Verlag, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasawarsa 1980-an sebagai *counter* terhadap proses sekularisasi politik tersebut.[66]

Kecenderungan desekulariasi ini tidak hanya terjadi di dunia Islam, tetapi juga di berbagai negara di dunia termasuk Amerika Serikat, karena manusia tetap membutuhkan nilai-nilai spiritual meskipun mereka hidup dalam masyarakat modern yang menjunjung rasionalitas. Disebabkan kenyataan itulah Peter L. Berger pada akhir dasawarsa 1990-an menolak teori *"secularization"*, dan sebaliknya mengemukakan teori *"desecularization of the world"*. Hal tersebut terjadi karena dalam proses sekularisasi menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan tandingan dari sekularisasi yang kuat (*poweful movements of counter-secularization*).[67]

Namun, perlu dibedakan antara desekularisasi dalam konteks negara (politik) dengan desekularisasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Umumnya, di negara Barat fenomena desekularisasi terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat, sementara negara masih tetap mendukung sekularisme meskipun sebagian warga menuntut penghapusan sekularisme. Di Indonesia desekularisasi terjadi pada akhir 1980-an sebagai *counter* terhadap kebijakan pemerintah masa Orde Baru yang pada masa awal mendukung sekularisasi yang sejalan dengan proses modernisasi pembangunan. Desekularisasi itu antara

[66] Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama", 250.
[67] Peter L. Berger, *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics* (Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain ditandai dengan revisi kebijakan pemerintah yang mengakomodasi sebagian aspirasi umat Islam, seperti UU No. 7 tahun 1989 terkait Peradilan Agama, UU No. 2 tahun 1989 terkait Sistem Pendidikan Nasional yang mengakomodasi pendidikan agama dan lain sebagainya.[68]

Dengan demikian, baik dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini bahwa hubungan antara agama dan negara di Indonesia berada dalam bentuk *intersectional* atau hubungan persinggungan antara agama dan negara, yang artinya tidak sepenuhnya terintegrasi serta tidak sepenuhnya terpisah. Disebabkan terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam atau membutuhkan legitimasi agama.[69] Oleh karenanya, negara Indonesia seringkali dikatakan bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Seperti yang dikatakan oleh Masdar Hilmy dalam tulisannya bahwa konstruk negara Indonesia adalah "negara bukan-bukan" (bukan sekuler dan bukan agama).[70]

Negara Indonesia merupakan negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler namun secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Bahkan, secara eksplisit disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan

[68] Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama", 250.
[69] Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama", 251.
[70] Masdar Hilmy, "Agama dan Demokrasi", http://arjunacellular.blogspot.com/2014/07/agama-dan-demokrasi.html?m=0/ Diakses 21 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang Maha Esa". Selain itu, pengakuan akan eksistensi agama dalam kehidupan juga diwujudkan dalam bentuk pengakuan resmi lembaga kegamaan tertentu dalam negara serta mengambil nilai-nilai dan norma-norma dalam agama.[71]

Agama, ideologi, dan simbolisme ketiganya memiliki keterkaitan dalam fungsinya di dunia poltik. Pada saat ini banyak kandidat politk yang menyadari pentingnya mengkomunikasikan agama kepada massa dapat membantu kesuksesan serta menarik simpati pemlih.[72] Dikarenakan bagian penting dari sebuah kekuasaan diperoleh dari massa rakyat yang menyatakan bahwa agama memiliki pengaruh di antara mereka. Dalam sepanjang sejarah sebuah simbol telah menjadi stimulan yang kuat dari sentimen manusia. Sedangkan agama sebagai ideologi ada kaitannya dengan pembentukan partai politik yang mana dalam konteks ini agama menjadi sistem simbol dalam partai politik tersebut.

Memang, bukanlah suatu kemudahan ketika berusaha membawa nilai-nilai yang terdapat dalam agama ke semua unsur kehidupan, khususnya dunia politik. Ketika agama kita bawah dalam ranah politik, maka tindakan pelaku politik harus memiliki prinsip bahwa agama dan politik harus sejalan. Bukan agama yang menuruti kemauan politik (berkedok agama), melainkan politiklah yang harus

[71] Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama", 252.
[72] Lia Eliawati, "Aspek Postif Fungsi Politik Agama", *Jurnal Papatung*, Vol. 2, No. 1 (2019), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan agama. Seperti halnya sebagai seorang pemimpin politisi tidak boleh sewenang-wenang dalam membuat kebijakan ataupun bertindak untuk masyarakat yang dipimpin.[73]

Dalam sebuah masyarakat majemuk, agama tidak hanya menjadi faktor pemersatu namun juga dapat disalahgunakann sebagai alat pemecah belah. Sebuah perasaan seagama tidaklah cukup untuk menciptakan perasaan memiliki atau kesatuan sosial. Maka harus ada faktor lain yang mampu memperkuat dan mempertahankan kohesi sosial. Oleh karena itu, agama memiliki dua efek yakni sebagai pemersatu dan pemecah belah kesatuan sosial.[74]

Maka dari itu untuk meneliti makna agama dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020 teori tindakan sosial Max Weber relevan digunakan untuk menganalisis makna agama bagi para pelaku politik serta beberapa teori terkait hubungan agama dan negara, yang mana masing-masing dari bagian tersebut akan terus mencari keseimbangan dan harmoninya.

## H. Metodelogi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell metode kualitatif ialah metode yang digunakan untuk mengeskplorasi serta memahami makna dari sejumlah individu atau

[73] Fuad Abi Haleel, "Pentingnya Agama dalam Kehidupan Politik", dalam www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org (27 Febuari 2013). Diakses 11 November 2020.
[74] Thomas F O'Dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal,* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolompok yang berasal dari lingkungan sosialnya. Dalam proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa usaha penting, diantaranya: mengajukan beberapa pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data yang dilakukan secara induktif dari mulai tema yang khusus ke tema umum serta membuat penafsiran dari makna data.[75] Data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif ini berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Oleh karena itu, ada kemungkinan semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diketahui. Maka, laporan penelitiannya nanti akan berisi kutipan-kutipan data.

Pendekatan yang digunakan yakni deskriptif kualitatif yang berasaskan studi kasus. Yang mana dalam hal ini peneliti menyelidiki dengan cermat suatu peristiwa, aktivitas dan proses suatu kelompok individu. Selain itu dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti juga menggunakan pernyataan terbuka, pendekatan yang berkembang secara dinamis, dan datanya yang tekstual. Serta mengumpulkan data dari para partisipan, meneliti konteks atau setting partisipan dan berkolaborasi dengan partisipan.[76]

**2. Informan Penelitian**

Informan penelitian ialah suatu subyek penelitian baik orang, maupun lembaga (organisasi) yang dapat memberikan informasi terkait

[75] John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4-5.
[76] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena atau permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian.[77] Dalam menentukan informan, teknik yang digunakan adalah teknik *purposeful sampling*, yang mana teknik dalam pengambilan *sample* ini didasarkan atas tujuan dan strategi yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi, orang atau lembaga yang dipilih dalam penelitian tersebut harus memiliki kriteria sebagai sampel. [78] Sedangkan terkait jumlah informan dalam hal ini tidak ditentukan, dikarenakan dalam penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumah sampel minimum (*sampel size*). Umumnya pada penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada permasalahan tertentu hanya menggunakan 1 informan saja. Setidaknya dalam menentukan jumlah informan, ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu kecukupan dan kesesuaian.[79]

Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari: *Pertama,* kandidat dan tim sukses dari salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. *Kedua,* KPUD Sidoarjo selaku penyelenggara pemilu. *Ketiga,* BAWASLU Sidoarjo selaku pemantau atau pengawas dalam proses pemilu. *Keempat,* warga Sidoarjo yang sudah memiliki hak pilih. Kemudian, dalam teknik *purposeful sampling* ini, jenis teknik pemilihan informan yaitu *snowball sampling* atau *chain sampling* yang mana pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, informan ketiga berdasarkan dari informan kedua dan seterusnya. Hal ini

[77] Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", https://www.researchgate.net/publication/329351816/Diakses 19 November 2020.
[78] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.
[79] Kresno, S & Martha, E, "*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan karena peneliti ingin mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam terkait fungsi agama dalam kontestasi pilkada Sidoarjo 2020.

**3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sidoarjo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan beberapa pertimbangan, yakni:

1) Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi basis ormas keagmaan Nahdhatul Ulama dan basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki varian fenomena politik, yaitu hubungan antara organisasi keagamaan NU dan PKB. Selain itu, dalam kontestasi Pilkada bulan depan ada salah satu kandidat yang merupakan anak dari seorang ulama yang mana ulama tersebut memberikan pengaruh masif untuk warga Sidoarjo.
2) Lokasi penelitian belum pernah dijadikan penelitian dengan menggunakan tema yang sama, sehingga peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi lembaga keagamaan dan masyarakat sekitar.
3) Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk menggali data dan informasi yang diperlukan.

**4. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada awal bulan November sampai dengan Januari. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pra Pelaksanaan Penelitian, yang terdiri dari: mencari permasalahan akademis yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian, membuat proposal penelitian, melaksanakan ujian seminar proposal.
2. Pelaksanaan, yang terdiri dari: menyelesaikan administrasi penelitian yang berhubungan erat dengan surat perizinan, proses bimbingan, pengumpulan data dan pengolahan data.
3. Penyusunan laporan.

**5. Sumber Data**

1) Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pencari data.[80] Artinya, sumber ini secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti, yang dapat diperoleh dari subjek serta informan yang mengetahui terkait masalah yang diteliti. Informan merupakan orang yang memberikan informasi kepada peneliti yakni masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam Pilkada serta tim sukses.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa catatan-catatan yang mungkin dimiliki oleh informan. Sumber data ini bisa diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

[80] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah sebuah usaha membatasi penelitian, mengumpulkan sebuah informasi melalui wawancara baik terstruktur maupun tidak, dokumentasi, dan materi video visual.[81] Strategi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Observasi

Observasi ialah langkah dalam mengumpulkan data dengan turun langsung ke lapangan guna mengamati perilaku dan aktifitas masing-masing individu di lokasi penelitian. Dalam langkah ini, peneliti merekam ataupun mencatat apa yang didapatkan. Observasi yang dilakukan peneliti ialah non-partisipan yang mana peneliti mengamati fenomena politik di Sidoarjo. Instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang perolehan data yaitu buku catatan, alat tulis, video recorder, kamera. Dalam (pengamatan) observasi yang dilakukan adalah mengamati beberapa posko kemenangan dari setiap paslon yang berada di wilayah Sidoarjo Kota yang peneliti pilih secara acak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada simbol dan isu keagamaan yang dipakai dalam proses kampanye. Sedangkan Aspek yang diamati berupa: alamat/lokasi posko serta keadaan lingkungan disekiar posko kemenangan setiap paslon.

b) Wawancara

[81] John W. Creswell, *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2009), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada tiga jenis wawancara dalam teknik pengumpulan data, diantaranya: wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam. Akan tetapi dari ketiga jenis wawancara tersebut, peneliti memilih menggunakan wawancara mendalam. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang mana isinya bisa berupa pendapat, sikap, dan pengalaman dari setiap individu. Serta dengan menggunakan wawancara mendalam, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kehilangan informasi.[82]

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara secara berhadap-hadapan dengan informan, bisa juga mewawancarai melalui telepon atau terlibat langsung dalam *focus group interview*. Dalam wawancara mendalam, instrumen yang dibutuhkan yaitu alat tulis, alat perekam, kamera serta buku catatan dan panduan wawancara. Beberapa pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada kandidat diantaranya; identitas diri berupa nama, jabatan, agama, alamat, pendidikan terakhir, serta pertanyaan penelitian berupa: *Pertama*, apa makna agama menurut Anda? *Kedua*, apa yang melatar belakangi Anda mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati Sidoarjo? *Ketiga*, menurut Anda bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?.

[82]Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Widya Sastra, 2006), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman wawancara untuk tim sukses diantaranya; identitas diri berupa nama, jabatan, agama, alamat, pendidikan terakhir, serta pertanyaan penelitian berupa: *Pertama,* apa makna agama menurut Anda? *Kedua,* bagaimana proses yang Anda lakukan selaku tim sukses dalam berkampanye? *Ketiga,* menurut Anda bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?.

Pedoman wawancara kepada anggota KPUD Sidoarjo diantaranya; identitas diri berupa nama, jabatan, agama, alamat, pendidikan terakhir serta beberapa pertanyaan berupa: *Pertama,* apa makna agama menurut Anda? *Kedua,* menurut Anda bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?.

Setelah itu, pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada BAWASLU Sidoarjo diantaranya; identitas diri berupa nama, jabatan, agama, alamat, pendidikan terakhir, serta beberapa pertanyaan berupa: *Pertama,* bagaimana makna agama menurut Anda? *Kedua,* bagaimana proses kampanye yang dilakukan setiap kandidat, apakah ada penggunaan isu atau simbol keagamaan yang digunakan dalam proses kampanye? *Ketiga,* menurut Anda bagaimana hubungan antara agama dan politik dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020?.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman wawancara untuk masyarakat Sidoarjo yang sudah memiliki hak pilih diantaranya; identitas diri berupa nama, pekerjaan, agama, alamat, pendidikan terakhir, dan pengalaman serta beberapa pertanyaan berupa: *Pertama*, apa makna agama menurut Anda? *Kedua*, sosok pemimpin seperti apa yang Anda inginkan untuk kota Sidoarjo?.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data berupa dokumen publik yang berasal dari koran, majalah, buku, surat atau email, internet, artikel, skripsi, jurnal dan yang lainnya. Dari berbagai data tersebut, perlu disaring secara bijak dan harus disesuaikan dengan penelitian yang penulis lakukan.

d) Materi audio visual

Dalam konteks ini, materi audio visual yang digunakan ialah rekaman video wawancara, maupun video dari media elektronik yang menjelaskan tentang tema terkait.[83]

**7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ialah penyajian dari temuan penelitian dengan cara yang biasa digunakan. Creswell memberikan enam tahapan dalam proses analisis data, yakni:[84]

[83] Ibid, *Research Desain*, 266.
[84] Ibid., 276-283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengelolah data dan mempersiapkannya untuk dianalisis dengan cara mentranskrip wawancara, mengetik data lapangan, memilih serta menyusun data berdasarkan informasi.
2. Membaca keseluruhan data serta memberikan catatan pinggir terkait gagasan umum yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan men-coding data.
4. Menerapkan proses coding yang berguna untuk mendeskripsikan berbagai kategori dan tema-tema yang akan ditulis.
5. Menghubungkan tema-tema terkait dalam bentuk narasi atau laporan.
6. Menginterpretasikan data.

**8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pada dasarnya, teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data digunakan untuk menyanggah balik atas tuduhan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah.[85] Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah dan sekaligus digunakan untuk menguji data yang diperoleh. Dalam uji keabsahan data meliuti beberapa hal, diantaranya: uji

[85] Moleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derajat kepercayaan (*credibility)*, keteralihan (*transferability)*, kebergantungan (*dependability)*, dan kepastian (*confirmability)*.[86]

1. Kredibilitas

Kredibilitas dilakukan untuk membuktikan sebuah penelitian yang diamati benar-benar telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Supaya mendapatkan data yang valid, dapat ditempuh melalui teknik: (1) observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*), (2) triangulasi (*triangulation*), (3) pengecekan anggota (*member check*), (4) pengecekan terkait kecukupan frekuensi (*referencial adequacy check*) keteralihan dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara "uraian rinci".[87] Langkah-langah dalam uji kredibilitas adalah sebagai berikut:

a. Mengoreksi metode yang digunakan dalam memperoleh data. Dalam hal ini metode yag dimaksud adalah observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi dan materi audio visual.
b. Memeriksa ulang hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan hasil interpretasi peneliti.
c. Melakukan triangulasi (pengecekan data) dengan tujuan untuk menjamin obyektifitas dalam memahami dan menerima informasi, supaya hasil dari penelitian tersebut akan lebih objektif dengan

[86] Yvonna S. Linco.ln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (America: Sage Publications, 1984), 289-331.
[87] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung oleh *cross check* sehingga hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.[88] Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode atau teknik. Triangulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan cara:

a. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
b. Membandingkan apa yang diutarakan oleh informan di depan umum dengan apa yang diutarakan secara pribadi. Maka dari wawancara dilakukan secara ulang oleh peneliti dengan situasi yang berbeda.
c. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang bersangkutan.[89]

Sedangkan Triangulasi dengan metode peneliti menggunakan metode ganda untuk memperoleh data yang sama, yaitu observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi dan materi audio visual. Tujuan dilakukannya triangulasi sebenarnya bukan untuk mencarai kebenaran tentang beberapa fenomena, akan tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti tentang apa yang telah dilakukan.[90]

---

[88] Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), 31.
[89] Michael Quinn Patton, *How to Use Qualitative Methods in Evaluation* (America: SAGE Publications, 1987), 66.
[90] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tranferabilitas

Tranferabilitas atau keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara "uraian rinci". Dalam hal ini peneliti berusaha menguraikan hasil penelitiannya secara rinci. Proses penguraian laporan diusahakan dapat mengungkap secara khusus terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca supaya para pembaca mampu memahami temuan-temuan yang diperoleh oleh peneliti dengan penuh tanggungjawab.

3. Dependibiltas

Dependibilitas atau kebergantungan dilakukan dengan tujuan untuk menanggulangi segala kesalahan dalam konseptualisasi, rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, serta pelaporan hasil penelitian. Oleh karena itu diperlukan *dependent auditor* atau para ahli yang sesuai dengan pokok persoalan penelitian ini. Dalam hal ini sebagai *dependent auditor* adalah dosen pembimbing skripsi.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau kepastian dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah data yag dihasilkan obyektif atau tidak. dalam kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan pengauditan dependabilitas.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penelitian serta membuat laporan, maka disusun sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodelogi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konteks penelitian yang berisi tentang deskripsi kabupaten Sidoarjo berupa letak geografis, aspek ekonomi, aspek sosial keagamaan, aspek politik. Serta deskripsi tentang Pilkada Sidoarjo berupa tujuan Pilkada, tahapan Pilkada, penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, pemilih Pilkada, serta hasil Pilkada. Selain itu, dalam bab ini juga akan disajikan beberapa data dari informan terkait tema penelitian.

Bab ketiga berisi penyajian data yang berisi tentang makna agama dalam kontestasi Pilkada berupa makna agama bagi penyelenggara, peserta serta pemilih Pilkada.

Bab keempat berisi tentang penutup, dan diakhiri dengan daftar pustaka serta segala bentuk lampiran-lampiran dokumenter yang mendukung dari hasil penelitian yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONTEKS PENELITIAN

## A. Deskripsi Kabupaten Sidoarjo

### 1. Letak Geografis

**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Sidoarjo**

Sumber: https://www.sejarah-negara.com/935/peta-sidoarjo/

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota penyangga Ibukota Provinsi Jawa timur yang daerahnya mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan tersebut disebabkan karena berbagai potensi yang terdapat di wilayah industri dan perdangangan, pariwisata, serta usaha kecil menengah yang dikemas dengan baik. Kabupaten Sidoarjo terletak di antara 112,5' dan 112,9 Bujur Timur dan antara 7,3' dan 7,5' Lintang Selatan. Perbatasan wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu; sebelah Utara dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah Barat dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah Timur dengan Selat Madura.

Karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi tiga bagian, *pertama* daerah bagian tengah adalah daerah dengan luas 40.81%



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan daerah dengan sebagian berair tawar. *Kedua*, daerah yang mayoritasnya merupakan pertambakan dan pantai dengan luas wilayah 30% dan *ketiga* memiliki luas wilayah 29.20% dibagian barat.[91]

**2. Aspek Ekonomi**

Sektor utama aspek ekonomi Kabupaten Sidoarjo terdapat perikanan, industri, dan jasa. Selat Madura yang terdapat di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, berupa ikan, udang, dan kepiting. Adanya logo Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan gambar Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan utama di kota ini. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan "Kota Petis" . Perkembangan yang cukup pesat tersebut didukung dengan lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda. Dengan kondisi sosial politik yang relatif stabil serta memiliki sumber daya manusia yang produktif dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Beberapa sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, diantaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro-Waru dan Tebel-Gedangan, serta sentra industri kerupuk di Telasih-Tulangan.[92]

**3. Aspek Sosial Keagamaan**

Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo bebas untuk menganut keyakinan dalam beragama yang telah diatur dalam Undang-Undang. Di

[91] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, http://portal.sidoarjokab.go.id/ Dikases 5 Febuari 2021.
[92] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki enam keyakinan agama yang tersebar di 18 kecamatan. Keyakinan tersebut diantaranya adalah agama Islam dengan jumlah pengikut 2.127.597 jiwa, agama Kristen dengan jumlah 70.226 jiwa, agama Katolik dengan jumlah 30.110 jiwa, agama Hindu dengan jumlah 4.157 jiwa, agama Budha dengan jumlah 5.534 jiwa dan yang terakhir yaitu agama Konghucu dengan jumlah 245 pemeluk.[93] Dari penjelasan singkat diatas, dapat kita jelaskan bahwa gambaran untuk keberagaman yang ada di Kabupaten Sidoarjo ialah mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebab dari jumlah penduduk 2.262.440 jiwa, ada 2.127.597 beragama Islam.[94]

Dengan kondisi keagamaan yang beragam tersebut, tidak menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo mengalami perdebatan. Adanya keberagaman tersebut justru membuat warga di Kabupaten Sidoarjo hidup dalam kondisi yang harmonis dan penuh toleransi. Keberagaman yang terdapat di Sidoarjo menjadikan komunikasi antar umat beragama menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Selain itu, di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat banyak sekali tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dengan tenang. Dari ke enam agama yang dianut oleh masyarakat Sidoarjo, tempat ibadah tersebut ada di

[93] BPS Kabupaten Sidoarjo, "Pemeluk Agama Menurut Agama dan Kecamatan, 2018", https://sidoarjokab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/25/15/pemeluk-agama-menurut-agama-dan-kecamatan-2018.html/ Diakses 24 April 2021.
[94] Dinas Komunikasi dan Informatika, "Profil Masyarakat", https://www.sidoarjokab.go.id/profil-masyarakat/ Diakses 24 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo.[95] Berikut ini adalah jumlah tempat peribadatan di kabupaten Sidoarjo:[96]

**Tabel 2.1**

**Jumlah Tempat Ibadah di Sidoarjo**

| **Jumlah Tempat Peribadatan di Sidoarjo** | |
|---|---|
| Masjid | 1.144 |
| Musholla | 4.533 |
| Gereja Protestan | 144 |
| Gereja Katolik | 6 |
| Pura | 4 |
| Vihara | 2 |
| Kelenteng | 1 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Selain terdapat tempat peribadatan dari ke enam agama tersebut, di Sidoarjo juga terdapat beberapa organisasi masyarakat yang masing-masing mewakili dari ke enam agama resmi di Sidoarjo. Berikut ini merupakan tabel ormas keagamaan di Sidoarjo:

[95] Http://www.sidoarjokab.go.id/ Di akses 14 Januari 2021.
[96] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dalam https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1850/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2018-.html / Diakses 1 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.2**

**Jumlah Ormas Keagamaan di Sidoarjo**

| **Jumlah Ormas Keagamaan di Sidoarjo** | | |
|---|---|---|
| Islam | 1. NU | 18 MWC (NU Kecamatan)<br>382 NU ranting (tingkat Desa) |
| | 2. Muhammadiyah | 18 Cabang (Muhamadiyah Kecamatan)<br>184 Ranting (tingkat desa) |
| | 3. LDII | 50 |
| Kristen | 1. PGIS Sidoarjo | 16 |
| Hindu | 1. PHDI Kab.Sidoarjo | 1 |
| Budha | 1. PUBI | 5 |
| Konghucu | 1. Matakin Kab.Sidoarjo | 1 |

Sumber: FKUB Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel diatas, terdapat PGI Sidoarjo yang merupakan Persekutuan Gereja Indonesia Setempat Sidoarjo dengan beralamatkan di Jln. Trunojoyo 39 A (GKI Sidoarjo) yang saat ini diketuai oleh Pdt. Natanael Sigit Wirastanto. Persekutuan Gereja Indonesia Setempat Sidoarjo atau biasa disingkat dengan PGIS ini adalah sebuah organisasi ekumenis dimana anggotanya di bawah naungan PGI (Persekutuan Gereja Indonesia). PGIS beranggotakan sekitar 16 Gereja diantaranya; GKI Sidoarjo, GKI Sepanjang, GKI Krian, GKI Pondok Tjandra Indah, GKJW Waru, GKJW Tropodo, GKJW Sidoarjo, GKJW Trosobo, GKJW Mlaten, HKBP Sidoarjo, HKBP Waru, GPIB Bethesda, GPIB Tiberias, Gereja Toraja, GKMI Taman Pinang, dan GKKA Diponegoro.Kegiatan PGIS Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih banyak didominasi kegiatan internal misalnya, acara doa pemuda bersama atau merayatakan Natal dan Paskah bersama dengan sesama gereja-gereja yang telah disebutkan. PGI

Selain itu, PGIS juga bergerak dalam pelayanan masyarakat atau terlibat dalam kelembagaan pemerintah seperti halnya FKUB Sidoarjo. Terkait hal tersebut, PGIS mendukung program FKUB seperti, mengadakan kunjungan ke tempat-tempat ibadah, silaturahmi dengan lembaga-lembaga keagamaan seperti PCNU atau mengisi siraman rohani dalam perspektif Kristen di Radio Suara Sidoarjo. Untuk ke depannya, PGIS sudah merencanakan kegiatan yang lebih banyak edukasi misalnya, melakukan kerjasama dengan Lembaga Cempaka dan JIP (Jaringan Indonesia Positif) dalam edukasi HIV Aids, diskusi lintas iman dan melaksanakan webinar dengan tokoh lintas iman serta pergerakan mahasiswa seperti PMII atau Gusdurian juga diperkuat. Dalam bidang pendidikan, PGIS belum ada sekolah khusus Kristen, namun sudah ada rencana bahwa PGIS akan mendukung sekolah-sekolah negeri yang belum ada guru agama Kristen, baik dari tingkat SD samapai SMA.[97]

Selain PGIS Sidoarjo, terdapat juga PUBI Sidoarjo yang terletak di perumahan Pondok Jati Blok X-8 Sidoarjo dan sekaligus menjadi tempat peribadatan umat Buddha Sidoarjo. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga ini lebih banyak berkonsentrasi melalui seni

[97] Pdt. Yoses Rezon Suwignyo, (Sekretaris PGIS Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 19 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya, donor darah, pengobatan gratis, dan kerja bakti sosial membersihkan taman makam pahlawan serta tabur bunga.[98]

Selain organisasi tersebut, di Sidoarjo juga terdapat organisasi Muhammadiyah yang berada di Jln. Mojopahit 666 B Sidoarjo dengan memiliki 18 cabang tingkat Kecamatan, 184 ranting tingkat Desa/ Kelurahan, dan organisasi otonom sebanyak 7. Sedangkan amal usahanya terdiri dari; bidang keagamaan terdapat KBIH dengan jumlah 1 buah, TKQ/ TPQ 92 buah, Masjid/ Musholla 201 buah. Bidang pendidikan SD/ MI sebanyak 16 buah, SMP/ MTs 7 buah, SLB 3 buah, Madrasah Diniyah 22 buah, TK/ PG 45 buah. Sedangkan di bidang sosial dan ekonomi terdapat RS/ BP/ Poliklinik sebanyak 7 buah, Panti asuhan 4 buah, koperasi dan BMT sebanyak 6 buah.[99]

Di bidang ekonomi, ormas Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga yang berfungsi mengelola keuangan yang khusus dijalankan untuk kegiatan sosial yang sumber dananya didapatkan dari anggota dan diperuntukkan untuk anggota serta masyarakat umum. Lembaga tersebut yaitu Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU merupakan lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana

[98] Nico Tri Sulistyo Budi, (Ketua PUBI Sidoarjo), *Wawancara*, 18 April 2021.
[99] PDM Kabupaten Sidoarjo, "Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo", http://sidoarjo.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html/ Diakses 27 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya yang berasal dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya.[100]

Jika melihat sejarah, keanggotaan Muhammadiyah memang sejak dahulu berasal dari kalangan pedangang dan industri di kalangan pribumi. Jadi, tidaklah heran jika amal usaha yang dimilikinya cukup banyak. Program pembinaan ekonomi umat merupakan salah satu bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap ekonomi masyarakat. Selain itu, juga terdapat program atau gerakan di bidang ekonomi yang dilakukan Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai tingkat wailayah, seperti MEK (Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan) yang berfokus pada pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). [101]

Terdapat juga kegiatan sharing untuk membangun jaringan informasi bisnis dan kerja sama, pembangunan infrastruktur ekonomi yang bernama JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah) dan Kartu Tabungan Muslim yang dinamakan KATAM yang digunakan juga sebagai pengganti kartu anggota sekaligus kartu asuransi kesehatan dan kecelakaan, serta terdapat pula lembaga P3K2M (Pusat Pengembangan Pengusaha Kecil dan Kewirausahaan Muhammadiyah) yang berfungsi untuk mengadakan

[100] Mufidah Asfiati, "Kontribusi Muhammadiyah dan NU di Bidang Ekonomi dalam Pandemi Covid-19", https://idealoka.com/2020/06/27/kontribusi-muhammadiyah-dan-nu-di-bidang-ekonomi-dalam-pandemi-covid-19// Diakses 27 April 2021.
[101] Elok Sundus, "Kontribusi Muhammadiyah di Kancah Ekonomi", https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/29/196411/kontribusi-muhammadiyah-di-kancah-ekonomi/ 27 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelatihan serta pendampingan bagi masyarakat dalam hal pengelolahan kegiatan ataupun pencarian dana.[102]

Diliat dari uraian diatas, organisasi masyarakat yang mendominasi di Sidoarjo berupa ormas yang berbasis Islam seperti halnya Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, NU lebih mendominasi daripada Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan mayoritas warga Sidoarjo adalah seorang Nahdliyin yang menerapakan paham *ahlus sunnah wal jamaah*. Dalam bahasa arab, Nadhatul Ulama artinya bangkit atau bergerak. Nadhatul ulama atau biasa disingkat NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak dalam bidang sosial keagamaan[103] yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai promotor dibalik pembentukan Nadhatul Ulama. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Hindia-Belanda dan berkembang pesat pada tahun 1940-an. Pengurus besar NU dibagi menjadi dua badan yaitu: *Syuriah* (Badan Keulamaan), dan *Tanfidziyah* (Badan Ekskutif) yang dipimpin oleh sebagaian besar beranggotakan para saudagar dan pengusaha kecil.

Pada masa awal, *syuriah* diketuai oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan gelar *Rais Akbar* (Ketua Tertinggi), Ahmad Dahlan (Ahyad), Kyai Abdul Wahab Hasbullah sebagai sekretaris, serta para anggota yang sebagian berasal dari Jawa Timur. Berdirinya Nadhatul Ulama tidak bisa dilepaskan

[102] Ibid,.
[103] Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang satu Abad* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja), yang mana ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selain itu, lahirnya Nadhatul Ulama mempunyai tujuan yakni berpegang teguh pada satu mazhab dari empat mazhab yang ada (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para kiai NU menganut mazhab Syafi'i. Sebagai organisasi keagamaan, Nadhatul Ulama berusaha agar semua sikap dan tingkah laku warganya sejalan dengan agama Islam. Serta basis organisasinya yaitu pesantren, yang pada umumnya sangat menekankan pengajaran fiqih, dan hanya mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i.[104]

Organisasi NU berkembang sangat pesat, yang mana hal ini dapat terlihat dari setiap Muktamar yang diadakan. Mulai dari Muktamar pertama pada tahun 1926, yang dihadiri oleh 96 kiai, Muktamar kedua tahun 1927 dihadiri oleh 146 kiai dan 242 peserta. Selanjutnya pada tahun 1828, dihadiri oleh 260 kiai dan 35 cabang yang telah dibentuk. Pada tahun 1929, NU memiliki 63 cabang dan 1450 peserta dan diperkiran pada tahun 1933 jumlah anggotanya telah mencapai 40.000. Kemudian pada tahun 1935, jumlah anggotanya semkin bertambah mencapai 67.000 orang yang telah tersebar di 76 cabang. Lalu pada tahun 1938, NU memiliki 99 cabang

[104] Masngudin dan Rukmini Dahlan, *Pola Hubungan Antar Golongan Nadhatul Ulama dengan Muhammadiyah (Studi Kasus di Pasuruan),* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jumlah anggotanya 100.000. Serta pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, NU sudah memiliki 120 cabang.[105]

Adanya peningkatan yang cepat berdasarkan data-data diatas, menunjukkan bahwa organisasi NU cukup diminati oleh masyarakat pada umumnya. Adapun para anggota NU mayoritas berdomisili di Jawa Timur dan Madura, sepanjang pantai utara Jawa Tengah, serta di wilayah Cirebon dan Banten, Jawa Barat.

Sejak awal berdirinya pada tahun 1926 di Jawa Timur, NU terus melakukan perluasan hingga ke daerah-daerah, tak terkecuali Sidoarjo. Ada sesuatu hal yang dapat dijadikan rujukan ketika ingin mengetahui sejarah awal masuknya NU di Sidoarjo, yaitu berdirinya Madrasah NU yang berlokasi di Kutuk pada tahun 1929. Hal ini memberikan indikasi bahwa NU sudah ada di Sidoarjo sebelum tahun 1929, karena tidak mungkin jika sebuah madrasah terlebih dahulu berdiri dan kemudian NU.[106]

Pada awalnya, NU cabang Sidoarjo berada di Sepanjang (Taman), karena para pengurus mayoritas berasal dari Sepanjang, oleh karenanya cabang NU bukan lagi bernama cabang Sidoarjo melainkan cabang NU Sepanjang. Lantas 2 tahun kemudian, NU cabang Sepanjang dipindahkan ke Sidoarjo sebagai hasil dari musyawarah di rumah Ibu Hj. Rohmah, Jetis Sidoarjo. Berawal dari sini, NU cabang beralih menjadi NU cabang

---

[105] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: Lkis Group, 2011), 40.
[106] M. Imron Sha, *Sekilas Pengurus Cabang Nadhatul Ulama Sidoarjo dari Masa ke Masa* (Sidoarjo: Pengurus Cabang NU Sidoarjo, 1955), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo. Pada era kolonial Jepang, pihak Jepang mengeluarkan perintah melarang adanya kegiatan organisasi, tidak terkecuali NU. Namun NU cabang Sidoarjo menghiraukan hal tersebut dengan tetap melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi, meski sifatnya hanya konsolidasi.

Akan tetapi hal tersebut rupaya tidak mengenakkan hati bagi para pengurus Cabang, karena itu dikirimlah surat permohonan legalisasi kepada pemerintah Jepang di daerah Sidoarjo agar diizinkan melakukan kegiatan. Tepatnya pada tanggal 2 Mei 2604/1944M surat tersebut mendapat jawaban dari pemerintah Jepang untuk melakukan kegiatan dan dari hal tersebut dijadikan patokan berdirinya NU cabang di Sidoarj, yaitu 2 Mei 1944. Setelah legalnya pengurus NU, NU cabang Sidoarjo menempati sebuah gedung di Jl. KH. Mukmin Sidoarjo.

NU cabang Sidoarjo menjalin kedekatan dengan para pemimpin kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat terjadi karena para pemimpin NU sangat fleksibel sehingga bisa bergaul dengan siapa saja. Dari hasil kedekatan tersebut, NU mendapat wakaf maupun ghibah berupa tanah dan gedung yang berasal dari Bpk. Win Hendarso yang digunakan menjadi gedung perkantoran NU. Kemudian, pada masa bupati Saiful Ilah, NU mendapat ghibah lagi berupa tanah dan gedung yng berada di Perum Puri Airlangga, Sidoarjo.

NU merupakan sebuah organisasi yang cepat berkembang, oleh karena itu semakin banyaknya orang yang bergabung dengan NU, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai organisasi menggunakan sistem kepengurusan secara teritorial yang artinya NU mempunyai susunan pengurus organisasi dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Untuk tingkat pusat dikendalikan oleh PBNU. Kemudian tingkat provinsi dikelola oleh PWNU. Tingkat cabang Nadhatul Ulama yaitu PCNU yang menangani kepengurusan pada tingkat kotamadya atau kabupaten. Di tingkat kecamatan ditangani oleh MWCNU serta ditingkat desa dikendalikan oleh pengurus ranting.

NU sendiri memiliki 18 lembaga yang telah ditetapkan yaitu Lembaga Dakwah NU (LDNU), Lembaga Pendidikan Maarif NU (LP Maarif NU), Lembaga Sosial Mabarrot NU (LSMNU), Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU), Robhitoh Ma'ahidil Islamiyah (RMI), Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU), Hai'ah Ta'miril Masajid Indonesia (HTMI), Lembaga Kajian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), Lembaga Pengembangan Tenagaya Manusia (Lakpesdam), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja (LPTK), Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH).[107]

Sedangkan badan otonom NU yang saat ini berada di lingkungan PCNU Sidoarjo adalah; Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Putra Nadhatul Ulama, Ikatan Putri Nadhatul Ulama, Jamiyah

[107] Mohammad Subhan, dkk, *NU Sidoarjo*, (Sidoarjo: Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nadhatul Ulama Sidoarjo, 2020), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahlit Thariqoh Al-Mu'tabarroh An-Nahdliyah, Jamiyah Qurro' wal Huffadz, Ikatan Seni Hadrah Indonesia. Selain itu, juga terdapat aset-aset yang luar biasa seperti halnya memiliki Rumah Sakit Swasta Terbesar di Sidoarjo yakni RSI Siti Hajar, adanya kampus UNUSIDA, serta terdapat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Rohmatul Ummah An-Nahdliyah yang menangani bimbingan ibadah haji, umroh dan ziarah wali yang sudah diakui dan sesuai dengan standar internasional dan KBIH terbesar di Jawa Timur diantara KBIH yang ada,[108]

Peran Nadhatul Ulama bagi masyarakat Sidoarjo terlihat diberbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang politk yang mana NU merupakan salah satu organisasi terbesar di kabupaten Sidoarjo mempunyai jumlah anggota dan warga yang cukup besar. Sehingga mereka melibatkan diri dalam setiap kegiatan pemerintahan kabupaten Sidoarjo, seperti dalam Pilkada, pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pendampingan sampai pengawasannya. [109].

**4. Aspek Politik**

Kabupaten Sidoarjo ialah salah satu kabupaten penyangga utama kota Surabaya. Selain itu, kabupaten Sidoarjo termasuk pula ke dalam kawasan metropolitan di provinsi Jawa Timur (Kawasan Gerbangkertosusila). Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan dan

[108] Ibid,.
[109] Pengurus Cabang NU Sidoarjo, *Materi Musyawarah Kerja I PCNU Sidoarjo,* Masa Khidmat 2011-2016 (YPM Taman Sidoarjo), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbagi menjadi 322 desa serta 31 kelurahan. Pada tahun 2019, sebanyak 50% kursi legislatif diisi oleh mereka yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan untuk keanggotaannya sendiri didominasi oleh laki-laki 84 persennya yang mana 58 persennya mengenyam pendidikan sampai tingkat S1/S2/S3.[110]

Kontestasi politik yang berada di Kabupaten Sidoarjo bisa diidentifikasi dengan adanya partai-partai politik yang ikut dalam pilkada. Dikarenakan dalam tiap-tiap daerah suatu partai politik tertentu mempunyai basis pemilih mayoritas. Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar aktif dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Dalam sebuah kampanye terdapat kegiatan menawarkan visi, misi dan program atau informasi lainnya dari setiap kandidat yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih[111].

Komisi Pemilihan Umum menetapkan masa kampanye Pilkada serentak 2020 pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Adanya waktu kampanye yang terbilang lama dapat digunakan oleh masing-masing kandidat untuk melakukan beberapa strategi dalam memperoleh suara. Namun, meskipun rentang waktu yang diberikan cukup lama, tentu ada

[110] BPS Kabupaten Sidoarjo. *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2020*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020.
[111] Muchammad Hadiq Abrori, “Srategi Pemenangan”, Ibid, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan-batasan mengenai kampanye yang harus ditaati. Batasan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Kemudian Undang-Undang tersebut diturunkan secara teknis dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 terkait Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati atau Walikota dan Walikota.[112]

Pada pemilihan umum DPRD tahun 2019 di Sidoarjo, partai yang berhasil menguasi perolehan suara dalam Pemilu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan memperoleh suara sebanyak 309.249. Dengan perolehan suara sebanyak itu, PKB berhasil merebut 16 kursi di parlemen. Kemudian, perolehan suara terbanyak kedua di Sidoarjo yaitu PDIP dengan perolehan suara 188.306. Ketiga diduduki oleh Partai Gerindra dengan suara partai sebanyak 157.152 dan posisi selanjutnya diduduki oleh PAN dengan perolehan suara 83.864.[113]

Adapun dalam Pilkada tahun 2020, pasangan nomor urut 02 Ahmad Mudhlor – Subandi yang diusung oleh PKB juga memperoleh kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 39,8% (384.067) mengungguli pasangan calon lainnya yaitu nomor urut 01 Bambang Haryo – Taufiqulbar yang

[112] Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.
[113] Surya, "Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Sidoarjo, PKB Naik 16 Kursi, PDIP 9 Kursi, PAN Turun Jadi 5 Kursi", https://jatim.tribunnews.com/2019/05/04/hasil-rekapitulasi-kpu-kabupaten-sidoarjo-pkb-naik-16-kursi-pdip-9-kursi-pan-turun-jadi-5-kursi?page=2/ Diakses 24 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diusung oleh Gerindra, Golkar, PPP, PKS, Demokrat dengan perolehan suara 38,3% (369.541) dan pasangan nomor urut 03 Kelana Aprilianto – Dwi Astutik yang diusung oleh PDIP, PAN dengan perolehan suara sebanyak 21,8% (210.573).[114] Dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah suara yang diraih oleh PKB dalam pemilihan DPRD 2019 dan Pilkada 2020 membuat partai tersebut mendominasi di Sidoarjo.

## B. Deskripsi Pilkada Kabupaten Sidoarjo

### 1. Gambaran Umum Peta Politik di Kabupaten Sidoarjo

Dalam UU No. 2 tahun 2008, yang dimaksud dengan partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela untuk kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, perkembangan partai politik di kabupaten Sidoarjo mengikuti perkembangan partai politik tingkat nasional. Dari hasil pemilu pada tahun 1999 yang diselenggarakan, khususnya di Jawa timur merupakan pemilu yang paling demokratis karena kontestasi pemilu diikuti lebih dari 48 partai politik. Pada pemilu tersebut PKB mampu menjadi partai pemenang, dengan memperoleh 32 kursi di DPRD Jawa Timur

[114] Miftahul Ulum, "Gus Mudhlor, Bawa PKB Menang Lagi di Pilkada Sidoarjo", https://surabaya.bisnis.com/read/20201216/531/1331697/gus-muhdlor-bawa-pkb-menang-lagi-di-pilkada-sidoarjo?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_1/ Diakses 24 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalahkan partai-partai lain, seperti PDIP, PPP dan Golkar yang sudah berdiri dan ada sejak masa orde baru.[115]

Memperoleh posisi sebagai partai pemenang dalam kontestasi pemilih DPRD Provinsi Jawa Timur 1999, PKB mendapatkan suara untuk memilih kepala daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2003 pemilihan gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan tidak langsung sebab calon gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada pemilihan gubernur tahun 2003 ini, calon yang diusung oleh PKB mengalami kekalahan. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat dari partai PKB sendiri. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan kembali PKB pada kontestasi pemilu legislatif yang diadakan pada tahun 2004.[116]

Dari pemilu pada tahun 2004, PKB berhasil memenangkan kontestasi tersebut dengan memperoleh 31 kursi diikuti oleh PDIP dengan jumlah 24 kursi di posisi kedua, posisi ketiga oleh partai Golkar dengan memperoleh 15 kursi, posisi keempat dari partai Demokrat sebanyak 10 kursi, diikuti oleh PPP sebanyak 8 kursi, PAN 7 kursi dalam pemilu yang diikuti oleh 24 partai politik di tahun 2004.

Selanjutnya, pada tahun 2008 PKB ikut serta mengikuti pemilihan gubernur dengan perubahan mekanisme pemilihan, yang mana di pemilihan

---

[115] Eka Lukita Sari, "Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih di Daerah Pemilihan Jawa Timur II dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Ampel, 2019), 71.
[116] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya dilakukan tertutup (tidak langsung) berubah menjadi pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat. Pemilu yang berlangsung dua putaran ini berhasil menjaring lima calon pasangan gubernur dan wakil gubernur, dengan putaran pertama yaitu Soekarwo-Saifullah Yusuf, Khofifah indar parawansa-Mudjiono, Soenaryo-Ali maskhan musa, Sutjipto-Ridwan hisyam, dan Achmadi-Soehartono.[117]

PKB sendiri mengusung pasangan calon Achmadi-Soehartono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dan hanya memperoleh suara 8,21%. Sedangkan dua pasangan calon lain hampir memperoleh suara 30%, yaitu pasangan dari Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono. Menurut peraturan dari KPU, calon gubernur yang bisa masuk ke putaran kedua hanya mereka yang mampu memperoleh suara diatas ambang batas 30%. Oleh karena itu, pasangan dari Achmadi-Soehartono yang disusung oleh PKB tidak bisa masuk dalam putaran kedua dan mempersilahkan partainya yaitu PKB untuk menyerahkan suaranya pada pihak manapun di putaran kedua.[118]

Pada kontestasi pemilihan di putaran kedua ini diikuti oleh dua calon yaitu Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dan berakhir dengan kemenangan yang diraih dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang hanya terpaut 0,2% suara pada pemilihan tersebut.

[117] Ibid, 73-74.
[118] Ibid, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, pada pemilu legislatif tahun 2009 PKB mengalami penurunan drastis daripada tahun sebelumnya. Hal ini karena PKB fokus untuk memperbaiki internal partai sendiri sehingga berdampak pada penurunan jumlah suara pada pemilu legislatif di tahun 2009. Pada pemilu tahun ini, PKB berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 13 kursi dibawah partai Demokrat yang memperoleh suara 22 kursi sebagai partai pemenang dan PDI-P di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 17 kursi di pemilu legislatif DPRD provinsi Jawa Timur 2009. Berikut daftar perolehan suara di pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2009:[119]

**Tabel 2.3**

**Perolehan Suara Pemilu Legislatif DPRD Jawa Timur tahun 2009**

| No. | Partai Politik | Perolehan Kursi |
|---|---|---|
| **1.** | Demokrat | 22 |
| **2.** | PDI-P | 17 |
| **3.** | PKB | 13 |
| **4.** | Golkar | 11 |
| **5.** | Gerindra | 8 |
| **6.** | PAN | 7 |
| **7.** | PKS | 7 |
| **8.** | PKNU | 5 |
| **9.** | PPP | 4 |
| **10.** | Hanura | 4 |

[119] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| **11.** | PDS | 1 |
| **12.** | PBR | 1 |
| **Jumlah** | | **100** |

Sumber: Eka Lukita Sari, "Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih di Daerah Pemilihan Jawa Timur II dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Ampel, 2019), 75.

Pada pemilu legislatif tahun 2014, PKB kembali lagi mendapatkan tempatnya sebagai partai pemenang dalam kontestasi pemilu legislatif. Hal tersebut disebabkan karena *rebranding* serta sikap yang dilakukan PKB dalam kontestasi pemilihan gubernur 2013 dengan tegas mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawireja. Oleh karena itu, pada pemilu legislatif 2014, PKB berhasil memperoleh 20 kursi dan menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif tahun 2014. Berikut ini adalah hasil dari pemilu legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur 2014:[120]

**Tabel 2.4**

**Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif DPRD Jawa Timur 2014**

| No. | Partai Politik | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| 1. | PKB | 20 |
| 2. | PDI-P | 19 |
| 3. | Gerindra | 13 |
| 4. | Demokrat | 13 |
| 5. | Golkar | 11 |

[120] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 6. | PAN | 7 |
| 7. | PKS | 6 |
| 8. | PPP | 5 |
| 9. | NasDem | 4 |
| 10. | Hanura | 3 |
| **Jumlah** | | **100** |

Sumber: Eka Lukita Sari, "Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih di Daerah Pemilihan Jawa Timur II dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Ampel, 2019), 75.

Pada tahun 2019, diselenggarakannya kembali pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur 2019. Dalam pemilu tersebut, PDI-P menjadi pemenang dengan perolehan 27 kursi dan diurutan kedua yaitu PKB dengan mendapatkan 25 kursi diatas partai Gerindra dan Demokrat yang mendapatkan 15 kursi dan 14 kursi dalam pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur 2019. Berikut ini adalah perolehan suara pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019:[121]

**Tabel 2.5**

**Hasil Perolehan Suara Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019**

| No. | Partai Politik | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| 1. | PDI-P | 27 |
| 2. | PKB | 25 |
| 3. | Gerindra | 15 |
| 4. | Demokrat | 14 |

[121] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Golkar | 13 |
| 6. | NasDem | 9 |
| 7. | PAN | 6 |
| 8. | PPP | 5 |
| 9. | PKS | 4 |
| 10. | PBB | 1 |
| 11. | Hanura | 1 |
| **Jumlah** | | **120** |

Sumber: Eka Lukita Sari, "Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih di Daerah Pemilihan Jawa Timur II dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Ampel, 2019).

Kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Sidoarjo sendiri sampai saat ini sudah melakukan 4 kali proses pilkada secara langsung, yaitu tanggal 25 September 2005, 25 Juli 2010, 9 Desember 2015, dan 9 Desember 2020. Pada pilkada tahun 2005 ini diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Win Hendarso-Saiful Ilah, Sjamsu Bahari- Fatmah Thoha Assegaf, serta Nadhim Amir-Salam. Berikut ini adalah tabel hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2005-2010 di Kabupaten Sidoarjo:[122]

[122] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.6**

**Daftar Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2005-2010 di Kabupaten Sidoarjo**

| CALON BUPATI | WAKIL BUPATI | PARTAI PENGUSUNG | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|---|---|
| Win Hendarso | Saiful Ilah | 1. PKB<br>2. PAN<br>3. PKS | 459.206 (67.85%) |
| Sjamsu Bahri | Fatmah Thoha Assegaf | 1. PDIP<br>2. Golkar | 61.778 (9.12%) |
| Nadhim Amir | Salam | 1. Partai Demokrat<br>2. PPP<br>3. PBB<br>4. PNBK<br>5. PKPI<br>6. PKPB | 155.747 (23.01%) |

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo

Dari Pilkada tersebut, calon yang diusung oleh PKB meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak 459,206 atau 67,85% dan berhasil mengalahkan dua lawan lainnya.

Pada pemilihan legislatif periode 2009-2014 untuk memilih DPRD kabupaten Sidoarjo terjadi perubahan terhdap kursi yang diperebutkan, yang awalnya kursi di DPRD kabupaten hanya 45, namu di periode ini mengalami penambhan menjadi 20 kursi. Sebelumnya, pemilu legislatif diikuti oleh 24 partai politik, namun terjadi peningkatan sehingga pemilu legislatif di periode ini diikuti sebanyak 38 partai politik. Akan tetapi, dari 38 partai politik tersebut, yang lolos ke parlemen hanya sembilan partai politik, diantaranya yaitu Partai Hanura, Gerindra, PKS, PAN, PKB, Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama. Pemenang dari pileg tahun ini adalah Partai Demokrat dengan perolehan 164,384 suara dan mendapatkan 11 kursi.[123] Berikut ini tabel perolehan suara dan kursi DPRD kabupaten Sidoarjo 2009-2014:

**Tabel 2.7**

**Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo 2009-2014**

| No. | Nama Partai | Suara | Kursi |
|---|---|---|---|
| 1. | Hanura | 29,277 | 3 |
| 2. | Partai Karya Peduli Bangsa | 4,459 | - |
| 3. | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 2,757 | - |
| 4. | Partai Peduli Rakyat Nasional | 3,812 | - |
| 5. | Partai Gerakan Indonesia Raya | 34,360 | 2 |
| 6. | Partai Barisan Nasional | 1,513 | - |
| 7. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 8,611 | - |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera | 40,109 | 3 |
| 9. | Partai Amanat Nasional | 99,123 | 8 |
| 10. | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 0 | - |
| 11. | Partai Kedaulatan | 3,020 | - |
| 12. | Partai Persatuan Daerah | 624 | - |
| 13. | Partai Kebangkitan Bangsa | 150,941 | 10 |
| 14. | Partai Pemuda Indonesia | 2,978 | - |

[123] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 1,193 | - |
| 16. | Partai Demokrasi Pembaruan | 4,513 | - |
| 17. | Partai Karya Perjuangan | 636 | - |
| 18. | Partai Matahari Bangsa | 760 | - |
| 19. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 810 | - |
| 20. | Partai Demokrasi Kebangsaan | 1,812 | - |
| 21. | Partai Republika Nusantara | 2,506 | - |
| 22. | Partai Pelopor | 0 | - |
| 23. | Partai Golkar | 40,521 | 4 |
| 24. | Partai Persatuan Pembangunan | 12,250 | - |
| 25. | Partai Damai Sejahtera | 10,585 | - |
| 26. | Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia | 4,416 | - |
| 27. | Partai Bulan Bintang | 5,310 | - |
| 28. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 101,317 | 7 |
| 29. | Partai Bintang Reformasi | 4,698 | - |
| 30. | Partai Patriot | 12,728 | - |
| 31. | Partai Demokrat | 164,384 | 11 |
| 32. | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 1,630 | - |
| 33. | Partai Indonesia Sejahtera | 270 | - |
| 34. | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 31,797 | 2 |
| 35. | Partai Merdeka | 2,854 | - |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. | Partai Persatuan Nadhatul Ulama Indonesia | 4,362 | - |
| 37. | Partai Sarikat Indonesia | 1,138 | - |
| 38. | Partai Buruh | 1,729 | - |
| **Jumlah** | | **793,803** | **50** |

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo

Di pilkada selanjutnya periode 2010-2015 terdapat lima pasangan calon yang akan berkontestasi untuk mendapatkan posisi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sidoarjo. Lima pasangan calon tersebut adalah Yuni Emawati – H. Sarto, Emy Susianti – H.M. Khulaim Junaidi, H. Agung Subaly – Samsul Wahid, H. Saiful Illah – Hadi Sutjipto, Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda. Dalam kontestasi tersebut, pasangan calon yang disusung oleh PKB memperoleh kemenangan dengan mendapatkan suara diatas 50% atau 450,586% suara. Perolehan suara ini sungguh fantasis dan berbeda jauh dengan lawan politiknya yang hanya mendapatkan suara dibawah 20%.[124] Hal tersebut membuat PKB menjadi semakin berjaya di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini daftar perolehan suaranya:

[124] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.8**

**Daftar Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2010-2015 di Kabupaten Sidoarjo**

| CALON BUPATI | WAKIL BUPATI | PARTAI PENGUSUNG | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|---|---|
| Yuniawati | H Sarto | 1. Partai Demokrat | 54.593 (7,32%) |
| Emy Susanti | Muh. Khulaim Junaidi | 1. PAN<br>2. Partai Gerindra | 82.918 (11,12%) |
| Agung Subaly | Samsul Wahid | Perseorangan | 62.828 dukungan<br>24.247 (3,25%) |
| Saiful Ilah | Hadi Sutjipto | 1. PKB<br>2. PKS<br>3. PDS<br>4. PPP | 450.586 (60,45%) |
| Bambang Prasetyo Widodo | Khoirul Huda | 1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama<br>2. Hanura<br>3. Golkar<br>4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 132.977 (17,84%) |

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo

Pemilihan legislatif pada periode 2014-2019 untuk memilih DPRD kabupaten Sidoarjo diikuti oleh 12 partai politik yang sebelumnya pemilu legislatif diikuti oleh 24 partai politik di periode 2009-2014.[125] Dalam pileg

[125] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode ini, PKB lolos menjadi partai pemenang. Berikut ini daftar perolehan suara dan kursi di DPRD kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019:

**Tabel 2.9**

**Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo 2014-2019**

| No. | Nama Partai | Suara | Kursi |
|---|---|---|---|
| 1. | Nasdem | 38,036 | 1 |
| 2. | PKB | 263,630 | 13 |
| 3. | PKS | 60,539 | 3 |
| 4. | PDI Perjuangan | 151,863 | 8 |
| 5. | Golkar | 68,117 | 5 |
| 6. | Gerindra | 137,495 | 7 |
| 7. | Demokrat | 72,345 | 4 |
| 8. | PAN | 119,338 | 7 |
| 9. | PPP | 16,993 | 1 |
| 10. | Hanura | 26,993 | - |
| 11. | PBB | 14,795 | 1 |
| 12. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 6,455 | - |
| Jumlah | | 975,814 | 50 |

Sumber: KPUD kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2015 untuk ketiga kalinya pilkada dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pilkada tahun ini, ada empat pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan total pemilih 1.367.945 pemilih dan jumlah suara sah yaitu 720.064 suara. Keempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Sidoarjo, yaitu: Hadi Sutjipto & Abdul Kolik, Saiful Ilah & Nur Ahmad Syaifuddin, Utsman Ikhsan & Ida Astuti , Warih Andono & Imam Sugiri.[126] Berikut ini adalah tabel perolehan suara:

**Tabel 2.10**

**Daftar Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2015-2020 di Kabupaten Sidoarjo**

| CALON BUPATI | WAKIL BUPATI | PARTAI PENGUSUNG | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|---|---|
| Hadi Sutjipto | Abdul Kolik | 1. PDI Perjuangan<br>2. Partai Demokrat<br>3. Partai NasDem<br>4. PBB | 192.414 (26,71%) |
| Saiful Ilah | Nur Ahmad Syaifuddin | 1. PKB | 64.375 (8,94%) |
| Utsman Ikhsan | Ida Astuti | 1. Gerindra<br>2. PKS | 424.611 (58,96%) |
| Warih Andono | Imam Sugiri | 1. Partai Golkar<br>2. PAN | 38.664 (5,36%) |

Sumber: KPUD Kabupaten Sidoarjo

Sama halnya dengan pemilihan legislatif periode 2014-2019, pada periode 2019-2024 juga diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik. Dari perolehan suara tersebut, PKB muncul menjadi partai pemenaang dalam

[126] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pileg periode ini. Berikut ini adalah daftar perolehan suara dan kursi DPRD kabupaten Sidoarjo periode 2019-2024:

**Tabel 2.11**

**Perolehan Suara dan Kursi DPRD kabupaten Sidoarjo 2019-2024**

| No. | Nama Partai | Suara | Kursi |
|---|---|---|---|
| 1. | PKB | 308,770 | 16 |
| 2. | Gerindra | 157,152 | 7 |
| 3. | PDI Perjuangan | 188,306 | 9 |
| 4. | Golkar | 73,026 | 4 |
| 5. | NasDem | 39,988 | 2 |
| 6. | Garuda | 5,824 | - |
| 7. | Partai Berkarya | 11,103 | - |
| 8. | PKS | 74,204 | 4 |
| 9. | Perindo | 22,087 | - |
| 10. | PPP | 24,525 | 1 |
| 11. | PSI | 21,783 | - |
| 12. | PAN | 83,864 | 5 |
| 13. | Hanura | 22,674 | - |
| 14. | Partai Demokrat | 55,107 | 2 |
| 15. | PBB | 6,989 | - |
| 16. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1,021 | - |
| **Jumlah** | | **1,096,423** | **50** |

Sumber: KPU Kabupaten Sidoarjo

Dari paparan data diatas, partai politik yang sering memperoleh kemenangan di Sidoarjo adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana hal ini dibuktikan pada pemilu 1999, PKB menjadi pemenangnya dengan memperoleh 32 kursi di DPRD Jawa Timur mengalahkan partai lain, seperti PDI-P, PPP, dan Golkar yang sudah berdiri dan ada sejak masa orde baru. Akan tetapi pada tahun 2003 di saat pemilihan gubernur, calon yang diusung oleh PKB mengalami kekalahan. Namun hal tersebut tidak melumpuhkan semangat dari partai politik tersebut, dengan dibuktikan keikutsertaannya pada pemilu tahun 2004 dan berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 31 kursi mengalahkan partai-partai lain, seperti PDI-P, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN. Selanjutnya pada tahun 2008 pada saat pemilihan gubernur, calon yang diusung oleh PKB memperoleh kemenangan yaitu Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Namun pada pemilu legislatif 2009 PKB mengalami penurunan drastis daripada tahun sebelumnya karena fokus partai politik tersebut digunakan untuk memperbaiki internal dari partai sehingga berdampak pada penurunan jumlah suara pada pemilu legislatif tahun 2009. Tetapi kekalahan tersebut terbalas dengan diraihnya kemenangan pada pemilu legislatif tahun 2014, yang mana PKB berhasil memperoleh 20 kursi dan menjadi partai pemenang dalam pemilu legislatif tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2019 saat diselenggarakannya pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur, PKB kembali lagi mengalami kekalahan karena pemenangnya yaitu dari partai PDI-Perjuangan dengan perolehan 27 kursi dan PKB 25 kursi.

Pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung hingga saat ini, pasangan calon yang diusung oleh PKB sering memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemenangan. Hal ini dibuktikan dengan pilkada periode 2005 yang dimenangkan Win Hendarso dan Saiful Illah dengan perolehan suara 459,206 (67.85%) dan berhasil mengalahkan dua lawan lainnya. Namun pada periode 2009-2014 saat diselenggarakannya pemilihan legislatif untuk memilih DPRD kabupaten Sidoarjo, PKB mengalami kekalahan. Tetapi, kekalahan tersebut terbalaskan dengan diraihnya kemenangan pada pasangan calon yang diusung oleh PKB di periode 2010-2015 dan diikuti dengan kemenangan pada periode 2014-2019 untuk memilih DPRD kabupaten Sidoarjo, yang mana PKB lolos menjadi partai pemenang. Selanjutnya pemilihan legislatif periode 2019-2024 PKB kembali muncul menjadi partai pemenang.

Serta pilkada periode 2021-2026 pasangan calon yang diusung oleh PKB memperoleh kemenangan. Dari penjelasan diatas, PKB merupakan partai yang memang mempunyai daya saing dan integritas yang menyebabkan para pemilihnya tidak ragu untuk memilih PKB sebagai partai politiknya. Sehingga hal tersebut menjadikan PKB berkuasa di Sidoarjo dan didukung juga oleh warganya yang Nahdliyin (NU). Selain itu, pasangan nomor 2 dalam kontestasi Pilkada ini juga terus menggelar konsolidasi untuk menggerakkan mesin PKB dan NU beserta banomnya, tim sukses sekaligus relawan dan simpatisannya untuk mendapatkan kemenangan agar Sidoarjo tetap berwarna hijau dan NU tetap eksis.[127]

[127]Redaksi, "Anggap Pilkada Sidoarjo Pertarungan Ideologi, Mesin PKB dan NU Solid Bergerak Menangkan Gus Muhdlor-Subandi", https://republikjatim.com/baca/anggap-pilkada-sidoarjo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Pengertian dan Tujuan Pilkada**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemilu, Pemilihan Umum tidak hanya dibatasi tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten atau Kota, pemilihan presiden dan wakil presiden saja. Namun lebih dari itu juga mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Pengertian pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaran pemilu pada pasal 1 ayat 1 ialah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia tahun 1945.

Sedangkan pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[128] Sedangkan pengrtian pilkada menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut; Suryo untoro mengartikan pilkada sebagai suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya di MPR, DPR, dan DPRD. Ali Moertopo mengartikan pilkada merupakan suatu lembaga demokrasi yang digunakan

pertarungan-ideologi-mesin-pkb-dan-nu-solid-bergerak-menangkan-gus-muhdlor-subandi/ Diakses 8 Maret 2021.

[128] Abrori," Srategi Pemenangan", Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti halnya anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang akan bertugas bersama dengan pemerintahan serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.[129]

Asshiddiqie, pemilihan kepala daerah langsung ialah mekanisme demokrasi dalam rangkan rekuitmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak serta kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam kontestasi tersebut dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, manakala pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri, maka negara tersebut tidak akan dianggap benar-benar demokrastis. Jadi, dalam hal ini pemilihan menjadi tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokrasi atau tidak.[130]

Kemudian, menurut Suharizal terkait pemilihan kepala daerah yaitu perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Sedangkan Prihatmoko mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekuitmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu kontestasi permainan dengan aturan

[129] Simkada, "Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/ Diakses 02 Maret 2021.
[130] Sahrudin Tukuboya, dkk., "Strategi Partai Demokrat Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016 di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manadao", *Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan,* Vol. 2, No. 2 (2018), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

main yang sama. Maka, berdasarkan definisi dari pemilihan kepala daerah oleh beberapa para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa pilkada merupakan proses pemilih yang dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksankan urusan daerahnya. Oleh karena ituhak dan kebebasan yang dimilki harus dimanfaatkan dengan baik supaya dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.[131]

Adanya pemilihan umum merupakan wujud dari kebebasan dan rasionalitas individu untuk memilih sebuah pemimpin. Hal tersebut diwujudkan dengan terselenggarakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung yang memiliki tujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Pilkada merupakan wujud dari pembentukan demokratisasi di daerah. Setiap pasangan calon dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu Pilkada juga suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Robert Dahl,[132] bahwa sebuah demokrasi yang terjadi pada tingkat lokal akan mendorong masyarakat di sekitar wilayah tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik. Menurut Ahmad Nadir, dengan adanya

---

[131]Ibid,.

[132] Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan kepala daerah secara langsug, aspirasi politik masyarakat di tingkat paling bawah dapat tersalurkan.[133] Akan tetapi, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana agar masyarakat di setiap daerah dalam memilih bupati dan wakil bupati mempertimbangkan aspek visi dan misi dibandingan kedekatan emosional atau pertimbangan pragmatis lainnya.

Selanjutnya tujuan Pilkada menurut Rozali yaitu: mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD, serta mencegah politik uang. Sedangkan secara ideal, tujuan dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi republik, mempercepat terjadinya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hedenis dalam Wirdasari mengatakan bahwa pemilih, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki makna. Maksud dari istilah "bermakna" merujuk pada tiga kriteria, yaitu: 1) keterbukaan, 2) ketepatan, 3) keefektifan pemilu. Dari kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara[134].

Pusat penelitian Keahlihan DPR RI 2017 juga menyebutkan perlunya penyelenggaraan pilkada langsung di negara ini, diantaranya; 1)

---

[133] Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi,* (t.t: Averroes Press, 2005), 125.
[134] Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan dan wakil kepala daeraah yang dipilih oleh DPRD. 2) Diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat. 3) mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara *bottom-up* dan sebaliknya serta meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang di *drop* dari atas atau bersifat *top-down*. 4) Dapat meminimalkan politik uang yang pada umumnya terjadi ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD.[135]

**3. Tahapan Pilkada**

Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo 2020, sebagai berikut:[136]

1. Tahapan persiapan meliputi:
    1. Perencanaan program dan anggaran yang berupa; penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan pengelolahan program serta anggaran.
    2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan.

[135] Totok Wijayanto, "Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia", https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia/ Diakses 04 Maret 2021.
[136] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%205%20THN%202020/ Diakses 02 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan termasuk; sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan atau bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS.
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS termasuk; masa kerja PPK, PPS, dan KPPS serta pembentukan dan masa kerja PPDP.
5. Pembentukan panitia pengawas kabupaten Sidoarjo, panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas TPS termasuk; pendaftaran pelaksanann survei atau pajak pendapat, dan pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

2. Tahapan penyelenggaraan meliputi;
    1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon termasuk dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
    2. Pendaftaran pasangan calon.
    3. Penelitian persyaratan calon.
    4. Penetapan pasangan calon termasuk dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara pemilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pelaksanaan kampanye termasuk; masa kampanye, laporan dan udit dana kampanye.
6. Pelaksanaan pemungutan suara termasuk dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
8. Penetapan calon terpilih termasuk tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perelisihan hasil pemilihan.
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan termasuk dilakukan tahapan penetapan pasagan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih termasuk dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Berikut ini adalah jadwal atau timeline tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Sidoarjo:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.12**

**Tahap Persiapan**

| Tanggal | Tahapan |
|---|---|
| 30 September 2019 | Perencanaan Program dan Anggaran |
| 1 Oktober 2019 | Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) |
| Setelah penandatanganan NPHD hingga 3 bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan | Pengelolaan Program dan Anggaran |
| 1 November 2019 - 8 Desember 2020 | Sosialisasi kepada Masyarakat |
| 1 November 2019 - 8 Desember 2020 | Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS |
| 15 Januari 2020 - 23 November 2020 | Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS |
| 1 November 2019 - 8 November 2020 | Pendaftaran Pemantauan Pemilihan |
| 23 Januari 2020 - 23 Maret 2020 | Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) |
| 23 Maret 2020 - 6 Desember 2020 | Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih |

**Tabel 2.13**

**Tahap Penyelenggaraan**

| Tanggal | Tahapan |
|---|---|
| 26 Oktober 2019 - 23 Agustus 2020 | Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan |
| 4 September 2020 – 6 September 2020 | Pendaftaran Pasangan Calon |
| 26 September 2020 - 5 Desember 2020 | Masa Kampanye |
| 25 September 2020 – 25 Desember 2020 | Laporan Audit dan Dana Kampanye |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| 7 Agustus 2020 – 20 November 2020 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara |
| 9 Desember 2020 | Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS |
| 9 Desember 2020 - 26 Desember 2020 | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara |

**4. Penyelenggara Pilkada**

a. Komisi Pemiliahn Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 terkait Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu sebuah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.[137] KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Sidoarjo terdapat Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten/Kota. Penyelenggara pemilu beredoman pada asas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

[137] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, https://www.kpu.go.id/ Diakses 6 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.[138]

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Sedangkan misinya berupa; *pertama*, meningkatkan kompetensi SDM sebagai usaha untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional. *Kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan serta umumnya untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo. *Ketiga*, meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. *Keempat*, mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta askesabel.[139]

KPUD Sidoarjo adalah komisi pemilihan umum daerah di Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Raya Cemengkalang, Sidoarjo. Berikut ini adalah divisi KPUD Sidoarjo yang terdiri dari lima orang:

[138] Ibid,.
[139] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, https://kpud-sidoarjokab.go.id/ Diakses 6 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.14**

**Divisi KPUD Sidoarjo**

| NO. | DEVISI | JABATAN DALAM DEVISI<br>KETUA | FUNGSI |
|---|---|---|---|
| 1. | Devisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga | Mukhamad Iskak, SE. | Kebijakan dalam:<br>1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggan dan kearsipan,<br>2. Protokol dan persidangan,<br>3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara,<br>4. Pelaksanaan, pertanggungjawabandan pelaporan keuangan,<br>5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji,<br>6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu. |
| 2. | Devisi sosialisasi, pendidikan pemilihan, partisipasi masyarakat dan SDM. | Fauzan Adim, S.sos | Kebijakan dalam:<br>1. Sosialisasi kepemilihan,<br>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih,<br>3. Publikasi dan kehumasan,<br>4. Kampanye pemilu dan pemilihan,<br>5. Pengelolaan informasi dan komunikasi,<br>6. Kerjasama antar lembaga,<br>7. PAW anggota KPU kabupaten,<br>8. Rekutmen badan adhoc,<br>9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM,<br>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi,<br>11. Diklat dan pengembangan SDM,<br>12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan,<br>13. Pengelolaan dan pembinaan SDM. |
| 3. | Devisi teknis penyelenggaraan | Miftakul Rohmah, M.Pd.I | Kebijakan dalam:<br>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi,<br>2. Verifikasi partai politik dan DPD,<br>3. Pencalonan peserta pemilu,<br>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara, |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan,<br>6. Pelaporan dana kampanye,<br>7. PAW anggota DPRD. |
| 4. | Devisi perencanaan, data dan informasi. | Musonif Afandi, S.Sos., M.Sosio, | Kebijakan dalam:<br>1. Penyusunan program dan anggaran,<br>2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan,<br>3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran,<br>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih,<br>5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu,<br>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT,<br>7. Pengelolaan informasi,<br>8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional,<br>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID). |
| 5. | Devisi hukum dan pengawasan. | Ana Aziza, S.Ag, M.E | Kebijakan dalam:<br>1. Pembuatan rancangan keputusan,<br>2. Telaah dan advokasi hukum,<br>3. Dokumentasi dan publikasi hukum,<br>4. Pengawasan dan pengendalian internal,<br>5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu,<br>6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik. |

Sumber: KPU Kab. Sidoarjo

b. Badan Pengawasan Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik. Visinya berupa; terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkualitas. Sedangkan misinya berupa; *pertama*, membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.

*Kedua*, mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. *Ketiga*, memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. *Keempat*, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. *Kelima*, meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindasan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan. *Keenam*, membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun dari luar negeri.[140]

BAWASLU Sidoarjo adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan, Sidoarjo. Anggotanya terdiri dari 5 orang meliputi; ketua merangkap serta 4 orang anggota lainnya. Berikut ini adalah divisi KPUD Sidoarjo yang terdiri dari lima orang:

[140] Bawaslu Sidoarjo, "Sejarah BAWASLU", https://sidoarjo.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu/ Diakses 03 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.15**

**Devisi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo**

| NO. | DEVISI | JABATAN DALAM DEVISI | FUNGSI |
|---|---|---|---|
| | | KETUA | |
| 1. | Devisi sumber daya manusia dan organisasi | Haidar Munjib | 1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan pemilihan.<br>2. Pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu.<br>3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu dan pengawas pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan.<br>4. Pelaksanaan pembinaan pengawas pemilu dan pengawas pemilihan.<br>5. Tata laksana dan kesekretariatan.<br>6. Pengolahan basis data pengawas pemilu dan pengawas pemilihan serta kesektariatan.<br>7. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan atau organisasi pengawas pemilu dan pengawas pemilihan.<br>8. Pemantauan dan evaluasi, dan<br>9. Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. |
| 2. | Devisi penanganan pelanggaran. | Agung Nugraha, S.H | 1. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.<br>2. Penanganan tindak pidana pemilu dan tindak pidana pemilihan.<br>3. Pengadministrasian dan fasilitas Gakkumdu. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 4. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan.<br>5. Penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu serta duagaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.<br>6. Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan.<br>7. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan.<br>8. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan.<br>9. Pemantauan dan evaluasi dan,<br>10. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran. |
| 3. | Devisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. | Drs. Mohammad Rasul | 1. Penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan.<br>2. Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan.<br>3. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan.<br>4. Akreditasi pemantau Pemilu.<br>5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga.<br>6. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 7. Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan.<br>8. Penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan.<br>9. Pengawasan partisipatif Pemilu dan pengawasan partisipatif Pemilihan.<br>10. Kerja sama dan hubungan antarlembaga.<br>11. Pemantauan dan evaluasi, dan<br>12. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga. |
| 4. | Devisi penyelesaian sengketa. | Jamil, S.H., M.H | 1. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan.<br>2. Pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan.<br>3. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan.<br>4. Pemantauan dan evaluasi; dan<br>5. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa. |
| 5. | Devisi hukum, humas dan data informasi. | Feri Kuswanto, S.H,. M.Pd.I | 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan.<br>2. Advokasi dan pendampingan hukum.<br>3. Penyiapan analisis dan kajian hukum.<br>4. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum.<br>5. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan.<br>6. Hubungan masyarakat.<br>7. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.<br>8. Koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap:<br>1. basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan<br>2. basis data Bawaslu. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 9. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi.<br>10. Pemantauan dan evaluasi dan<br>11. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi. |

Sumber: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Selaku badan pengawasan pemilihan umum dalam Pilkada Sidoarjo 2020, dalam pengawasannya BAWASLU menemukan beberapa laporan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Berikut ini adalah tabel pelanggaran Pilkada Sidoarjo 2020:

**Tabel 2.16**

**Pelanggaran Pilkada Sidoarjo 2020**

| NO. | TANGGAL TEMUAN/LAPORAN | NAMA & JABATAN TERLAPOR | URAIAN SINGKAT KEJADIAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Januari 2020 | Bahrul Amig, S.Sos., MM. (ASN/ Kepala Dishub kabupaten) | Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 bulan Januari Tahun 2020, jam 14.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB bertempat di Kantor DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan Deklarasi Koalisi Partai antara PDIP dan PPP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020. |
| 2 | **2 November 2020** | Zainul Hayat, S. Ag | Bahwa, pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (Tokoh Masyarakat/ Ketua MWCNU Kecamatan Tanggulangin) | Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 pada Hari Jumat, 23 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Masjid Darussalam, Dusun Wates, Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin dalam kegiatan Lailatul Ijtima' terjadi peristiwa berupa dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 yang dilakukan oleh Ketua MWCNU Kecamatan Tanggulangin atas nama Zainul Hayat, S. Ag. |
| 3 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Balongbendo telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Balongbendo terdapat APK di Kecamatan Balongbendo yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 4 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Candi telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Candi terdapat APK di Kecamatan Candi yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 5 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Candi telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Candi terdapat APK di Kecamatan Candi yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 6 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Gedangan telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Gedangan terdapat APK di Kecamatan Gedangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 7 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Jabon telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Jabon terdapat APK di Kecamatan Jabon Gedangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 8 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Krembung telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Krembung terdapat APK di Kecamatan Krembung yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 9 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Krian telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Krian terdapat APK di Kecamatan Krian yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 10 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Porong telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Porong terdapat APK di Kecamatan Porong yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 11 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Prambon telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Prambon terdapat APK di Kecamatan Prambon yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 12 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Sedati telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Sedati terdapat APK di Kecamatan Sedati yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 13 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Sidoarjo telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Sidoarjo terdapat APK di Kecamatan Sidoarjo yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 14 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Sukodono telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Sukodono terdapat APK di Kecamatan Sukodono yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 15 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Taman telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Taman terdapat APK di Kecamatan Taman yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 16 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Tanggulangin telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Tanggulangin terdapat APK di Kecamatan Tanggulangin yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 17 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Tarik telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Tarik terdapat APK di Kecamatan Tarik yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 18 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Tulangan telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Tulangan terdapat APK di Kecamatan Tulangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 19 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Waru telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Waru terdapat APK di Kecamatan Waru yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 20 | 30 Oktober 2020 | Ketua Tim Kampanye | Bahwa, Hari Jumat, 30 Oktober 2020, Pukul 09.00 s.d selesai Jajaran Panwas Kecamatan Wonoayu telah melaksanakan inventarisir APK Paslon 01, 02, dan 03. Dari hasil pengawasan Jajaran Panwas Kecamatan Wonoayu terdapat APK di Kecamatan WonoayuJabon Gedangan yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan dan cara pasang yang melanggar PKPU 4 Tahun 2017 dan Perbub 81 Tahun 2017. |
| 21 | **28 November 2020** | M. Zainal Abidin (ASN/ Kepala Desa Durung Banjar) | Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada saat itu, di rumah Hj. Gesti Dsn Agal Agil Desa Durung Banjar Kec. Candi Kab. Sidoarjo M. Zainal Abidin selaku Kepala Desa Durung Banjar Kec. Candi. Mengahadiri kegiatan Pembacaan Nariyah dan memberikan sambutan, dalam menyampaikan sambutan sdr. M. Zainal Abidin mengajak peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Desember 2020. |
| 22 | 24 November 2020 | Abdul Mutholib (PANWAS Kecamatan/ Koordinator Divisi SDM | Bahwa, hari Minggu, 22 November 2020 terdapat Anggota Panwaslu Kecamatan Sukodono atas Nama Abdul Mutholib bersama Paslon Nomor |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Panwaslu Kecamatan Sukodono) | Urut 2 atas nama Ahmad Muhdlor Ali mendatangi warga klopo sepuluh sebagai korban puting beliung |

Sumber: BAWASLU Kab. Sidoarjo

**5. Peserta Pilkada**

Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 terdapat tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, diantaranya:[141]

**a. Pasangan Nomor Urut 1**

Pada nomo urut 1 terdapat pasangan Bambang Haryo S, IR. dan H. Moh. Taufiqulbar, M.Si. dengan slogannya yaitu SIDOARJO BERSATU UNTUK SIDOARJO LEBIH BAIK. Pasangan ini diusung oleh Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), partai GOLKAR (Golongan Karya), PKS (Partai Keadilan Sosial), DEMOKRAT, PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

**Tabel 2.17**

**Profil Calon Bupati**

| | |
|---|---|
| Nama | Ir Bambang Haryo S |
| Tempat & Tanggal Lahir | Balikpapan, 16 Januari 1963 |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Pekerjaan | Swasta/Lain-lain |
| Alamat | Jl. Dharmahusada Indah Selatan Iii Rt. 03 Rw. |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

[141] https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/pendaftaran/ Dikases 21 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.18**

**Profil Calon Wakil Bupati**

| | |
|---|---|
| Nama | H Moh Taufiqulbar, M.Si |
| Tempat & Tanggal Lahir | Sidoarjo, 30 Agustus 1972 |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Pekerjaan | Swasta/Lain-lain |
| Alamat | Banjarkemuning Rt. 7 Rw. 4 Sedati |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Visi dan misi yang diusung oleh pasangan ini adalah:

Visi: Sidoarjo membangun menuju kabupaten beriman, maju, bersih, makmur dan sejahtera berbasis lingkungan hidup dan kearifan lokal pada tahun 2025.

Misi:

1. Beriman: meningkatkan penerapan nilai keagamaan, toleransi kerukunan, dan lingkungan hidup serta nilai kearifan lokal di setiap aspek kehidupan.
2. Maju: mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia utuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.
3. Bersih: mewujudkan pemerintahan yang bermoral, adil, demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan publik baik langsung maupun tidak langsung melalui keterwakilan.

4. Makmur: meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada pariwisata, UMKM, pertanian, peternakan, perikanan dan kemaritiman.
5. Sejahtera: meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

**b. Pasangan Nomor Urut 2**

Pada nomo urut 2 terdapat pasangan Ahmad Muhdlor dan Subandi, SH dengan slogannya yaitu SIDOARJO MAS (MAJU AMAN SEJAHTERA). Pasangan ini diusung oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

**Tabel 2.19**

**Profil Calon Bupati**

| | |
|---|---|
| Nama | H. Ahmad Muhdlor |
| Tempat & Tanggal Lahir | Sidoarjo, 11 Febuari 1991 |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Pekerjaan | Swasta/Lain-lain |
| Alamat | Kenongo, Rt 10 Rw 04 Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.20**

**Profil Calon Wakil Bupati**

| | |
|---|---|
| Nama | H. Subandi, SH |
| Tempat & Tanggal Lahir | Sidoarjo, 23 Oktober 1972 |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Pekerjaan | Anggota DPRD Kabupaten/Kota |
| Alamat | Jl. Abdurrahman Rt. 2 Rw. 1 Alastipis, Pabean, Sedati |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Visi dan misi yang diusung oleh pasangan ini adalah:

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan.

Misi:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

**c. Pasangan Nomor Urut 3**

Pada nomo urut 3 terdapat pasangan H. Kelana Aprilianto, SE. dan Dr. Dwi Astutik, S.Ag., M.Si. dengan slogannya yaitu SIDOARJO MAKMUR. Pasangan ini diusung oleh PDI PERJANGAN, PAN (Partai Amanat Nasional).

**Tabel 2.21**

**Profil Calon Bupati**

| | |
|---|---|
| Nama | H. Kelana Aprilianto, SE |
| Tempat & Tanggal Lahir | Malang, 21 April 1971 |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Pekerjaan | Swasta/Lain-lain |
| Alamat | Pakuwon Indah Cluster Lisbon |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.22**

**Profil Calon Wakil Bupati**

| | |
|---|---|
| Nama | Dr. Dwi Astutik, SAg., Msi. |
| Tempat & Tanggal Lahir | Surabaya, 19 Maret 1970 |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Pekerjaan | Swasta/Lain-lain |
| Alamat | Jl. Raya Menganti Babatan V/14 Rt. 2 Rw. 1 Babatan |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Visi dan misi yang diusung oleh pasangan ini adalah:

Visi: Terwujudnya Sidoarjo sebagai kabupaten yang sejahtera maju dan bermartabat.

Misi:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Sidoarjo.
3. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Sidoarjo.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan masyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Selain itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masing-masing dari kandidat memiliki partai pengusung yang sebagai bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan syarat pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, dan berikut ini adalah tabel presentase dukungan kursi dari partai politik pengusung masing-masing kandidat:

**Tabel 2.23**

**Perolehan Partai Pengusung Kandidat di Pilkada 2020**

| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Partai Politik Pengusung | Jumlah Kursi DPRD |
|---|---|---|---|
| Bambang Haryo Soekarno | M. Taufiqulbar | 1. Gerindra<br>2. Golkar<br>3. PKS<br>4. Demokrat<br>5. PPP | 18 kursi |
| Kelana Aprilianto | Dwi Astutik | 1. PDI Perjuangan<br>2. PAN | 14 kursi |
| Ahmad Muhdlor | Subandi | 1. PKB<br>Pendukung:<br>2. NasDem | 16 kursi |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum[142]

**6. Pemilih Pilkada**

Pemilih dalam pilkada adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Proses penetapan pemilih dalam Pilkada Sidoarjo sebelumnya didahului dengan beberapa tahap, yang di mulai dari coklit kemudian penetapan DPS (Daftar

[142] Komisi Pemilihan Umum, https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/pendaftaran/detail/0463060107/ Diakses 04 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilih Sementara) dan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan). Proses rekapnya sendiri dimulai pada 30 September 2020 di tingkat desa kemudian pada 9 Oktober 2020 dilakukan rekap pada tingkat kecamatan. Dalam proses pemutakhiran data tersebut, KPU juga bekerjasama dengan masyarakat, Bawaslu, dan seluruh komponen masyarakat, termasuk partai politik di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini KPU berusaha untuk mengakomodir secara keseluruhan masukan dari setiap komponen yang terlibat. Sehingga dari 18 kecamatan, 349 Kelurahan/Desa, serta 3.531 TPS dengan jumlah pemilih laki-laki 696.233 dan jumlah pemilih perempuan 716.823 sehingga total keseluruhan pemilih di Kabupaten Sidoarjo adalah 1.413.056.[143]

**7. Hasil Pilkada**

Pilkada tahun ini diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dari 3.531 TPS di Kabupaten Sidoarjo. Ketiga pasangan calon tersebut yaitu; Ir Bambang Haryo S & H Moh Taufiqulbar, M.Si memperoleh 38.4% suara. Pasangan calon (paslon) 2 yaitu H. Ahmad Muhdlor – H. Subandi, SH memperoleh 39.8% suara dan pasangan calon (paslon) 3 yakni H. Kelana Aprilianto, SE – Dr. Dwi Astutik, SAg., Msi memperoleh 21.9% suara. Berikut ini adalah tabel hasil perolehan suara Pilkada Sidoarjo 2020:[144]

[143] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, https://kpud-sidoarjokab.go.id/ Diakses 5 Febuari 2021.
[144] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.24**

**Hasil Perolehan Suara Pilkada Sidoarjo 2020**

| Wilayah | (01) | (02) | (03) |
|---|---|---|---|
| Tarik | 20.409 | 7.850 | 10.789 |
| Prambon | 14.422 | 18.059 | 11.789 |
| Krembung | 14.118 | 18.025 | 8.905 |
| Porong | 12.708 | 14.627 | 8.809 |
| Jabon | 13.085 | 12.243 | 5.720 |
| Tanggulangin | 17.873 | 15.280 | 13.643 |
| Candi | 29.845 | 31.612 | 13.356 |
| Sidoarjo | 35.724 | 29.583 | 19.840 |
| Tulangan | 16.367 | 28.600 | 10.589 |
| Wonoayu | 20.029 | 16.277 | 9.504 |
| Krian | 19.933 | 26.130 | 15.368 |
| Balongbendo | 20.065 | 12.452 | 8.438 |
| Taman | 35.109 | 36.630 | 19.277 |
| Sukodono | 22.949 | 23.757 | 11.278 |
| Buduran | 17.456 | 19.079 | 7.036 |
| Gedangan | 21.690 | 21.403 | 11.171 |
| Sedati | 11.866 | 26.257 | 6.131 |
| Waru | 30.025 | 29.695 | 21.695 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 2.25**

**Hasil Perolehan Suara Partai Pengusung**

| CALON BUPATI | WAKIL BUPATI | PARTAI PENGUSUNG | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|---|---|
| Bambang Haryo | Moh Taufiqulbar | 1. Gerindra<br>2. Golkar<br>3. PKS<br>4. Demokrat<br>5. PPP | 373.673 (38.4%) |
| Ahmad Muhdlor | H. Subandi | 1. PKB | 387.688 (39.8%) |
| Kelana Aprilianto | Dwi Astutik | 1. PDI Perjuangan<br>2. PAN | 212.977 (21.9%) |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Dilihat dari hasil presentase tersebut, pasangan calon (paslon 2) H. Ahmad Muhdlor – H. Subandi, SH memperoleh kemenangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021-2025.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENYAJIAN DATA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang makna agama bagi para pelaku politik, mulai dari penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat (pemilih) dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020. Agama memainkan peran penting untuk mengatur alur kehidupan serta sebagai pendorong agar kehidupan manusia tidak mengalami kekacauan dan berjalan sesuai dengan porosnya. Oleh karena itu agama menjadi sebuah kekuatan untuk melawan rasa putus asa, ketakutan serta sebagai perekat hubungan antar manusia.

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwahyukan dalam perilaku sosial tertentu di masyarakat, yang mana setiap perilaku yang dilakukan selalu berhubungan dengan sistem keyakinan dari ajaran agamanya. Perilaku dan nilai-nilai sosial itu digerakkan oleh kekuatan dalam diri yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi. Hal semacam ini kadangkala membawa subjektifitas dalam beragama.[145]

Seperti yang telah disinggung di bab sebelumnya mengenai tindakan sosial, Weber menyinggung tentang konsep makna. Makna merupakan sesuatu hal yang melekat pada tindakan itu sendiri serta menjadi properti tindakan dari pada sekadar sebagai penyebab atau tujuan. Oleh karena itu seseorang dapat memahami (menerima) terhadap apa yang sedang dilakukan orang lain tanpa mengetahui

[145] Syaiful Hamali, "Agama dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember 2017), 228.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa dia melakukannya. Selain itu, dari makna yang diberikan oleh setiap individu kita lalu bisa mengatakan bahwa seseoang dapat mengamati atau melihat suatu tindakan yang dilakukan orang lain, namun bisa jadi tidak tahu makna apa yang terdapat dalam tindakannya, karena hanya pelaku sendiri yang paling mengetahui makna dari tindakan yang dilakukan.[146]

Maka dari itu, melalui tipe tindakan sosial Max Weber kita bisa mengetahui bagaimana makna agama bagi penyelenggara, peserta serta pemilih dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo 2020.

## A. Makna Agama bagi Penyelenggara Pilkada

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.[147] Dalam konteks ini, dengan menggunakan tipe tindakan sosial dari Max Weber para penyelenggara Pilkada memaknai agama sebagai berikut:

---

[146] Muhammad Supraja, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 2 (November 2012), 84.
[147] KPU Provinsi Banten, "Penyelenggara Pemilu", https://banten.kpu.go.id/disabilitas/penyelenggara-pemilu#:~:text=Penyelenggara%20Pemilu%20diatur%20dalam%20Undang,sebagai%20satu%20kesatuan%20fungsi%20penyelenggaraan/ Diakses 16 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Agama sebagai rasionalitas instrumental

Dalam rasionalitas instrumental tindakan yang dilakukan lebih mengedepankan tindakan yang memiliki manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu, dan juga memerlukan cara sebagai aktualisasi dalam mencapai inti dari persoalan yang lebih spesifik dan terstruktur. Terkait hal ini norma-norma agama dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam regulasi penyelenggara pemilihan umum.

Selaku penyelenggara Pilkada, ketua KPU Mukhamad Iskak memaknai agama sebagai tata cara atau sistem yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu agama dijadikan sebagai landasan moral yang mana tindakannya harus selaras dengan aturan yang berlaku, baik itu aturan dari undang-undang maupun aturan dari agama. Berikut ini penjelasan beliau terkait hal tersebut:

> "Makna agama? Agama. Agama itu kan tata cara atau lebih detailnya begitu sistem yang mengatur terkait tentang tata cara keimanan atau kepercayaan masyarakat. Simpelnya begitu. Ya tentu saya memahami ajaran agama saya, lah terkait dengan kepemiluan insyaallah saya juga faham terkait dengan itu, termasuk bagaimana ketika kita menjadi penyelenggara pemilu apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan darisana. Tapi secara garis besar itu kan apa itu penyelenggara pemilu itu kalau menurut undang-undang kan jelas, harus netral, harus terintegritas, dan lain sebagainya. Itu juga sama dengan nilai-nilai agama, pemilu pun juga harus begitu. Nilai-nilai agama itu salah satunya ada kejujuran, kita tidak boleh membedakan orang satu dengan yang lain dan lain sebagainya.Tindakan saya sebagai penyelenggara Pilkada, kalau ini dikaitkan dengan agama yaa tentu kami atau saya di KPU itu akan menyelenggarakan seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh membedakan calon yang satu dengan yang lain. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga tidak boleh membedakan masyarakat A dan masyarakat B. Kemudian saya juga melakukan semua ini dengan penuh tanggung jawab, tanggung jawab ini kan tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada negara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dan tanggung jawab kepada Tuhan. Lah ini keterkaitan dengan agama itu.. Contohnya begini ketika memberikan pelayanan kita tidak boleh berat sebelah, kemudian penyelenggara harus netral, penyelenggara harus berintegritas, penyelenggara tidak boleh menerima uang dari siapapun, dari calon manapun yang itu tidak sesuai dengan koridor undang-undang. Itu kan bisa disamakan dengan *many politic* dan lain sebagainya, karena *many politic* itu secara hukum maupun secara agama kan juga dilarang. Kalau semisal di dalam undang-undang itu tidak diatur, maka biasanya memang landasan kita. Landasannya kan moral, landasan moral yang dipakai itu tentang agama. Tapi Insyaallah di negara kita ini seluruhnya hampir di atur dalam undang-undang. Aturan di undang-undang ini kan biasanya acuannya nilai-nilai religius masyarakat. Semisal terkait dengan larangan *many politic*, itu kan jelas di undang-undang, barang siapa yang menerima dan macam-macam itu akan dikenakan sanksi pidana, denda dan lain sebagainya. Di agama itu juga ada "*Arrosyi wal murtasyi finnar", itu hadis nabi kalau enggak salah, itu menyatakan bahwa yang menerima dan memberi suap itu sama-sama masuk neraka. Ini tidak bertolak belakang, justru saling mengisi antara agama dengan undang-undang itu"*[148]

Hal senada juga dikatakan oleh anggota KPU yang lain, Miftakul Rohma yang memaknai agama sebagai pedoman atau pegangan setiap individu. Dalam konteks nilai, agama ikut andil terhadap regulasi nilai-nilai politik Seperti halnya transparan, jujur, adil, mandiri serta harus berintegritas. Berlandaskan dari nilai-nilai yang terdapat dalam agama diajdikan sebagai instrumen untuk mencapai Pilkada yang demokratis di Sidoarjo. Berikut ini tutur beliau kepada saya:

> "Agama itu pedoman atau pegangan setiap person atau individu. Jadi kalau kita hubungkan dengan pilkada kemarin terhadap individu, tentu kemudian pilkada itu bagian instrumen politik untuk sarana demokrasi, untuk menentukan kepala daerah di Sidoarjo. Dalam pilkada kemarin itu kan yang menyelenggarakan ada regulasinya, harus tansparan, harus jujur, harus mandiri, dan harus berintegritas, dan unsur-unsur yang diatur dalam penyelenggara saya kira juga nilai-nilai yang diatur dalam agama. Agama kan juga mengajarkan kita untuk apa ya, transparan, punya integritas, jujur, amanah, jadi sesungguhnya dalam aspek kehidupan ya saling berkaitan. Bagi saya maknanya begitu. Kalau kemudian kita ngomong secara simbolik agama ya memang tidak ada kaitannya secara langsung loh ya,

[148] Mukhamad Iskak (Ketu KPUD Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena memang didasarkan bahwa ketika kita berbicara tentang politik (Pilkada), kan kemudian kita tidak boleh membawa simbol-simbol keagamaan. Tetapi dalam konteks nilai, sesungguhnya seluruh aspek itu ya ada regulasi nilai-nilai agama, dalam konteks nilai-nilai politik, misalnya nilai-nilai demokrasi itu."[149]

Pernyataan yang senada juga diutarakan oleh beberapa ketua PPK dari masing-masing kecamatan yang terdapat di Sidoarjo. Seperti halnya Akhmad Kharis Syafi'i yang merupakan ketua PPK Porong yang memaknai agama sebagai pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab. Dengan berpedoman terhadap nilai-nilai agama yang kuat dapat membantu menjauhkan dari suatu hal yang dilarang dalam proses pemilihan, seperti halnya suap yang diberikan oleh setiap tim sukses pasangan calon. Tanpa adanya dasar agama yang kuat maka sangatlah mudah terperangkap dalam kegiatan politik praktis.

Maka dari itu, sebagai ketua nilai-nilai yang terdapat dalam agama, yang juga tertera dalam regulasi pemilihan umum dijadikan sebagai instrumen agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil kebijakan. Untuk mewujudkan regulasi pemilihan umum yang ada di kode etik penyelenggara, penyelenggara tidak boleh memihak salah satu paslon yang dibuktikan dengan adanya pakta integritas serta adanya aplikasi KPU yang terbaru bernama Sirekap untuk melihat hasil rekapitulasi pemilihan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Berikut ini penuturan beliau kepada saya:

[149] Miftakur Rohma (Anggota KPUD Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 11 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kalau masalah agama dihubungkan sama Pilkada kemarin ya, kalau kita enggak punya dasar yang kuat pasti banyak tergodanya. Karena di pemilu Bupati ini banyak tawaran-tawaran. Jadi misalkan tawaran kepingin ngeloloskan, biasanya itu kebanyakan calon pingin nambahi suaranya. Jadi kalau tidak punya dasar yang kuat, biasanya itu di iming-imingi berbagai macam sembarang wes, uang berapa juta gitu, kalau enggak punya dasar itu pasti kena. Kebanyakan teman-teman kemarin banyak yang di iming-imingi mobil, di iming-imingi uang puluhan juta asalkan bisa menambah suara. Tapi karena dasar agamnaya kuat, sehingga enggak akan mau. Kebanyakan seperti itu. Tapi karena kita sudah dibina sama ketua KPU jaga integritas kerja, jangan sampai tergiur dari iming-iming paslon. Sering diajak istighosah dan lain-lain biar enggak tergiur seperti itu. Jadi, dalam hal ini agama dijadikan pedoman. Kalau kurang kuat dasarannya, kena iming-iming seperti itu pasti ngambil kebijakan sendiri. Terutama ketua. Untuk mewujudkan asas-asas yang ada di kode etik penyelenggara, kita sebagai penyelenggara tidak boleh memihak salah satu paslon dan hal ini dibuktikan dengan adanya pakta integritas harus netral, terus mengadakan sosialisasi ke masyarakat, terutama pemilih pemula, serta rekapitulasi hasil yang dilakukan secara terbuka dan masyarakat bisa mengetahui hasil Pilkada melihat atau mengakses lewat aplikasi KPU yang terbaru yaitu Sirekap"[150]

Selain ketua dari PPK Porong, hal senada juga dikatakan oleh ketua PPK Sedati, Aries Kurniawan. Agama dimaknai sebagai tuntunan yang mengatur aktivitas ibadah, berperilaku kepada Tuhan, manusia serta alam semesta. Maka ketika dikaitkan dengan jabatannya sebagai penyelenggara, agama mengajarkan bagaimana cara bertindak agar sesuai dengan fakta integritas KPU, netralitas, jujur, adil serta tidak melanggar kode etik penyelenggara. Untuk mewujudkan asas-asas pemilihan tersebut, ada beberapa hal yang dilakukan seperti halnya tidak bertemu dengan tim sukses atau kontestan Pilkada, bersikap netral serta bekerja sesuai dengan tahapan. Dibawah ini pernyataan beliau kepada saya terkait hal tersebut:

"Makna agama menurut saya adalah tuntunan yang mengatur kepercayaan, cara ibadah, dan berperilaku kepada Tuhan (hablum minaAllah). Berperilaku sesama manusia (hablum minnas), berperilaku kepada alam(hablum minal alam). Kalau agama dihubungkan dengan saya selaku penyelenggara, itu supaya kita

[150] Akhmad Kharis Syafi'i (Ketua PPK Porong), *Wawancara*, Sidoarjo 6 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara bertindak sesuai dengan fakta Intregitas KPU, netralitas, jujur, adil. Dan juga tidak melanggar Kode Etik penyelenggara. Saya tidak memahami ajaran agama terkait penyelenggara Pilkada, tetapi saya akan berusaha untuk tidak melanggar aturan yang terdapat dalam kode etik penyelenggara dan saya tidak tertarik sama sekali dengan politik uang. Guna mewujudkan asas yang terdapat dalam penyelenggara pemilihan, ya bersikap netral, bekerja sesuai tahapan, tidak bertemu dengan tim sukses atau kontestan Pilkada diluar sekretarian PPK dan lain-lain. Yang ada di kode etik sebisa mungkin tidak dilakukan"[151]

Hal senada juga diutarakan oleh ketua PPK Tanggulangin yang bernama Suhadi. Agama dimaknai sebagai aturan yang di dalamnya terdapat undang-undang sebagai petunjuk bagi seluruh umatnya untuk mengajarkan kebaikan dan melarang kejelekan. Hal inilah yang menjadi dasar tindakannya sebagai penyelenggara dalam kontestasi Pilkada, bahwa seorang penyelenggara harus mengetahui konsep agama yang dianut seperti halnya jujur, adil, terbuka, profesionalis, integritas, dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan asas penyelenggara pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat paling bawah sebagai penyelenggara mempunyai kewajiban yang wajib dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang kepemiluan. Berikut ini pernyatannya kepada saya:

"Secara umum agama adalah aturan yg didalamnya ada undang undang sebagai petunjuk bagi para pengikutnya, di semua agama pasti mengajarkan kebaikan dan melarang tindakan kejelekan, tidak ada satu agama pun dimuka bumi ini yang mengajarkan tentang tindakan kejahatan dan keburukan dengan *ending* yang sama yakni supaya manusia atau pengikutnya memperoleh keberkahan, keselamatan, dan kebahagian baik semasa di dunia maupun di akhirat kelak. Dari sudut pandang agama sebagai sebuah aturan yang terkonsep dari sebuah perundang undangan, inilah yang mendasari setiap tindakan kami sebagai penyelenggara dalam kontestasi Pilkada, seorang penyelenggara harus tahu konsep agama yang dianutnya seperti; jujur, adil, terbuka, profesionalis, proporsional, integritas, akuntabilitas. Yang semua ini sesuai dengan asas kepemiluan kita. Asas penyelenggara maksudnya. Ya, Insyaallah saya faham agama. Beberapa yang di

[151] Aries Kurniawan (Ketua PPK Sedati), *Wawancara*, Sidoarjo 9 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajarkan dalam ajaran agama kami adalah berlaku jujur, adil terhadap setiap tindakan yang dalam kaitan sebagai seorang penyelenggara hal tersebut adalah asas yang harus kami junjung tinggi. Selaku penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai pada tingkat yang paling bawah (KPU, PPK, PPS, KPPS) mempunya kewajiban yang dilaksanakan dalam proses Pilkada yakni sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam undang-undang kepemiluan. Dua hal yang sangat penting yang harus dijunjung tinggi oleh seorang penyelenggara pemilu adalah integritas dan netralitas dalam artian penyelenggara pemilu tidak boleh memihak pada kontestan pemilihan, tidak boleh memakai atribut kontestan, tidak boleh mempengaruhi pemilih atau mengarahkan untuk memilih salah satu kontestan, tidak boleh menerima apapun dari kontestan alias grativikasi, profesional dalam bertugas, tidak boleh mendatangi acara kampanye pada semua kontestan dan lain-lain. Inilah yang wajib dilakukan oleh seorang penyelenggara."[152]

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh anggota BAWASLU, Agung Nugraha selaku devisi koordinator penanganan pelanggaran yang memaknai agama sebagai sesuatu yang memandu manusia. Dikarenakan agama yang menggerakkan keyakinan secara sempurna antara entitas dirinya dengan alam maupun diluar mikrokosmis yang terdapat di dunia ini. Berikut ini pernyataan beliau kepada saya:

"Makna agama adalah sesuatu yang memandu manusia karena itu yang menggerakkan keyakinan secara sempurna orang terhadap sebuah entitas dirinya dengan entitas alam maupun diluar mikrokosmis yang ada di dunia ini. Terkait dengan persoalan agama ini, suluk sendiri memaknainya dengan ada sebuah klasifikasi ada dunia satu, ada dunia dua. Agama itu ada di dunia satu yang sifatnya suci yang merupakan hakikat diri dari manusia. Sehingga hal-hal yang menyangkut didalam proses election atau pemilihan dalam rezin apapun itu jangan samapai masuk di dunia satu ini. Tapi dunia dua atau dunia realitas sosial masyarakat yang ada. Prinsipnya itu terhadap proses pemilihan."[153]

Dalam menjalankan tugasnya, pendekatan yang dilakukan oleh BAWASLU ialah pendekatan sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam agama. Prinsipnya yaitu menjaga para alim ulama yang ada di

[152] Suhadi (Ketua PPK Tanggulangin), *Wawancara*, Porong 10 Febuari 2021.
[153] Agung Nugraha (Anggota BAWASU Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo serta menjaga kesucian tempat-tempat ibadah dari ruang politik. Oleh karena itu proses-proses yang dilakukan lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif dengan para kelompok da'i, pendeta, ormas keagamaan dan lain sebagainya. Begitu pula para ulama, ormas keagamaan memberikan sumbangsih yang sama untuk melindungi tempat-tempat ibadah serta kelompok jamiah agar tidak dimasuki ruang-ruang politik. Seperti yang disampaikan oleh pak Nugraha kepada saya:

> "Kalau pendekatan prinsipnya menjaga ulama-ulama kita, alim ulama yang ada di Sidoarjo. Begitu juga, kita mencoba menjaga kesucian dari tempat-tempat agama itu, tempat-tempat ibadah. Makanya proses-proses yang kita lakukan, kita lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif dengan kelompok-kelompok dai, pendeta, ormas-ormas keagamaan dan seterusnya. Maupun dewan masjid, ya dewan masjid, takmir ya takmir yang ada di Sidoarjo ini. Sehingga itu memang pola-pola yang kita lakukan. Kita kemarin cukup beruntung, karena isu agama ini dalam pelaksanaan pilkada Sidoarjo untuk muncul dalam fase-fase 30 hari pertama masa kampanye. Sehingga begitu isu tersebut sempat meledak, dan isu-isu itu sempat dilakukan proses-proses pendekatan secara *tabayyun* dengan para pihak, karena memang tidak masuk dalam unsur pidana pemilihan. Kami dengan kepolisian melakukan *tabayyun* bersama. Akhirnya menjadi rekonstruksi orang-orang Sidoarjo, menjadi refleksi orang-orang Sidoarjo. Ada sumbangsih banyak dari tokoh-tokoh agama, alim ulama maupun organisasi sosial keagamaan yang ada di Sidoarjo untuk melakukan proses yang sama, untuk melindugi tempat-tempat ibadah mereka, kelompok jami'iah mereka agar tidak dimasuki ke ruang-ruang politik."[154]

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, agama dimaknai sebagai rasional instrumental. Hal ini karena dalam menjalankan serta mewujudkan asas-asas yang terdapat dalam kode etik penyelenggara (regulasi pemilihan umum) diperkuat dengan landasan moral agama. Dengan begitu landasan moral yang terdapat dalam agama digunakan untuk memandu tindakan

[154] Agung Nugraha (Anggota BAWASU Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sehingga dengan berlandaskan nilai-nilai agama yang terdapat juga pada asas-asas kepemilihan dan di dukung pula dengan adanya platfrom (SiRekap) untuk melihat hasil rekapitulasi suara yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat mampu mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, transparan dan berintegritas.

Selain itu dari beberapa pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa hubungan agama dan negara tergolong *intersectional* (agama dan negara berjalan secara berdampingan). Maksudnya yaitu agama dan negara berjalan secara simbiotik serta dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung yang mana keduanya masih ada kontrol masing-masing. Dalam hal ini nilai-nilai agama dijadikan pedoman untuk menjalankan tanggung jawab para penyelenggara Pilkada serta membuat regulasi pemilihan yang terdapat dalam undang-undang pemilihan umum.

Terkait hubungan agama dan politik ketua KPU mengatakan bahwa keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi (simbiotik), yang artinya antara politik dan agama tidak boleh saling mendominasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataannya kepada saya sebagai berikut:

"Hubungan agama dan politik itu kan harus sejajar, harus sejajar, tidak boleh satu sama lain itu mendominasi. Kenapa seperti itu? Karena politik itu seni, seni mengatur. Seni dan ilmu mengatur terkait dengan cara meraih kekuasaan atau tujuan. Tentu cara mencapai tujuan atau kekuasaan ini baik secara konstitusi maupun non konstitusi. Dan ini memang ada aturan-aturan terkait dengan politik dan lain sebagainya. Kemudian agama itu cenderung pada nilai ruhani, maka ini harus berlaku sejajar. Tidak boleh kemudian di negara ini dalam melakukan proses politik, dalam melakukan proses demokrasi ini lebih mengedepankan agama saja. Contohnya begini, karena saya orang Islam saya harus memaksakan bahwa tatanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik itu harus sesuai dengan syariat Islam, contohnya seperti itu. Ini karena kita di negara Indonesia, bukan negara agama, tidak diperkenankan. Atau sebaliknya orang-orang Kristen juga tidak boleh memaksakan tatanan politik, tatanan negara ini sesuai dengan keyakinan mereka. . Jadi tidak boleh kemudian sebagai orang Islam kami harus memaksakan, ooh Bupatinya harus orang Islam, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan hati nurani, itu monggo-monggo saja, tapi yang tampak di masyarakat tidak boleh kita menolak semisal Bupati Sidoarjo ini bukan orang Islam, kita tolak tidak boleh seperti itu. Mangkanya harus sejajar, tapi terkait dengan keimanan, terkait dengan keyakinan seseorang asalkan tidak ditampakkan di masyarakat. Saya orang Islam, saya harus milih Islam itu tidak apa-apa. Tapi itu tidak boleh dikeluarkan di masyarakat. Maka ini harus sejajar antara politik dan agama. Saling berkaitan dan saling memperngaruhi, karena agama tanpa politik juga tidak maksimal, politik pun tanpa didasari dengan agama tentu akan menjadi politik-politik yang tidak baik. Berarti hubungannya itu simbiotik, iya saling mempengaruhi. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini justru agama itu kan kuat pengaruhnya terhadap perpolitikan di negara kita atau di Sidoarjo. Begitu." [155]

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh anggota KPU yang lain dalam menyikapi adanya simbol keagamaan yang terdapat dalam baner pasangan calon, yang mana antara agama dan politik sesungguhnya tidak bisa terlepas bebas secara nilai karena semuanya saling berkaitan serta mayoritas masyarakat Sidoarjo adalah masyarakat yang beragama. Berikut ini ungkapan beliau kepada saya:

"Kalau menyikapi simbol keagamaan yang terdapat dalam beberapa baner paslon dalam konteks penyelenggara, jadi ketika kita melihat kemudin ada calon dengan simbol-simbol kampanyenya menggunakan salah satu tokoh itu kan tidak dilarang di kita, ada role-role yang kemudian menggunakan tokoh kepala daerah itu tidak boleh, tetapi kalau menggunakan tokoh orang lain yang kebetulan dia itu adalah ulama itu enggak ada regulasi yang melarang di aturannya kita selaku penyelenggara. Terlepas kemudian masyarakat menilai ini adalah tokoh agama, ini adalah toko masyarakat, ini adalah tokoh budaya ya enggak masalah. Kalau kemudian enggak ada yang melarang ya enggak apa-apa, tapi kemudian ketika orang lain melihat oo inikan menggunakan apa, tokoh yang dipakai kebetulan kyai, kebetulan ulama, ya bagi kami sepanjang enggak ada yang melarang ya enggak ada masalah. Tapi memang dalam konteks sosial itu tidak bisa dinafikan, karena memang apa namanya di masyarakat kita Indonesia, Sidoarjo ini kan secara mayoritas kan masyarakatnya banyak muslim, agamis. Secara otomatis kan

[155] Mukhamad Iskak (Ketu KPUD Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo 20 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian itu ada kaitannya. Jadi, agama bagi saya selaku penyelenggara itu adalah *role* yang dipakai oleh semua orang dalam proses kehidupan, kan begitu. Lah kalau kemudian dihubungkan dengan penyelenggara, dengan politik saya sampaikan bahwa kita selaku KPU itu kan ada asas-asas dan prinsip-prinsip yang harus dipegang, kayak tadi mandiri, jujur. Ternyata prinsip-prinsip itu kan nilai-nilai agama. Begitu yaa, mangkanya sesungguhnya tidak ada hal satu pun yang kemudian politik dan agama itu sesuatu yang terlepas, bebas secara nilai itu endak bisa, karena semuanya itu saling berkaitan, tapi memang dalam proses identitas, maupun proses secara nilai itu berhubungan tetapi secara simbolis kan tidak."[156]

Selain itu, pendapat yang serupa juga diutarakan oleh ketua PPK Porong:

"Agama dan politik saling berhubungan. Agama bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tanggung jawab saya."

Senada juga dengan yang dikatakan oleh pak Aries ketua PPK Sedati bahwa hubungan agama dan politik di Sidoarjo sangatlah kuat dan saling berkaitan atau simbiotik, karena hal tersebut dipengaruhi oleh kultur dari masyarakat Sidoarjo yang memiliki kultur NU yang kuat serta selama Pilkada langsung selalu dimenangkan oleh pasangan calon yang di usung oleh partai berbasis agama. Hal ini diutarakan dengan pernyataan beliau:

"Hubungan agama dan politik di Sidoarjo Itu sangat kuat. Saling berkaitan. Kultur pemilih di Sidoarjo selama Pilkada langsung, selalu di menangkan oleh calon yang di usung partai berbasis agama (pengusung utama) selalu dimenangkan. Karena di Sidoarjo kultur NU sangat kuat. Hubungannya simbiotik Mbak, saling mempengaruhi dan dipengaruhi [157]

Selain itu, pendapat yang senada juga diutarakan oleh pak Suhadi selaku ketua PPK Tanggulangin bahwa hubungan agama dan politik saling berkaitan serta melahirkan sesuatu yang berkaitan serta melahirkan sesuatu

[156] Miftakul Rohma (Anggota KPUD Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 11 Febuari 2021.
[157] Aries Kurniawan (Ketua PPK Sedati), *Wawancara*, Sidoarjo 9 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermanfaat bagi masyarakat apabila penganut agama dan pelaku politik menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-unadangan. Akan tetapi agama juga bisa saling menghancurkan apabila penganut agama dan pelaku politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan melupakan aturan perundang-undangan. Berikut ini adalah pernyataan beliau terkait hal tersebut:

"Agama dan poilitik adalah dua hal yang saling berkaitan dan akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya jika penganut agama dan pelaku politik benar benar menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tetapi agama dan politik akan menjadi dua hal yang saling menhancurkan kala penganut agama dan pelaku politik hanya meraup segalanya demi kepentingan pribadi dan melupakan aturan perundang-undangan. Agama selalu dijadikan ajang yang paling empuk untuk mendulang suara dalam kontestasi politik, agama bahkan ibarat vitamin yang dengan cepat bisa meningkatkan elektabilitas kontestan. Dari 3 pasangan Kontestasi politik pilkada Sidoarjo 2020 hampir semuanya menggunakan basis agama sebagai lahan yang dilubangi untuk mencuri simpati masyarakat. Mereka hadir di majlis taklim, pondok pesantren, tokoh tokoh agama dengan visi misi yang belum bisa ditebak php atau tidak. Jadi hubungannya simbiotik Mbak, dengan alasan dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari unsur politik dan agama adalah panduan tentang arah dan jalan berpolitik."[158]

Sedangkan bagi anggota BAWASLU hubungan antara agama dan politik terkait penggunaan isu-isu keagamaan dalam kampanye sudah tertuang dalam undang-undang dan hal tersebut dilarang. Namun, pendekatan agama dalam sebuah proses pemilihan tidak bisa dipungkiri, karena hal tersebut pasti ada. Terkait hal ini diungkakan oleh pak Agung Nugraha:

"Hubungan antara agama dan politik sebenarnya kalau dari klaster regulasinya itu jelas. Jelas ada larangan di UU-nya, itu kegiatan kampanye dilarang pasal 9C, itu

[158] Suhadi (Ketua PPK Tanggulangin), *Wawancara*, Porong 10 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menggunakan menghasut, mengadu domba, menggunakan isu-isu suku, antar golongan, ras, agama. Ketika kampanye menggunakan isu-isu itu, itu ada hubungannya dengan pasal 187, itu di sanksi pidana, itu ada pidananya., konteksnya disitu, kalau di isu kampanyenya. Sehingga pola-pola itulah, tempat privat, tempat-tempat suci itu tecerderai di dalam kontestasi politik. Terkait masalah proses di dalam setiap *election* kita tidak bisa pungkiri pasti ada. Pasti ada bagaimana pendekatan-pendekatan agama untuk kecenderungan pemilih. Dan di Sidoarjo kemarin ada satu persoalan itu yang masuk ke ranah itu, ada sambutan dari seorang ulama yang ada di Sidoarjo itu mengarahkan kepada jamaah yang ada pada waktu itu, karena itu acara keagamaan untuk memilih salah satu paslon dengan pendekatan keyakinan-keyakinan keagamaan."[159]

Dari penjelasan terkait hubungan agama dan politik di Sidoarjo diliat dari sudut pandang para penyelenggara Pilkada cenderung simbiotik, karena keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Antara agama dan politik tidak bisa terlepas bebas secara nilai, karena pada dasarnya regulasi terkait kepemilihan seperti kode etik penyelenggara yang terdapat dalam undang-undang juga berasal dari nilai-nilai moralitas agama. Selain itu hubungan keduanya juga terlihat dalam Pilkada secara langsung di Sidoarjo yang selalu dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung partai berbasis agama.

Memang pada dasarnya lembaga politik memerlukan agama untuk mewujdukan demokrasi yang adil, jujur serta sesuai dengan spirit ketuhanan, begitu pula dengan agama yang memerlukan lembaga negara untuk akselerasi pengembangannya.[160]

---

[159] Agung Nugraha (Anggota BAWASU Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo 22 Desember 2020.
[160] Moh Dahlan, "Hubungan Agama", 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## A. Makna Agama bagi Peserta Pilkada

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan peserta Pilkada yaitu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.[161]

Dalam konteks ini, peserta Pilkada dari ketiga pasangan calon yang ada terdapat Dwi Astutik selaku wakil dari pasangan calon nomor urut 3 yang akan memberikan pandangannya tentang makna agama serta pandangannya terkait hubungan agama dan politik, khususnya di Sidoarjo. Selain Dwi Astutik, terdapat juga perwakilan ketua masing-masing dari tim sukses setiap pasangan calon. Berikut ini makna agama bagi peserta Pilkada:

1. Agama sebagai Rasionalitas Nilai dan Rasionalitas Instrumental

   Dalam memaknai agama, salah satu wakil kandidat memaknai agama sebagai rasionalitas nilai yang mana dalam melakukan tindakan berdasarkan nilai agama yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang ada hubungannya dengan berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan niat untuk

[161] Wikipedia, "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia#:~:text=Berdasarkan%20Undang%2DUndang%20Nomor%2032,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik./ Diakses 18 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencalonkan sebagai wakil pasangan calon yaitu untuk beribadah dengan berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan (*Fastabihul Khoirot*). Serta sebagai orang Islam harus terlibat dalam perbuatan baik yaitu ber*fastabikhul Khoirot* dengan terlibat dalam urusan kenegaraan. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Kalau saya berbicara kehidupan apapun, bukan hanya Pilkada pasti ada kaitannya dengan agama. Tidak mungkin enggak. Kehidupan apapun, apalagi Pilkada. Kalau urusan Pilkada, urusan kemasyarakatan pasti tidak lepas dari urusan agama. Jadi kalau bicara tentang agama dari sisi lini apapun, gerakan kehidupan itu pakai agama. Terutama pada saat kita menentukan sikap. Menentukan sikap kita mencalonkan diri itu niatnya apa. Itu agama masuk. Enggak mungkin enggak. Tidak ada di dunia ini, kecuali kalau dia memang bukan orang beragama. Itu enggak akan dipakai. Tapi karena orang beragama, maka dimasukkan. Alasan saya mencalonkan diri adalah karena niat ibadah. Hidup untuk apa Mbak? Saya ini dosen politik, tapi saya bukan partisi, bukan orang partai. Hidup ini memang untuk *Fastabihul Khoirot*. Nek enggak ditoto niate, kalah, pusing. Mangkane niatane ibadah, ditoto niate. "[162]

Selain rasionalitas nilai, bu Astutik juga memaknai agama sebagai rasionalitas instrumental karena menggunakan landasan agama dalam berkampanye. Seperti halnya beliau berbicara yang baik, menyiapkan hati yang positif, serta tindakan yang positif. Baginya, dalam berkampanye seorang harus bisa memanusiakan manusia. Disebabkan agama selalu mengajarkan tentang kebaikan. Kepada saya, bu Astutik menuturkan pernyataannya:

"Landasan saya memang agama, kalau agama memberikan landasan berbicaralah yang baik-baik. Karena agama mengajarkan seperti itu. Di dalam kampanye saya, pertama kita siapkan hati yang positif. Kedua, kita siapkan pikiran yang positif. Ketiga, kita siapkan bahasa yang positif. Jadi enggak ada *black camping.* Keempat, kita siapkan tindakan yang positif. Itu sudah masuk

[162] Dwi Astutik (Wakil Paslon 3), *Wawancara*, Surabaya 06 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur agama semua. Pergerakan apapun pasti ada keterlibatan agama, tapi sing jelas enggak menjual agama, enggak menjual ayat-ayat lah. Agama sebagai proses untuk berfstabikhul khoirot. Untuk bergerak. Nek enggak didasari yang kuat dengan agama isok stres mbak, bagi yang kalah. Bagi yang menang pun isok masuk penjara."[163]

Bu Dwi Astutik juga memahami ajaran agama terkait menjadi pemimpin atau memperoleh jabatan. Menurut bu Astutik, setiap manusia adalah seorang pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Berikut ini pernyataan beliau kepada saya:

"Saya kan fakultas dakwah, jadi ya saya paham. Seperti hadis nabi yang berbunyi setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini adalah dasar pertama saya untuk melibatkan diri di dalam sebuah kontestasi. Maka saya harus terlibat dalam urusan kenegaraan, karena salah satu cara untuk syiar adalah lewat disitu, karena syiar pemimpin yang lebih luas ya lewat anggota dewan, lewat pemerintah tertinggi, baik itu di Pilkada, Gubernuran, atau Keperesidenan mereka punya dasar. Rasul saja pemimpin negara di zamannya untuk terlibat di pemerintah. Jadi tidak hanya nafsu, yang ada hanya amanah. Karena setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Jadi, setiap manusia adalah seorang pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban."[164]

Selain itu, ketika saya konfirmasi kembali terkait ketika ingin menjadi pemimpin atau pada saat berkampanye bu Astutik tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh ajaran agama karena dalam mencalonkan diri memang niat untuk ibadah,, jadi beliau tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Berikut ini pernyataan beliau kepada saya:

"Pada saat berkampanye atau ingin menjadi seorang pemimpin harus menggunakan cara-cara agama, seperti berbahasa yang baik, berkata-kata yang santun, tidak mengajak kepada sebuah kejelekan, tidak berkata bohong. Itu kan

[163] Dwi Astutik (Wakil Paslon 3), *Wawancara*, Surabaya 06 Januari 2021.
[164] Dwi Astutik (Wakil Paslon 3), *Wawancara*, Surabaya 26 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> otomatis. Apapun yang saya lakukan dilapangan saya akan menyampaikan bahwa saya niatan ibadah, untuk mencalonkan diri ini karena niatan ibadah. Ber*fastabikhul Khoirot* terlibat dalam urusan kenegaraan. Nah kalau ngajak, ya ngajak yang baik, janji ya janji yang baik. Kira-kira janji, janji yang bisa dilakukan. Enggak akan janji yang sulit dilakukan, endak mau saya. Jadi pada waktu kampanye dimuka umum, di depan publk, maka saya enggak akan berkomentar yang jelek. Jadi ya kalau bicara yang apa adanya, yang bisa kita lakukan dan setulus-tulusnya itu dilakukan. Ada sebuah tulisan, ini mungkin juga hadis *asroful iman ala roiyati manutun maslahah*, kiprah seorang pemimpin untuk rakyat harus berlandas kebaikan, kesejahteraan, keadilan bagi rakyatnya. Maka pada waktu saya berkampanye, menyampaikan dengan hati dan pikiran saya, karena saya punya rencana strategis untuk memimpin kedepan. Misalnya, saya punya *blue print*, saya menyiapkan pemetaan, bagaimana jika itu diterapkan di Surabaya atau Sidoarjo maka saya harus punya *plan* atau perencanaan. Saya sudah menyiapkan semua dan saya mau apa. Itu untuk masyarakat semuanya dan itu dalam rangka pengabdian kepada Allah. Jadi untuk apa saya melakukan hal-hal yang tidak baik menurut agama Islam. Karena niatannya sudah ibadah, kalau memang sudah begitu ya sudah selesai, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama.[165]

Berdasarkan dari pernyataan salah satu wakil pasangan calon tersebut bisa dikatakan bahwa agama dimaknai sebagai rasionalitas nilai karena apa yang dilakukan adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah dalam urusan kenegaraan. Namun beliau juga memaknai agama sebagai rasionalitas instrumental karena pada saat berkampanye menggunakan landasan moral agama untuk pedoman dalam berkampanye agar cara-cara yang dilakukan tidak melanggar norma agama yang sudah ditetapkan.

Selain dari wakil pasangan calon, terdapat juga dari masing-masing tim sukses dalam memaknai sebagai berikut:

[165] Dwi Astutik (Wakil Paslon 3), *Wawancara*, Surabaya 26 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Agama sebagai Rasionalitas Instrumental

Bagi ketua koordinator tim sukses pasangan calon nomor urut 1 (satu) Cahyo Harjo Prakoso agama dimaknai sebagai suatu keyakinan pribadi setiap individu. Yang mana dalam hal ini agama dijadikan sebagai pembentuk pribadi setiap individu karena agama memberikan ilmu yang positif bagi pemeluknya. Dalam proses kampanye, tim sukses dari pasangan calon nomor 1 (satu) ini tidak hanya menggunakan norma hukum yang berlaku melainkan norma-norma yang terdapat dalam agama juga harus dijadikan landasan. Kepada saya beliau mengatakan:

> "Agama itu sebagai suatu keyakinan pribadi kita, bagaimana agama itu sebagai dasar pembentukan pribadi seseorang. Tidak hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai pembentuk pribadi seseorang itu seperti apa. Ketika seseorang itu menyakini apa yang diajarkan agama dengan baik, pasti agama memberikan ilmu positif. Ajaran yang baik, maka seseorang itu tertata menjadi seseorang yang baik. Khusus untuk di Sidoarjo memang bagaimana tidak hanya agama ini menjadi politik identitas tetapi juga menjadi dasar dalam berkampanye. Dalam artian ketika kita dalam berkampanye harus sesuai dengan norma-norma agama. Bukan hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga norma agama. Dalam berkampanye kita juga mengedepankan keberagamaan yang ada di Sidoarjo menjadi panduan kita. Kami dari tim nomor 1 menyakini agama itu bukan nilai aspirasi tapi suatu inspirasi. Bagaimana agama ini menjadi inspirasi politik, bagaimana agama ini menjadi inspirasi dalam memberikan suatu janji kampanye kepada masyarakat"[166]

Senada juga dengan yang dikatakan ketua devisi jaringan tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu), Supriyono yang memaknai agama sebagai pegangan hidup dalam membentuk manusia yang bertaqwa. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

[166] Cahyo Harjo P. (Ketua Timses Paslon 1), *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Makna agama, agama ya untuk pegangan hidup. Jadi manusia kalau tanpa agama ya acuan hidupnya darimana. Untuk membentuk manusia yang bertaqwa ya harus mengerti nilai-nilai agama terkait yang diajarkan oleh Rasulullah."[167]

Hal senada juga dikatakan oleh tim sukses pasangan calon nomor 2 (dua), Soni Wijaya yang memaknai agama sebagai fondasi dalam pencarian makna hidup, prinsip, serta tujuan hidup. Sehingga ketika fondasi dan tujuan tersebut sudah jelas sesuai dengan agama maka tingkah laku atau perbuatan tidak akan menyimpang dari agama yang dianut. Jadi, makna agama baginya yaitu prinsip atau tujuan hidup. Berikut ini penuturannya kepada saya:

"Agama ialah fondasi semuanya di dalam mencari makna hidup, di dalam mencari prinsip hidup, menemukan tujuan hidup sehingga ketika fondasi dan tujuan itu sudah jelas dan sesuai dengan agama maka tingkah laku atau perbuatan yang mengarah ke tujuan berdasarkan prinsip agama juga akan sesuai dengan ketentuan agama."[168]

Begitu pula makna bagi tim sukses pasangan calon nomor urut 3 (tiga), Fahmi Ismail yang memaknai agama sebagai pedoman dan pandangan hidup untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan agama manusia mempunyai batasan yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama masing-masing. Berikut ini adalah pernyataan mas Fahmi:

"Makna agama menurut saya adalah sebagai pedoman hidup. Agama itu sebagai pedoman hidup, selain pedoman agama juga sebagai pandangan hidup. Karena kalau tanpa agama manusia ini akan bingung untuk melakukan aktivitas-

[167] Supriyono (Ketua Devisi Jaringan BHS), *Wawancara*, Sidoarjo 26 Maret 2021.
[168] Soni Wijaya (Koordinator Timses Paslon 2), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga agama sebagai pandangan hidup. Kalau bahasa kerennya kan "*lay of life*", sehingga dengan agama kita punya batasan. Manusia memang merdeka, tapi dengan adanya agama kebebasan manusia itu dibatasi dengan nilai-nilai dari setiap ajaran agama masing-masing."[169]

Dari memaknai agama yang sudah dijelaskan diatas, hal ini memberikan pengaruh atas tindakan dari salah satu wakil kandidat dan masing-masing tim sukses dalam proses kampanye. Seperti yang dikatakan oleh wakil pasangan calon nomor urut 3 (tiga), yang mana hubungan keduanya simbiotik karena saling mempengaruhi dan di pengaruhi. Berikut tim sukses dari pasangan calon nomor urut 1 (satu) terkait tentang tata cara memperoleh kemenangan lebih mengikuti ajaran agama atau tidak, yang mana hal tersebut masih situasional. Artinya - *many politic* masih dilakukan karena melihat kondisi masyarakat Sidoarjo yang *mindset* nya menganggap hal tersebut menjadi hal yang lumrah saat pemilihan berlangsung. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Dalam mencari kemenangan, lebih mengikuti ajaran agama atau cara-cara lain? Jadi itu situasional, tidak bisa digebyakkan. Jadi ada golongan tertentu yang menggunakan memang terkait dengan agama, terkait dengan pemahaman bahwa nyari pemimpin itu sosok figur yang harus amanah, yang harus punya kompetensi dan kecerdasan. Kemudian perilaku sehari-hari di masyarakat bagaimana, benar-benar berjuang untuk kepentingan umat. Ada golongan tertentu yang seperti itu, misalnya orang-orang yang memang tingkat level keagamaannya ketahuan sudah sangat bagus ya. Kalau timsesnya BHS sendiri kita lakukan dua-duanya, karena tidak mungkin, karena lawan menggunakan kalau kita enggak menggunakan pasti kita bunuh diri. Sehingga penggunaan *many politic* itu tidak bisa dihindarkan karena memang masyarakatnya masih begitu. Masyarakat kita sekarang ini di Sidoarjo

[169] Fahmi Ismail (Koordinator Timses Millenial Paslon 3), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> maupun pada umunya itu sudah membudaya, *mindset*-nya bahwa *many politic* itu adalah suatu hal yang lumrah, sudah biasa. Kita ingin sebenarnya tidak menggunakan, kayak saya pribadi sebagai tim sukses itu lebih suka tentang adu argumen, bagaiman dia punya visi misi, bagaimana *attitude* dia, konsep dia membangun, kemudian *trade record*-nya bagaimana. Pemimpin yang kayak gitu yang berkualitas. Kalau transaksional itu ndak kualitas. Contoh saja seorang preman punya duit banyak, kemudian nyalon. Nah dia bisa jadi karena masyarakatnya masih transaksional. Padahal dia enggak punya kualitas secara performan orangnya, ndak punya kompetensi. Akhirnya apa di dewan, tidak punya dampak khusus dalam pengambilan kebijakan. Padahal DPR punya hak untuk berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang itu harusnya dilakukan, baik itu di dalam rapat legislatif, dan eksekutif kan biasanya enggak mungkin berdiri sendiri. Dengan politik transaksional itu sangat masih mudah ya. Seharusnya seidealnya untuk mencari pemimpin yang baik itu ya jangan sampai mengeluarkan biaya, kecuali biaya yang normatif yaitu makan, spanduk, dan macam-macam[170]

Metode kampanye yang dilakukan tim sukses ini berupa turun ke lapangan sesuai dengan program-program yang dimilki. Jadi tidak berdasarkan *random place*. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

> "Dalam prosesnya tentu pertama kita bagaimana menyusun program, ketika kita turun itu tidak berdasarkan *random place*. Tetapi berdasarkan program. Ketika paslon kita memiliki 12 program itu, mana program utamanya, program-program unggulannya kita turun ke tempat-tempat yang berkolerasi dengan program-program itu. Ketika turun tentu kita menyampaikan bagaimana program kami, tidak hanya programnya saja tetapi juga latar belakang dari paslon. Itu kami sampaikan. Baik pengalamannya, *trade record*nya ketika sebelum di politik itu seperti apa, keluarganya seperti apa. Karena kunci dari suatu pemimpin yang baik itu kan tentu dari *inner*nya dulu, dari dalamnya dulu, dari keluarganya dulu."[171]

Kemudian dari sisi agama, dalam berpolitik (kampanye) juga menggunakan pendekatan ke para kiai atau ulama di Sidoarjo. Berikut ini pernyataan beliau:

---

[170] Supriyono (Ketua Devisi Jaringan BHS), *Wawancara*, Sidoarjo 26 Maret 2021
[171] Cahyo Harjo P. (Ketua Timses Paslon 1), *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam berpolitik kemarin dari sisi agama yang kita gunakan misalkan dengan cara kita pendekatan ke para kiai, kita memberikan pemahaman Sidoarjo itu seperti ini, masyarakatnya seperti ini, dan sebagainya. Jadi kita lebih memaparkan visi misi BHS ke depan seperti apa. Itu lebih banyak kesana. Kemudian juga kalau perlu dibantu, kita juga bantu apa yang seharusnya bisa kita bantu untuk keagamaan, misalnya untuk masjid, untuk Unusida. Tetapi tidak ada kaitannya, BHS itu enggak mau dikaitkan dengan politik. Jadi banyak ke yatim piatu, yayasan-yayasan sampai sekarang kita lakukan. Walaupun BHS endak jadi tapi programnya masih berjalan terkait dengan bakti sosial itu."[172]

Hal senada juga dikatakan oleh ketua koordinator tim sukses ini, sebagai berikut:

"Paslon sendiri khususnya pak BHS, itu sebelum masa kampanye, sangatlah rutin turun ke tokoh-tokoh agama. Baik muslim, maupun nasrani dan lain-lainnnya. Semua agama kami datangi tidak hanya untuk mohon restu, tetapi juga menampung aspirasi. Memang dari paslon kami dulu memiliki program membangun Sidoarjo itu tidak bisa hanya mengandalkan Bupatinya siapa, tidak hanya mengandalkan legislatif saja, eksekutifnya saja. Itu tidak bisa. Atau hanya mengandalkan kelompok masyarakat. Itu tidak bisa. Kita semua harus sinergi untuk membangun kabupaten dengan percepatan pembangunan, butuh sinergitas antara eksekutif, legislatif dan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat sendiri juga tidak boleh dari salah satu agama, tidak boleh kelompok berasal dari satu agama. Semuanya dilibatkan. Ketika sinergi tersebut berkorelasi dengan baik, *Insyaallah* suatu tujuan dari seluruh kelompok masyarakat itu bisa terealisasi. Nah itulah dasarnya dari paslon kami silaturahmi ke alim ulama , selain minta mohon doa restu. Tapi juga untuk ke depannya apabila kami diberikan amanah. Tapi memang hasilnya tidak diberi amanah."[173]

Sedangkan untuk tim sukses dari pasangan calon nomor urut 2 (dua), tindakannya dalam kontestasi Pilkada cenderung menjadikan agama sebagai instrumen atau akomodasi untuk meningkatkan popularitas dari pasangan calon seperti status agama, dan status kesantrian yang mana kultur Sidoarjo sendiri cukup kental terhadap santri atau Aswaja (NU). Sehingga hal tersebut dapat menarik simpati

[172] Supriyono (Ketua Devisi Jaringan BHS), *Wawancara*, Sidoarjo 26 Maret 2021
[173] Cahyo Harjo P. (Ketua Timses Paslon 1), *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Selain itu, tim sukses juga menampilkan sosok calon Bupati sebagai figur yang muda, agamis atau religius, serta bersih dalam artian tidak ada rekam politik sebab masih baru dalam dunia perpolitikan. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

> "Memang ada beberapa fase ketika kontestasi Pilkada ini digelar salah satunya yaitu meningkatkan popularitas. Yang kedua fase lektabilitas, yang ketiga fase elektabilitas. Setahun yang lalu itu belum ada yang kenal gus Mudhlor itu siapa, bahkan tidak hanya kalangan tua, kalangan muda pun juga enggak kenal siapa itu gus Mudhlor. Terus dalam rangka meningkatkan popularitas gus Mudhlor supaya gus Mudhlor ini dikenal ada beberapa hal memang yang kita gandeng. Salah satunya seperti status agama, agama Islam. Kemudian status kesantrian (pesantren) karena kultur Sidoarjo terhadap pesantren, terhadap santri atau terhadap aswaja NU dan sebagainya itu cukup kental. Sehingga ini mudah untuk menjadi pemicu menarik simpati masyarakat, oh siapa sih gus Mudhlor, oh ternyata anaknya gus Ali pendiri ponpes Bumi Solawat, oh siapa sih gus Mudhlor, oh ternaya beliau direktur pendidikan di sekolah progesif Bumi Solawat dan sebagainya. Memang dengan embel-embel pesantren, kemudian tokoh ulama dan sebagainya atau istilahnya bahkan Gus (anaknya Kyai), itu hal yang cukup melekat di masyarakat Sidoarjo dan agar masyarakat mudah cepat mengidentifikasi, oh ternyata gus Mudhlor ini siapa. Menarik simpati masyarakat juga. Sosok yang kita tampilkan dari gus Mudhlor memang sosok yang muda dan agamis atau religius, kemudian juga bersih (tidak ada rekam politik, karena baru)."[174]

Dari pernyataan tersebut menngakibatkan terjadinya pelanggaran di beberapa kecamatan yang ada di Sidoarjo, seperti di kecamatan Tanggulangin pada tanggal 2 November 2020 saat proses tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sekitar pukul 20:00 WIB, bertempat di Masjid Darussalam, Dusun Wates, Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin dalam kegiatan Lailatul Ijtima' terjadi

[174] Soni Wijaya (Koordinator Timses Paslon 2), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa berupa dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh ketua MWCNU Kecamatan Tanggulangin.[175]

Selain itu, kampanye yang berbau agama juga tejadi di Desa Durung Banjar, Kecamatan Candi pada tanggal 28 November 2020 yang dilakukan oleh kepala desa Durung Banjar saat memberikan sambutannya di acara pembacaan Nariyah mengajak peserta untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua).[176]

Selain menggunakan agama sebagai akomodasi untuk memperoleh kemenangan, proses kampanye juga dilakukan mulai dari lini darat maupun lini atas. Yang dimaksud lini darat yaitu tim pemenangan pasangan calon bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan program, visi dan misi dari pasangan calon. Sedangkan yang dimaksud lini atas yaitu media massa berupa media cetak, elektronik, media online dan lain sebagainya. Berikut ini pernyataan dari pak Soni:

> "Sebenarnya kalau proses kampanye ini ada beberapa lini, satu lini darat yang artinya kita tim kemenangan ataupun paslon (gus Mudhlor dan pak Subandi) ini bertemu langsung dengan masyarakat menyampaikan atau mengkampanyekan visi misi dan programnya ketika mereka terpilih menjadi atau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Dan yang kedua, selain kampanye darat kita juga melakukan kampanye di lini atas yaitu media, baik media cetak, elektronik, media online, media sosial bahkan Youtube juga untuk menyentuh khususnya kaum milenial yang melek online atau media sosial yang isinya sama, kurang lebih mengkampanyekan program dan visi misinya ketika terpilih."[177]

[175] BAWASLU Kab. Sidoarjo
[176] BAWASLU Kab. Sidoarjo
[177] Soni Wijaya (Koordinator Timses Paslon 2), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk isu agama yang berkembang dalam kontestasi Pilkada berupa identitas keagamaan setiap calon. Seperti yang diungkapkan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua) berikut ini:

"Isu agama itu sebenarnya berkembang di masyarakat. Kemarin ada 3 paslon, dan gus Mudhlor ini paslon no 2. Banyak memang isu-isu, ya maklum kontestasi pilkada, yang menggoreng isu bahwasannya putra kyai bisa apa, kenapa enggak kembali ke pesantren aja (ngaji), ngajar, dan banyak komentar miring. Tetapi itu yang dari lawan, entah dari paslon 1 atau paslon 3. Gorengan isu yang seperti itu sudah biasa, tapi kita bisa menjawab bahwasannya gus Mudhlor ini dengan *track record*nya dulu kuliah di Unair, sarjana ilmu politik, kemudian juga berpengalaman di berbagai organisasi, ansor Jatim, dan juga berpengalaman di organisasi pendidikan sekolahnya. Dan programnya juga visioner di masyarakat Sidoarjo dan sebagainya."[178]

Selain identitas keagamaan, ideologi yang dianut dari masing-masing pasangan calon juga mempengaruhi elektabilitas Pilkada Sidoarjo. Seperti yang dikatakan oleh tim sukses nomor urut 2 (dua):

"Ada yang mengatakan bahwasannya Sidoarjo ini jangan sampai dipimpin oleh orang yang bukan NU, karena sangat kental atau mayoritas warga Sidoarjo tidak bisa kita pungkiri adalah warga Nahdliyin atau NU. Sehingga harapannya, bupatinya juga seorang nahdliyin. Apalagi anak kyai. Nah ini, mangkanya saya bilang di awal, identitas keagamaan itu sangat berpengaruh dalam mempengaruhi elektabilitas Pilkada Sidoarjo. Saya tidak bisa menyebut paslon 1 atau paslon 3, tetapi salah satu diantara mereka itu terkenal sebagai orang Muhammdiyah. Dan itu sangat mempengaruhi elektabilitas masyarakat Sidoarjo yang melek, yang mencari tahu siapa paslonnya menghindari untuk memilih orang yang bukan NU. Itu kenyataan, fakta di lapangan seperti itu."[179]

Hal senada juga dikatakan oleh tim sukses nomor urut 3 (tiga) berikut ini:

[178] Soni Wijaya (Koordinator Timses Paslon 2), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.
[179] Soni Wijaya (Koordinator Timses Paslon 2), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Isu yang dimainkan Misalnya: karena di Sidoarjo ini mayoritas NU, sering dimainkan misalnya paslon ini bukan NU. Selama proses kampanye, tim sukses paslon lain sangat memainkan isu agama tersebut. Pertama, karena pak Kelana dan bu Dwi Astutik didorong oleh partai PDIP dan PAN. Isu yang dimainkan pertama bukan kader NU, karena mayoritas pemilih adalah NU. Bahwa calon kita bukan termasuk dalam kelompok ormas tertentu, itu sering dimainkan. Misalnya pak Kelana bukan NU, pak Kelana bukan keturunan kyai atau bukan Gus. Itu yang sering dimaninkan. Hanya isu itu yang dimainkan, kalau soal agama. Bukan kader NU atau belum punya kontribusi kepada NU.[180]

Dari beberapa penjelasan diatas, hubungan agama dan politik di Sidoarjo masih sangat terasa, keduanya saling mempengaruhi. Seperti halnya sebagai landasan dalam menjadi seorang pemimpin seperti yang diungkapkan wakil pasangan calon nomor urut 3 (tiga) kepada saya:

"Kalau saya keterkaitan antara agama dengan politik itu, itu bahasa sepintas saya, nanti sampean telaah ya apa yang terjadi selain yang saya katakan. Mungkin bahasa saya aja yang kurang. Jadi kalau antara manusia beriktihar untuk kehidupan nyata sebagai calon pemimpin dengan kaitannya agama, tentu agama adalah menjadi sebuah dasar, bukan sekadar integratif saja, bukan sekadar kolaborasi, bukan. Agama itu menjadi dasar, nah dasar itu bahasa sampean tadi apa disitu? Nah di simbiotik, jadi agama Islam itu tidak akan berkembang kalau Rasul tidak melakukan strategi politik. Dunia ini tidak akan berkembang dengan baik manakala tidak dengan politik, sekecil apapun sekupnya. Baik itu sekupnya dilevel keluarga, ataupun sekupnya di organisasi atau sekupnya ditingkat kabupaten/kota, enggak usah kabupaten/kota lah, sekupnya lewat kelurahan, nasional, provisi enggak akan bisa negara ini ditata secara strategis. Politik itu adalah siasah, siasah untuk melakukan penataan, penataan sebuah kenegaraan. Jadi endak bisa, walapun orang mengatakan rebutan kekuasaan, iya rebutan kekuasaan untuk ber*fastabikhul khoirot*. Jangan salah, jangan dipelesetkan ke hal yang negatif. Jadi perebutan kekukasaan untuk ber*fastabikhul khoirot*, untuk syiar. Nah kalau saya fakultas dakwah, saya akan mengatakan itu syiar. Salah satu syiar saya adalah selain liwat lisan, lewat tertulis dan lewat gerakan. Agama jika Rasul tidak menjadi pemimpin negara pada waktu itu, maka tidak cepat berkembang. Karena politik itu harus dipakai, nah itu jadi simbiotik kata sampean tadi. Jadi ya itu yang bisa kita ikhtiarkan diri dalam kehidupan antara agama dan ikhtiar di dunia yaitu adanya keterlibatan manusia/ diri untuk menjadikan hidup ini menjadi lebih bermanfaat. Nah menjadi bermanfaat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang lain yaitu menjadi pemimpin di negaranya, menjadi pemimpin di daerahnya dan itu dasarnya adalah agama.[181]

---

[180] Fahmi Ismail (Koordinator Timses Millenial Paslon 3), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.
[181] Dwi Astutik (Wakil Paslon 3), *Wawancara*, Surabaya 26 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya digunakan sebagai landasan dalam menjadi pemimpin, hubungan agama dan politik juga bisa digunakan untuk mengatasi isu agama yang berkembang di masyarakat serta mempengaruhi suara-suara yang berimbas kepada keputusan politik seperti yang dikatakan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 3:

"Hubungan antara politik dan agama di Pilkada Sidoarjo, menurut saya sangat berhubungan erat. Sangat berpengaruh, berpengaruhnya karena mayoritas penduduk Sidoarjo adalah NU. Sehingga hubungan antara agama dan politik sering dimainkan isu-isu tentang agama untuk mempengaruhi suara-suara yang kemudian berimbas kepada keputusan-keputusan politik. Untuk menyikapi isu tesebut, kita mencoba sowan terhadap kyai-kyai yang kental dengan ke-NU'annya. Misalnya kyai gus Wahab, Rembang Tebuireng. Kyai di Jombang, Tanggulangin, Tulangan. Pendekatannya pendekatan seperti itu. Jadi meminta restu itu, ternyata paslon kita ini juga NU dan direstu sama kyai. Itu saja strategi yang dilakukan kemarin. Dan memunculkan *track record* kandidat, misalnya pak Kelana adalah betul-betul NU. Karena dia adalah pembina RRI (NU). Terus bu Dwi Astutik juga NU karena dia juga muslimat Jawa Timur."[182]

Keterkaitan antara hubungan agama dan politik di Sidoarjo juga diutarakan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebagai berikut ini:

"Korelasinya dengan peta politik kemarin memang sangat berhubungan sekali tetapi tidak hanya mengenai agama tapi suatu kelompok agama tertentu. Itu sangat berpengaruh terhadap peta politik di Sidoarjo. Seperti yang kita ketahui ada salah satu lembaga, organisasi Islam yang ada di Sidoarjo cukup besar yang sangat berpengaruh terhadap peta politik di Sidoarjo. Kita menyakini itu dan tidak menafikan hal itu, karena itu ketika kita berkampanye dan bersosialisasi ke masyarakat kami selalu berkomunkasi terhadap organisasi tersebut. Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga atau ormas Islam yang lainnya."[183]

[182] Fahmi Ismail (Koordinator Timses Millenial Paslon 3), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.
[183] Cahyo Harjo P. (Ketua Timses Paslon 1), *Wawancara*, Sidoarjo 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga dikatakan oleh tim sukses lain dari pasangan calon nomor urut 1 (satu), yang mana hubungannya cenderung simbiotik karena saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Hubungan agama dan politik di Sidoarjo sendiri menurut pendapat kami, simbiotik, keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Keduanya diterapkan, mangkanya saya bilang kita tidak bisa idealis untuk enggak menerapkan *many politic* itu. Masalahnya satu, sudah lama terjadi di masyarakat kita. Dua, BHS belum pernah menjadi bupati, sehingga untuk menarik maka itu masih diperlukan kecuali BHS ini sudah pernah menjadi bupati dan kepemimpinannya ini dibuktikan di masyarakat bahwa oh BHS ini sangat bagus ya, dirasakan betul bupati ini lebih makmur masyarakatnya, kemudian sesuatu lebih mudah dirasakan, masyarakat ndak perlu itu saya yakin memilih BHS, walaupun di iming-oming oleh yang lain itu dengan uang atau apa, saya yakin diambil uangnya aja, tetep milih BHS, tapi kan BHS belum pernah membuktikkan menjadi seorang bupati, kan begitu jadi agak berat. Apalagi di Sidoarjo ini mayoritasnya masyarakat NU, rata-rata sekarang ini kalau enggak dari NU atau PKB itu berat, kan gitu."[184]

Pendapat yang juga senada dikatakan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua), yang mana agama dan politik memang tidak bisa berpisah secara bebas di tengah kondisi masyarakat kita, khususnya Sidoarjo yang mayoritas beragama. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Jadi kalau pertanyaannya bagaimana hubungan agama dan politik di Sidoarjo ini kalau yang saya lihat dan ini yang sebenarnya kita gaungkan juga di tengah masyarakat, yang sering kita ramaikan di masyarakat bahwasannya jangan pisahkan antara agama dengan politik praktis karena zaman dahulu nabi Muhammad juga berpolitik. Mungkin kita bisa melihat kayak Piagam Madinah, bagaimana Rasulullah mempersatukan kaum Anshar dan kaum Muhajirin (piagam Madinah), bagaimana terdiri dari berbagai macam suku, itu semua ranahnya politik. Cuma mungkin antipati terhadap politik oleh sebagian masyarakat itu disebabkan karena praktek politik yang tidak benar atau tidak

[184] Supriyono (Ketua Devisi Jaringan BHS), *Wawancara*, Sidoarjo 26 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai. Sebenarnya kalau kami memakna agama itu kan dakwah. Dakwah bisa berbagai macam medianya termasuk politik ini juga bisa menjadi ranah dakwah. Kalau hubungannya antara agama dan politik menurut kami adalah sarana dakwah itu. Sebisa mungkin kita melakukan praktik politik yang benar, baik untuk kesejahteraan masyarakat."[185]

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai hubungan agama dan politik dari sudut pandang para peserta Pilkada mulai dari wakil pasangan calon dan beberapa tim sukses dapat dikatakan bahwa antara agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Terjadi hubungan simbiotik atau saling mempengaruhi dan dipengaruhi diantara keduanya, karena mayoritas masyarakat Sidoarjo yaitu masyarakat beragama. Jadi sangatlah tidak mungkin ketika keduanya terpisah secara bebas. Seperti contoh yang telah dibahas sebelumnya, bahwa agama bisa dijadikan sebagai media kampanye, misalnya menampilkan sosok figur pasangan calon yang agamis atau religius, bersilaturahmi kepada para ulama sebelum proses kampanye untuk meminta doa restu dan sebagainya.

Selain sebagai media kampanye, politik juga bisa dimaknai sebagai sarana dakwah atau berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan untuk urusan kenegaraan. Selanjutnya agama juga bisa jadikan sebagai salah satu cara untuk meredam isu ideologi atau identitas keagamaan yang terjadi dengan silaturahmi kepada para kyai guna bekerja sama dalam menyelesaikan isu agama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemaknaan agama yang diungkapkan oleh mereka

[185] Soni Wijaya (Koordinator Timses Paslon 2), *Wawancara*, Sidoarjo 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pedoman atau prinsip hidup sudah cukup tercemin dalam tindakan mereka saat kontestasi Pilkada berlangsung dengan tidak menggunakan agama ataupun politik secara berlebihan, misalnya menjual ayat-ayat Al-qur'an dalam berkampanye demi keuntungan golongan atau pribadi. Sehingga hubungan keduanya simbiotik, saling mempengaruhi dan di pengaruhi. Berpolitik tanpa di dasari dengan agama yang kuat maka akan sangat mudah melakukan politik praktis. Begitu pula dengan agama tanpa adanya politik juga tidak bisa berkembang dengan luas dan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat.

**B. Makna Agama bagi Pemilih Pilkada**

Pemilih Pilkada merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang bisa menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2020 dengan syarat berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah. Sedangkan untuk WNI yang bukan anggota TNI/ Polri dan sudah terdaftar di dalam pemilih baik di DPT, DPT Tambahan, dan DPT Khusus.[186]

Dalam memaknai agama, pemilih memaknai agama sebagai berikut:

[186] Portal Informasi Indonesia, "Sudahkan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih di Pilkada 2020", https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2130/sudahkah-anda-terdaftar-sebagai-pemilih-di-pilkada-2020#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20warga%20negara%20Indonesia,DPT%20Tambahan%2C%20dan%20DPT%20Khusus./ Diakses 20 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Agama sebagai Rasionalitas Nilai

Bagi pemilih, agama dimaknai sebagai rasionalitas nilai karena merupakan suatu keyakinan seseorang yang dianut sejak lahir. Seperti yang dikatakan oleh Rizqi Fitriani kepada saya sebagi berikut:

"Hmm makna agama adalah keyakinan seseorang yang dianut sejak lahir. Tapi bisa jadi agama seseorang berubah bergantung individu."[187]

Hal senada juga dikatakan oleh David kepada saya berikut ini:

"Agama suatu kepercaya'an yang kita yakini dan yang kita pilih, menentukan dan pemantapan hati untuk beribadah."[188]

Selain keyakinan, agama juga dimaknai sebagai suatu sistem yang mengantarkan manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh A'hassa kepada saya sebagai berikut:

"Makna agama menurutku suatu sistem yang mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan."[189]

Hal senada juga dikatakan oleh Endang yang memaknai agama sebagai pedoman hidup dan kepribadian penganutnya. Seperti yang diungkapkan kepada saya berikut ini:

"Agama merupakan sesuatu hal yang paling penting dari diri seseorang, ketika kita beragama maka kita punya iman, ketika kita beragama maka segala sesuatu tindakan dan kepribadian pasti teratur dan sesuai dengan nilai-nilai didalam agama tersebut".[190]

---

[187] Rizqi Fitriani (Warga Desa Kec. Sedati), *Wawancara*, Porong 09 Maret 2021.
[188] David (Warga Desa Kec. Tanggulangin), *Wawancara*, Porong 11 Maret 2021.
[189] A'hassa Rasyad (Warga Desa Kec. Waru), *Wawancara*, Waru 11 Maret 2021.
[190] Endang Setyawati (Warga Desa Kec. Candi), *Wawancara*, Candi 2 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Endang, Risky juga memaknai agama sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia, memperkuat rasa kemanusiaan dengan adanya doktrin-doktrin yang terdapat dalam agama serta menjaga kehidupan dalam masyarakat. Berikut ini pernyataan Risky kepada saya tentang makna agama:

"Makna agama yo, makna agama iku suatu sistem yang kompleks, yang ngatur kehidupan manusia ketika dia bangun tidur sampai tidur lagi. Nah makna agama ini itu kurang lebih, itu buat menjaga hubungan antara manusia dan manusia. Sejatinya enggak ada agama pun itu manusia punya rasa kemanusiaan, tapi ketika ada agama rasa kemanusiaan itu diperkuat karena doktrin-doktrin agama yang sifatnya mutlak dan sulit untuk ditolak. Jadi ketika munculnya agama dan agama itu menjadi suatu doktrin dalam masyarakat itu bisa menjaga kehidupan dalam masyarakat. Kemudian kalau dilihat dari sisi psikologis manusia itu sejatinya membutuhkan sesuatu untuk jadi pelindung dirinya sendiri dan dia pasti mencari sesuatu yang lebih kuat. Nah dengan adanya agama dan adanya eksistensi dari Tuhan, manusia akan mendapat ketenangan karena ada Tuhan dalam agama tersebut."[191]

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Idham Kholiq yan memaknai agama sebagai seperangkat norma atau ajaran yang berisi tentang kebaikan dan keburukan. Berikut ini pernyataan dari pak Idham terkait hal tersebut:

"Agama itu seperangkat norma-norma ajaran, tentang kebaikan atau keburukan, yang mengatur kewajiban manusia dengan Tuhan melalui peribadatan dan hubungan antar manusia melalui kaidah-kaidah dan kewajiban dalam hubungan sosial, ekonomi, politik, kemasyarakatan."[192]

[191] Risky Ilham (Warga Desa Kec. Sukodono), *Wawancara*, Porong 08 Maret 2021.
[192] M. Idham Kholiq (Warga Desa Kec. Gedangan), *Wawancara*, Porong 08 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula pendapat yang senada juga dikatakan oleh Nico yang memaknai agama untuk mengatur moralitas masing-masing individu atau manusia. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

> "Makna agama, kalau agama menurut pandangan saya ya. Nah kalau agama itu kan masing-masing individu itu memiliki kepercayaan atau agama masing-masing. Agama itu diibaratkan itu baju kita, jadi agama, fungsi agama itu adalah mengatur moralitas masing-masing individu atau manusia. Jadi agar tidak saling membunuh, saling memusuhi, saling membenci. Begitulah fungsi dari agama. Landasannya ya itu tadi, supaya kita ini bisa apa namanya saling mencintai, karena sebuah agama itu tadi, mengatur ke arah moralitas. Semua agama kan mengajarkan kebaikan."[193]

Dalam kontestasi Pilkada, para pemilih cenderung memaknai agama sebagai rasionalitas nilai karena hanya memperhitungkan manfaatnya namun tujuannya tidak terlalu dipertimbangkan, yang artinya agama dimaknai secara universal sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta merupakan sebuah pedoman dalam mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu tercapai atau tidaknya sebuah tujuan bukan menjadi masalah utama, yang penting apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang berlaku di masyarakat seperti nilai perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain yang terlepas dari prospek keberhasilannya.

Dalam proses pemilihan kemarin, latar belakang agama dari setiap kandidat tidak begitu berpengaruh karena masyarakat lebih melihat visi misi serta program yang direncanakan dari setiap pasangan

[193] Nico (Warga Pondok jati), *Wawancara*, Porong 26 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon. Hanya sebagian dari mereka yang memilih sebuah pemimpin melihat latar belakang agama dari setiap pasangan calon. Hal tersebut seperti yang diucapkan oleh salah satu warga berikut ini:

"Hmm iya, aku milih berdasarkan agama. entah beliau dalam menjalankan tugasnya itu karena Allah atau memang karena yang lain, tetapi setidaknya beliau dari kalangan kyai besar".[194]

Senada juga dengan yang dikatakan oleh Endang bahwasannya latar belakang dari agama ikut memperngaruhinya ketika proses pemilihan. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Karena background dari keluarga kyai. Jadi diharapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab lebih amanah dan baik."[195]

Namun pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh A'hassa yang memilih berdasarkan visi-misi dari pasangan calon daripada melihat latar belakang agama. A'hassa juga memahami ajaran agama tentang memilih sebuah pemimpin, namun hal tersebut tidak mempengaruhinya dalam proses pemilihan. Berikut ini tuturnya kepada saya:

"Latar belakang setiap paslon tidak mempengaruhiku dalam menentukan sebuah pilihan, karena apapun agama mereka ketika mereka mempunyai niat untuk membuat Sidoarjo lebih baik, lebih berbeda dari sebelumnya, iku menurutku pribadi opo ae agamae oke pokok'e nduwe keinginan gawe ngerubah Sidoarjo menjadi lebih baik. Amm aku sedikit paham tentang ajaran agama Islam mengenai memilih pemimpin, sing penting pemimpin iku amanah, jujur, bertanggung jawab. Kalau aku milih lebih ke pertama visi misi, kemudian kedua pengalaman. Dalam artian kan setiap orang punya pengalaman masing-masing,

[194] Finda Khoirun Nisa (Warga Desa Kec. Porong), Porong 24 Januari 2021.
[195] Endang Setyawati (Warga Desa Kec. Candi), *Wawancara*, Candi 2 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katakanlah ada paslon A B C. Sing A iki enggak nduwe pengalaman ndek politik. Sing B nduwe pengalaman tapi minim terus sing C iku enggak nduwe pengalaman, dadi secara otomatis aku milih sing B karena dia nduwe pengalaman meskipun sedikit, paling enggak bisa membantu dia ketika menjadi pemimpin di Sidoarjo.[196]

Hal yang senada juga dikatakan oleh Aristia Cece yang mana latar belakang agama tidak berpengaruh dalam proses pemilihan. Berikut ini pernyataan singkat darinya:

"Nek menurutku latar belakang agama dari paslon tidak mempengaruhi, yang penting bisa memimpin dengan baik dan jujur".[197]

Senada juga dengan perkataan dari Risky Ilham, bahwasannya dalam memilih sebuah pemimpin di kontestasi Pilkada, yang dilihat terlebih dahulu yaitu visi misinya daripada agamanya. Ajaran agama yang dipahami oleh Risky tentang kriteria pemimpin tidak mengharuskan ia untuk menganut apa yang telah tertulis secara tekstual di dalamnya. Menurutnya, di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia yang tidak menerapkan sistem politik Islam dan hukum Islam, maka kita harus bisa menarik teks-teks atau ajaran agama dari yang tekstual ke kontekstual. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Kalau dalam agamaku, agamaku Islam. Dalam teks-teks dasar agama seperti Al-Qur'an dan As-sunnah itu dijelaskan beberapa syarat untuk menjadi pemimpin dalam Islam. Itu pertama, yang paling utama iku harus baragama Islam, non muslim iku tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin terutama jadi pemimpin untuk orang muslim. Kemudian ada amanah, kemudian alim, adil, jujur, dan sederhana. Itu nilai-nilai pemimpin dalam Islam yang saya pahami. Yo nek aku sendiri dalam memilih suatu pemimpin untuk jadi

[196] A'hassa Rasyad (Warga Desa Kec. Waru), *Wawancara*, Waru 24 Januari 2021.
[197] Aristia (Warga Desa Kec. Porong), *Wawancara*, Porong 14 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpinku di suatu wilayah, itu yang tak lihat visi misinya terlebih dahulu. Visi misinya mengarah kemana, memihak atau tidak, iku yang tak lihat pertama kali. Meskipun dalam agamaku ada seruan untuk lebih mengutamakan pemimpin yang muslim dan tidak memilih non muslim tapi teks keagamaan iku harus dipahami secara kontekstual. Di negara demokrasi kayak Indonesia ini, kan kita enggak menerapkan sistem politik Islam, enggak menerapkan sistem hukum Islam. Jadi harus ditarik kontekstual di dalam dunia politik di Indonesia. Artinya kalau memilih suatu pemimpin yang muslim, berarti pemimpin sekalipun dia yang maju sebagai calon pemimpin harus punya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai mukmin, kayak dia baik, menjadi pemimpin yang adil, nilai-nilai kebaikan dalam Islam harus ada dalam pemimpin tersebut. Soalnya kan kita negaea demokrasi, terserah dia, dia mau maju sebagai pemimpin atau tidak, tapi urusan dia terpilih atau tidak terpilih, itu kembali kepada keputusan masyarakat, dia dapat suaranya lebih banyak atau tidak. Karena ajaran agama itu sifatnya landasan sampai hari akhir, maka harus memahami teks agama secara kontekstual.[198]

Hal senada juga dikatakan oleh pak Idham, dalam memilih sebuah pemimpin yang dilihat terlebih dahulu adalah visi misi dari kandidat setiap pasangan. Ajaran agama terkait memilih sebuah pemimpin bisa diposisikan sebagai sandaran moralitas masyarakat. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Agama mengatur syarat pemimpin yang adil. Ini bersifat normatif saja. Selebihnya tidak mengatur bagian yang mengatur sistem dan struktur politik. Dalam bagian ini, ilmu pengetahuan (sosial, politik dan ketatanegaraan) yang harus mengaturnya. Implementasi prinsip adil, akan berbeda dalam setiap zaman dan tempat, karena persoalan yang diatur dan mengatur politik itu berbeda". Dalam memilih sebuah pemimpin Pertama tentu visinya. Dalam konteks hubungan masyarakat dan negara, agama mengatur kewajiban individu sebagai warga masyarakat; seperti berbuat kebaikan, dilarang memfitnah, dilarang berbohong, dilarang saling menyakiti, wajib menebarkan kedamaian, wajib saling bekerja sama, wajib menghormati pemimpin, dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, dilarang bercerai berai, dan lain-lain. Dalam konteks kepemimpinan, agama mengatur kewajiban pemimpin untuk berbuat adil, mendahulukan kepentingan masyarakat yang dipimpin. Dalam proses memilih pemimpin agama mengajarkan agar memilih orang-orang yang mencari jabatan, memilih orang-orang yang amanah. Memilih orang-orang yang takut kepada Allah dan lain-lain. Dalam konteks politik kontemporer, kita butuh pemimpin yang demokratis, akuntable, aspiratif, memiliki visi pada kesejahteraan masyarakat. Maka menurut saya, jika agama ditempatkan pada posisi mengajarkan norma dan prinsip kebaikan dan moralitas seperti di atas bagi suatu kepemimpinan, arahnya sama dengan prinsip-prinsip kepemimpinan demokratis kontemporer. Dalam prakteknya, teori politik ini yang harus diterjemahkan dalam hubungan-hubungan yang lebih rasional, agar obyektif dan bisa

[198] Risky Ilham (Warga Desa Kec. Sukodono), *Wawancara*, Porong 08 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur semua kepentingan. Sedangkan ketentuan-ketentuan agama bisa diposisikan sebagai sandaran moralitas masyarakatnya[199]

Senada juga dengan yang dikatakan oleh Rizqi Fitriani bahwa ajaran agama tentang memilih sebuah pemimpin dijadikan sebagai landasan saja, namun dalam proses pemilihan ia tetap melihat cara kerja dari suatu kandidat yang ada. Berikut ini pernyatannya kepada saya:

"Saya memahami ajaran agama dalam memilih pemimpin, seperti memilih pemimpin yang amanah. Untuk memilih pemimpin, saya walaupun saya muslim dan contoh ini kasusnya Ahok. Saya ngambil contoh ini kasusnya Ahok, disitu Ahok disandingkan dengan pak Anies. Kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih pak Ahok. Kalau ada yang bilang pemimpin tidak boleh minoritas, karena mayoritas Muslim. Saya akan memilih Ahok, karena dari cara kerjanya sih lebih bagus Ahok. Karena kalau gini, kalau sepemahaman saya kalau dua orang disandingkan Muslim dan Non Muslim contoh, tapi cara kerjanya lebih bagus yang non muslim daripada yang si Muslim, saya akan memilih yang non muslim. pokoknya itu lebih baik memilih yang non Muslim tapi kerjanya nyata, jujur, amanah. Kan enggak semua orang muslim itu jujur, amanah yaa walaupun tau agama."[200]

Pendapat yang senada juga diutarakan oleh David, bahwasanya agama tidak mempenagruhinya dalam proses pemilihan. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Relatif, mau siapa pemimpinnya, atau dari agama apapun, yang penting bisa mensejahterahkan rakyatnya."[201]

Lantas kemudian pendapat yang senada juga diuatakan oleh Nico, bahwasannya dalam memilih sebuah pemimpin melihat setiap visi dari

[199] M. Idham Kholiq (Warga Desa Kec. Gedangan), *Wawancara*, Porong 08 Maret 2021.
[200] Rizqi Fitriani (Warga Desa Kec. Sedati), *Wawancara*, Porong 09 Maret 2021.
[201] David (Warga Desa Kec. Tanggulangin), *Wawancara*, Porong 11 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing kandidat, meskipun ia memahami ajaran agama terkait hal tersebut. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Jadi kalau menurut agama Budha, sosok yang harus jadi pemimpin itu yang pertama harus adil dan bijaksana. Jadi, khususnya agama Budha tidak ada aturan yang menentukan haruskah memilih pemimpin yang seagama itu tidak, pilihlah pemimpin yang adil dan bijaksana. Adil dalam arti dia tidak memihak ke salah satu golongan. Bijaksana menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam agama Budha memilih pemimpin itu bagaimana, tidak ada yang harus seiman, yang penting itu adil, bijaksana, mempunyai perilaku yang menjadi panutan, karena pemimpin ini kan orang nomor satu. Nah pemimpin ini menjadi rujukan, nah kalau pemimpinnya jelek, bawahannya akan jelek juga. Kalau pemimpinnya bagus, mudah-mudahan atau insyaallah kalau kata orang muslim bawahnya akan bagus juga. Jadi kembali lagi memilih pemimpin itu yang seperti apa. Di Sidoarjo sendiri kan ada Gus Muhdlor, Kelana. Nah kita sebagai warga harus turut berpartisipasi dalam Pilbup kemarin walaupun pandemi. Bagaimana kita memilih, yang satu BHS ini orang pengusaha, Gus Muhdlor anaknya toko kiai terkenal, Kelana seorang pengusaha dengan membawa wakilnya adalah seorang Muslimat. Nah kira-kira yang mana, yang satu pengusaha, yang satu dari agama, yang satu dari pengusaha dan agama (campur). Ketika kita memilih pemimpin yang pertama kita lihat visi misinya seperti apa, nah walaupun saya dengan calonnya itu jelas berbeda agama, enggak ada yang Budha mencalonkan. Kalau semisal memilih yang seiman, tidak nyoblos semua dong. Oleh karenya kita lihat visi misinya bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Karena kalau kita suruh milih kemarin memang bisa dibilang Pilkada tahun ini semua orang baru, enggak ada orang lama, enggak ada petahana. Wakil bupatinya pun sedo. Jadi semua calon-calonnya itu calon baru, ibaratnya belum memiliki *trade record* kepemimpinan di sebuah daerah. Nah kembali kita lihat visi misinya gimana visi misinya ini. Kita sebagai tokoh agama, kita melihat gimana yang bisa dari para calon ini yang bisa mempersatukan, yang bisa mengayomi agama-agama, semua agama yang ada di kabupaten Sidoarjo. Tidak satu golongan saja. Seperti itu."[202]

Selain itu ada juga salah satu warga yang cenderung sekularistik, dimana dalam hal ini latar belakang dari setiap kandidat tidak begitu dipertimbangkan, yang terpenting mendapatkan uang.

"Aku enggak ero latar belakange Mbak, ero teko gambar-gambar dan di kek'i sangu teko alah sijine paslon, tapi sing penting, pemimpin yang amanah."[203]

---

[202] Nico (Warga Pondok jati), *Wawancara*, Porong 26 Maret 2021.
[203] Devi Anggraeni (Warga Desa Kec. Porong), *Wawancara*, Porong 3 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan membaca makna agama yang disampaikan oleh masyarakat, agama cenderung dimaknai sebagai instrumen nilai dalam menentukan sosok figur pemimpin sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam hal ini kriteria pemimpin pada setiap agama mayoritas sama misalnya pemimpin harus adil, jujur, amanah, bijaksana dan setiap warga mengingkan sosok pemimpin yang seperti itu. Oleh karena itu, latar belakang agama dari setiap pasangan calon tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan sebuah pilihan, karena dalam memilih sebuah pemimpin yang dilihat terlebih dahulu adalah visi misi beserta programnya.

Meskipun beberapa dari mereka memahami ajaran agama yang diyakini, namun dalam proses pemilihan mereka juga mempertimbangkan hal lain seperti, visi misi yang ditawarkan serta mendapatkan sesuatu dari setiap kandidat yang ada. Bagi warga yang cenderung sekularistik, dimana ia menentukan pilihan karena mendapatkan uang atau barang dari setiap kandidat memang tidak bisa dihilangkan pada saat momentum pemilihan, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat kita, khususnya Sidoarjo. Namun terlepas dari hal tersebut, warga tersebut tetap menginginkan sosok figur pemimpin yang amanah, jujur sesuai dengan kriteria pemimpin dalam agama yang dianut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, melihat dari hasil wawancara dengan pemilih di Sidoarjo, setidaknya sedikit memberi landasan dan catatan bagi para pelaku demokrasi atau politik dalam proses berlangsungnya pesta demokrasi yaitu: *pertama,* pada kenyataannya masyarakat memiliki pilihan sendiri, tanpa ada kaitannya dengan partai atau pergeseran loyalitas politik, melainkan pada konteks agama dan etnis. *Kedua,* dalam kontestasi Pilkada kemampuan masing-masing kandidat dalam menjual konsep dan visi misinya menjadi pelaku utama yang ditawarkan kepada pemilih (masyarakat). *Ketiga,* kombinasi antara agama, visi dan misi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk memilih bupati dan wakil bupati yang akan menjadi pemimpin dan menjalankan roda pemerintahan di daerah tersebut.[204]

Selain membicarakan tentang makna, pemilih Sidoarjo juga mengutarakan pendapatnya terkait hubungan agama dan politik yang menurut mereka terkesan simbiotik, seperti yang dikatakan oleh A'hassa berikut ini:

"Hubungan agama dan politik di Sidoarjo sangat erat, karena di Sidoarjo sendiri kalau menurut pribadi orang yang mempunyai keturunan kiai, gus atau apalah itu namanya. Iku lebih mudah untuk menjadi pemimpin. Jadi hal ini cenderung simbiotik"[205]

Hal yang senada juga diucapkan oleh Risky terkait hubungan agama dan politik keduanya saling berhubungan. Terlebih negara

[204] Hasbullah, "Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal: Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada), *Jurnal Ushuluddin,* Vol. XVII, No. 2 (Juli 2011), 171.
[205] A'hassa Rasyad (Warga Desa Kec. Waru), *Wawancara,* Waru 11 Maret 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang mayoritas Islam, keterkaitan antara partai politik yang berbasis Islam juga turut mempengaruhi pemilihan masyarakat dalam pilkada. Menurutnya, hubungan antara agama dan politik di Sidoarjo ini cenderung simbiotik daripada sekuler atau intgratif. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

> "Agama dan politik yo, ini dari Indonesia dulu. Indonesia itu kan mayoritas beragama Islam. Jadi ketika dia memilih suatu pemimpin yang diusung oleh partai politik. Dia pasti mengutamakan yang Islam, bahkan cenderung menolak pemimpin dari non muslim. Nah, karena pada dasarnya demokrasi itu gimana yang menjadi pemimpin itu adalah ketika dia mendapat suara terbanyak. Sedangkan agama Islam ini mayoritas disini, dan pasti syarat ketentuan tidak tertulis dari politik Indonesia itu adalah pemimpin itu harus beragama Islam. Itu peraturan enggak tertulis. Beda lagi kalau misalnya satu wilayah tersebut mayoritas bukan agama Islam, tapi agama lain. Jadi peranan agama mayoritas dalam satu wilayah, itu menentukan latar belakang agama suatu pemimpin. Nah kalau dilihat-lihat itu memang partai politik yang punya basis agama itu selalu mendapat suara lebih tinggi daripada partai politik yang mengusung kepentingan suatu kelompok. Nah kalau di Sidoarjo ini kan akhirnya yang jadi Bupati, itu orang yang diusung dari partai yang notabene agama. Nah, jadi ada kemungkinan disitu kan kalau partai politik itu mengajukan suatu calon, itu enggak mengajukan diruang hampa. Dia menganalisis terlebih dahulu. Bisa jadi sebelum ngajukan ini, partai itu sudah melihat ada peluang kalau salah satu tokoh agama dalam suatu masyarakat maju dia bakal bisa menang. Nah itu peluang itu sudah di lihat dan kemudian diinterpretasikan. Nah jadi hubunngan agama dan politik di Sidoarjo itu cenderung simbiotik daripada sekuler atau integratif.[206]

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diucapkan oleh Rizqi Fitriani bahwa hubungan antara agama dan politik saling berhubungan, karena antara partai yang berbasis agama selalu berhubungan dengan organisasi mayoritas yang berada di Sidoarjo. Berikut ini pernyataan Rizqi kepada saya:

[206] Risky Ilham (Warga Desa Kec. Sukodono), *Wawancara*, Porong 08 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jujur saya suka politik, maksudnya tertarik tapi tidak ingin berkecimpung di politik. Saya juga mengetahui agama tapi saya paling tidak suka kalau politik itu disangkut pautkan dengan agama. Jadi kasarannya, hmm agama dijual untuk politik. Saya paling tidak suka seperti itu. Nah untuk di Sidoarjo, entah ini saya kurang bersosialisasi atau bagaimana tapi di Sidoarjo ini termasuk apa-apa disangkut pautkan dengan agama. Apalagi mayoritas di Sidoarjo ini paling banyak penganutnya yaa itulah yang berwarna hijau itu. jadi apa-apa itu disangkut pautkan dengan yang berwarna hijau itu. Sedangkan, kalau saya lihat *track*nya. Sebenarnya si hijau itu, jujur untuk saya pribadi. Si hijau ini sekarang gambarannya itu atau *track*nya sedang tidak bagus. Apalagi ada beberapa teman saya yang tau sebenarnya itu gimana, yang partai hijau ini. Gitu, jadi saya kurang suka, kurang setuju kalau agama disangkut pautkan dengan politik. Hubungannya cenderung simbiotik."[207]

Ketersalingan hubungan agama dan politik di Sidoarjo juga diungkapkan oleh pak Idham yang mana antara agama dan politik keduanya saling bertemu, saling mengisi antara moralitas keagamaan serta aturan objektifnya. Berikut ini adalah pernyataan dari pak Idham:

"Terkait hubungan antara agama dan politik cenderung simbiotik. Ajaran agama dan praktek politik di Sidoarjo sudah saling bertemu, saling mengisi antara moralitas keagamaan dan aturan-aturan objektifnya. Meskipun kadang ada masalah-masalah di dalam persinggungan antara keduanya, tetapi masih bisa selalu berkompromi, dan tidak sampai menjadi energi konflik.[208]

Selanjutnya pendapat yang lain juga diungkapkan oleh Nico, yang mana antara pemerintah (politik) dan agama (lembaga agama) keduanya bisa saling bekerjasama untuk mengatasi paham-paham radikal yang berada di Sidoarjo. Berikut ini pernyataannya kepada saya:

"Hubungan agama dan politik khususnya di Sidoarjo yaa, kalau di Sidoarjo itu kan kultur Nadhatul Ulama itu kan kental sekali. Jadi kultur NU di Sidoarjo sendiri ini kan sangat kental sekali, apalagi dari dulu kan bupati, wakil bupatinya itu kan orang NU. Nah pentingnya sebuah daerah bekerjasama dengan agama atau tokoh-tokoh agama yang pertama itu adalah mencegah

[207] Rizqi Fitriani (Warga Desa Kec. Sedati), *Wawancara*, Porong 09 Maret 2021.
[208] M. Idham Kholiq (Warga Desa Kec. Gedangan), *Wawancara*, Porong 08 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham radikal, paham-paham radikal untuk masuk ke sebuah wilayah. Apalagi radikalisme agama ini yang bisa menghadang itu yang ahli agama. Fungsi dan tujuan kerjasama dengan agama-agama itu tadi, fungsi itu. menutup pergerakan aliran-aliran yang dianggap radikal. Aliran agama yang menolak NKRI. Jadi ibaratnya mereka merongrong Indonesia melalui jalur agama. Fungsinya tadi bekerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga agama tadi, nah untuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang memecah belah Indonesia melalui jalur agama. Kalau jalur perang itu TNI, POLRI. Kalau melalui jalur agama ya beragama. Di Sidoarjo sendiri karena kulturnya NU ini besar di Sidoarjo, nah itu yang bertugas. Berarti hubungannya itu simbiotik ya, saling mempengaruhi satu sama lain, ya karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Politik ya berpolitik tetapi diperkuatkan oleh agama.[209]

Dari pemaparan terkait hubungan agama dan negara (Pilkada sidoarjo) bahwasannya keduanya bersifat *intersectional* (agama dan negara berjalan berdampingan atau bersimpangan). Maksud dari hal tersebut bahwa agama dan negara berjalan secara simbiotik serta dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung sehingga keduanya masih ada kontrol masing-masing. [210]

Fenomena Pilkada tidak hanya dipandang sebagai proses *elektoral* semata, melainkan juga sebagai proses politik yang meletakkan demokrasi sebagai asas perjuangan. Dalam kontesatai Pilkada sebuah otoritas primordial menjadi hal yang mempengaruhi rakyat dalam proses politik. Disebabkan hal ini menjadi salah satu pintu untuk membangun kekuatan bagi setiap kandidat kepala daerah untuk membangun imajinasi atas nama suku, agama, dan ras. Sehingga hal tersebut mampu

[209] Nico (Warga Pondok jati), *Wawancara,* Porong 26 Maret 2021.
[210] Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia", Vol. 14, No. 1, (Juni 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangkitkan emosional masyarakat dengan mengabaikan hal-hal yang bersifat rasional.

Hubungan antara agama dan politik, dalam hal ini pada kontestasi Pilkada sering memperlihatkan penggunaan idiom-idiom primordial, seperti halnya suku, etnis, ras, agama ke dalam ranah politik pada saat kampanye. Oleh karena itu, dalam kontestasi Pilkada tidak hanya ditentukan bagaimana kemampuan setiap kandidat dalam menjual konsep dan visi misinya, karena selain kemampuan tersebut dalam menentukan pilihan rakyat juga akan memilih calon dalam konteks karena ikatan primordial (suku, agama, dan ras).

Dalam konteks Pilkada Sidoarjo penggunaan sentimen primordial, terutama agama cukup terlihat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan simbol agama (Islam) dalam proses kampanye dari setiap kandidat yang ada. Dalam agama, simbol memiliki arti yang esensial. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kultur dan keyakinan masing-masing agama. Agama sendiri memerlukan simbol untuk menunjukkan eksistensi religiositasnya sehingga ia menjadi terlihat oleh *common people*. [211] Sepeti halnya Islam, yang merujuk kepada agamis, surban, cadar, kopyah, yang merupakan bagian dari nilai keislaman.

[211] Hudjolly, *Imagologi: Strategi Rekaya Teks* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan tersebut kita dapat menangkap bahwa simbol agama merupakan tanda yang memberikan gambaran tentang identitas agama tertentu, yang melahirkan konotasi tertentu serta mengarah kepada ajaran, tempat, waktu, materi yang menyangkut agama tersebut. Dalam Pilkada di Sidoarjo, penggunaan simbol agama digunakan para kandidat dalam spanduk politiknya. Berikut ini merupakan spanduk politik dari masing-masing kandidat:

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 3.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga spanduk tersebut, dapat kita lihat terdapat aspek religius tentang sosok sang kandidat, misalnya memakai peci yang menunjukkan bahwa kandidat tersebut adalah orang Islam dan religius, serta baju koko yang digunakan oleh pasangan calon nomor 1 memberikan pandangan kepada kita sosok calon yang tidak hanya religius tetapi juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

Selain simbol agama, tokoh ulama juga diperlihatkan dalam salah satu spanduk kandidat. Seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.4

Gambar 3.5

Dari spanduk tersebut, menampilkan sosok ulama Sidoarjo yang bernama KH. Agoes Ali Masyhuri atau biasa dipanggil dengan sebutan Gus Ali. Selain sebagai sosok ulama beliau juga memiliki Pondok Pesantren yang berada di kabupaten Sidoarjo serta seorang tokoh NU yang mempunyai pengaruh masif di Jawa Timur terutama di Sidoarjo. Beliau merupakan seorang tokoh perekat yang dapat mendamaikan konflik antara kiai yang berada di skala Jawa Timur. Beliau juga tercatat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Wakil Rais PWNU Jatim dan dai kondang dengan skala nasional yang video kajiannya nudah diakses di kanal youtube, instagram dan media sosial lainnya.[212]

Ulama merupakan term yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kehadiran ulama telah memberikan pengaruh yang besar terhadap umat Islam secara umum. Dalam pemahaman awam, kata *ulama, umara,* dan *aghniya* merupakan tiga kata penting dalam kehidupan, termasuk dalam konteks politik. Hubungan keduanya diumpamakan dengan relasional mutualisme. Jadi, ketika seorang figur atau tokoh ulama ditampilkan dalam sebuah spanduk kampanye politik, maka hal tersebut juga mampu menarik simpati masyarakat dalam proses pemilihan.

Selama hubungan antara agama dan politik itu terjalin, maka selalu saja terjadi benturan nilai yang susah diuraikan. Hal yang demikian tentu wajar karena keduanya memiliki karakter yang amat kontras. Agama memiliki sebuah nilai sakralitas dengan batasan-batasan doktrin normatif yang harus dipatuhi. Sebaliknya, politik memiliki nilai-nilai profanitas yang memberi ruang otoritas untuk manusia dalam mengekspresikan ide dan gagasan sesuai dengan kepentingannya. Sehingga, parameter hubungan keduanya dalam sebuah negara ditentukan bagaimana agama bisa dijadikan landasan untuk bergerak

[212] Bakhrul Huda, "KH. Agoes Ali Masyhuri, Santri Kalong yang Menjadi Sosok Kiai Karismatik", https://pesantren.id/kh-agoes-ali-masyhuri-santri-kalong-yang-menjadi-sosok-kiai-karismatik-3581/ Diakses 28 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan aktivitas politik. Dalam artian, nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam agama harus mampu diintenalisasikan dan diobyektivikasikan dalam sebuah praksis berkebangsaan dan bernegara.[213]

[213] Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian di bab-bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari masing-masing rumusan masalah:

a. Makna Agama bagi Penyelenggara Pilkada

Bagi penyelenggara Pilkada, agama dimaknai sebagai rasionalitas instrumental karena lebih mengedepankan tindakan yang memiliki manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu, dan juga memerlukan cara sebagai aktualisasi dalam mencapai inti dari persoalan yang lebih spesifik dan terstruktur. Terkait hal ini norma-norma agama dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam regulasi penyelenggara pemilihan umum. Untuk mewujudkan setiap regulasi yang ada, diantaranya yaitu adanya Sirekap yang berisi hasil rekapitulasi perolehan suara yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ada juga website dari KPUD Sidoarjo yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, serta adanya pakta integritas bagi penyelenggara Pilkada.

b. Makna Agama bagi Peserta Pilkada

Makna agama bagi peserta Pilkada. Salah satu dari wakil kandidat nomor 3 memaknai agama sebagai rasionalitas nilai dan rasionalitas



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instrumental, yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan alasannya mencalonkan diri sebagai wakil bupati yaitu diniatkan ibadah untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan serta dalam melakukan tindakan berdasarkan nilai atau landasan agama yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang ada hubungannya dengan berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. Sedangkan rasionalitas instrumental terletak pada saat berkampanye beliau selalu menggunakan perkataan yang baik, sikap yang baik serta berusaha untuk memanusiakan manusia, sebab agama selalu mengajarkan tentang kebaikan.

Sedangkan makna agama bagi tim sukses yaitu sebagai rasionalitas instrumental karena agama dijadikan sebagai salah satu cara dalam menarik simpati masyarakat pada saat berkampanye dengan menampilkan sosok figur kandidat yang religius serta dijadikan sebagai pedoman agar pada saat berkampanye tidak melanggar norma-norma moralitas yang telah ditentukan oleh agama.

c. Makna Agama bagi Pemilih Pilkada

Bagi pemilih, rata-rata mereka memaknai agama sebagai rasionalitas nilai karena kriteria pemimpin yang terdapat dalam agama dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kriteria pemimpin yang baik berdasar agama yang diyakini, seperti jujur, amanah dan sebagainya. Selain itu dalam menentukan sebuah pemimpin latar belakang agama dari setiap pasangan calon tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan sebuah pilihan, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memilih sebuah pemimpin yang dilihat terlebih dahulu adalah visi misi beserta programnya.

d. Hubungan Agama dan Politik dalam Kontestasi Pilkada

Pada mulanya hubungan agama dan politik memang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai buktinya, dalam Islam terdapat Piagam Madinah. Hal ini juga terjadi dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo, yang mana hubungan agama dan politik saling berkaitan, baik itu sebagai landasan moral dalam berpolitik ataupun sebagai alat untuk meningkatkan popularitas. Dalam meningkatkan popularitas dibuktikan dengan adanya penggunaan tokoh agama serta simbol agama yang lain untuk menarik simpati masyarakat. Sedangkan dalam segi moralitas dibuktikan dengan adanya kode etik dalam regulasi penyelenggara pemilihan kepala daerah yang digunakan pedoman oleh para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

## B. Saran

Mengingat skripsi ini jauh dari kata sempurna, penulis berharap para pembaca dapat memberikan saran yang membangun untuk kemudian hari bisa membuat peneliti mengerjakan dengan lebih baik lagi. Selain itu, peneliti juga berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat serta dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku


Abdillah, Masykuri. *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy 1966-1993*. Hambur: Abera Verlag, 1997.

Anshari, Endang Saifudin. *Kuliah al-Islam.* Jakarta: Rajawali, 1992.

Azra, Azyumardi. *Resposisi Hubungan Negara dan Agama Merajut Hubungan Antar Umat*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.

Basuki. *Metode Penelitian.* Jakarta: Widya Sastra, 2006.

BPS Kabupaten Sidoarjo. *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2020*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2020.

Dwi, J. Narwoko. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi.* Malang: YA3, 1990.

Faruk. *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Generik Sampai Post-Modernisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967.* Yogyakarta: Lkis Group, 2011.

Gaffar, Afan. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri* Berserakan. Surabaya: Yayasan 95, 2002.

Hasan, Muhammad Kamal. *Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hudjolly. *Imagologi: Strategi Rekaya Teks*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

John M. Owen. *Confronting Political Islam.* New Jersey: Princeton University Press, 2015.

John, W. Creswell. *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* California: SAGE Publications, 2009.

John, W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Kaclan. *Pendidikan Pancasila.* Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010.

Kahmad, Dadang. *Pendekatan Sosiologis dalam Studi* Agama. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Kresno, S dan Martha, E. "*Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam.* Bandung: Mizan, 1997.

Linco, S. Yvonna dan Guba, G. Egon. *Naturalistic Inquiry*. America: Sage Publications, 1984.

Madjid, Nurcholis. *Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam* Konstituante. Jakarta: LP3ES, 1985.

Madjid, Nurcholis. *Islam Keindonesiaan dan Kemoderan.* Jakarta: Paramadina, 1993.

Mandaville, Peter. *Global Politic Islam.* New York: Taylor and E-Library, 2007.

Martin, Roderick. *Sosiologi Kekusaan*. terj. Herry Joediono. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Moleong dan Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Masngudin dan Rukmini Dahlan. *Pola Hubungan Antar Golongan Nadhatul Ulama dengan Muhammadiyah (Studi Kasus di Pasuruan).* Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000.

Nadir, Ahmad. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi.* t.t: Averroes Press, 2005.

Nazih N Ayubi. *Political Islam: Religion and Politic in The Arab World.* New York: Taylor and E Library, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Patton, Michael Quinn. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation.* America: SAGE Publications, 1987.

Pelly, Usman. *Teori-teori Sosial Budaya.* Jakarta: Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Pengurus Cabang NU Sidoarjo. *Materi Musyawarah Kerja I PCNU Sidoarjo.* Masa Khidmat 2011-2016: YPM Taman Sidoarjo.

Peter L. Berger. *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*. Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999.

Rais, Amien. *Islam and Politics in Contemporary Indonesia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1999.

Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang satu Abad* . Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2008.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda.* Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda.* Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi.* Bantul: Kreasi Wacana, 2011.

Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung.* Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Sha, M. Imron. *Sekilas Pengurus Cabang Nadhatul Ulama Sidoarjo dari Masa ke Masa.* Sidoarjo: Pengurus Cabang NU Sidoarjo, 1955.

Sitepu, P. Anthonius. *Teori-Teori Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Smith, Donald Eugen *Religion and Political Development.* Boston: Little Brown and Company, 1970.

Smith, Donald Eugene. *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis.* Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia, 1992.

Subhan Setowara dan Soimin. *Agama dan Politik Moral*. Malang: Intrans Publishing, 2013.

Turner, S Bryan. *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Thomas, F O' Dea. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal.* Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Tibi, Bassam. *Islam Between Culture and Politics.* New York: Palgrave Macmilan, 2001.

Weber, Max. *Sosiologi*. terj. Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wijaya, Aksin. *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usa di* Nusantara. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.

Winardi. *Pengantar Ilmu Politik.* Jakarta: Mandar Maju, 1994.

**Sumber Skripsi dan Jurnal**

Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi". *Jurnal Ahkam*. Vol. XIII, No. 2. Juli 2013.

Abrori, Muchammad Hadiq. "Srategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015", Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Abrori, Muchammad Hadiq. "Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, 2019).

Adibah, Zahara Ida. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam". *Jurnal Inspirasi*. Vol. 1, No. 1. 2017.

Agus. "Menakar Kekuatan Simbol Agama dalam Kontestasi Politik Lokal". *Jurnal Tasamuh*. Vol. 14, No. 2. Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agustin, Nur Maya. "Partisipasi Fatayat Nadhatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 03, No. 04. 2016.

Amran Ali. "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat". *Jurnal Hikmah*. Vol. II, No. 01. 2015.

Bagno, Olena. "The Effect of Religiosity on Political Attitudes in Israel". *Jurnal Religion and Politics Section of The American Political Science Asosiacition*. Vol. 8, No. 3. September 2015.

Dahlan. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia". Vol. 14, No. 1. Juni 2014.

Darmawan, Dadang. "Model Relasi Islam dan Negara di Indonesia". *Jurnal Religious: Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*. Vol. 2, No. 1. September 2017.

Dini, Ayu Prasasti Mega. "Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Eliawati, Lia. "Aspek Postif Fungsi Politik Agama". *Jurnal Papatung*. Vol. 2, No. 1. 2019.

Fatamorgana, Inggriht. "Nadhatul Ulama dan Pilkada Gubernur Jawa Timur". *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Juli-September 2012.

Firdaus, Dimas Lazuardy. "Orientasi Pemilih PKB terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful llah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015". 2015.

Firdaus, Muhammad Anang. "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya". Vol. 13, No. 3. September – Desember 2014.

Firdauz, Dimas Lazuardy. "Orientasi Pemilih PKB Terhadap Pilihan Calon Bupati Saiful Ilah di Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2015". *Jurnal Fisip Unair*.

Halim, Ilim Abdul. 2018. "Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi", *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*. Vol. 3, No. 1. 2018.

Hamali, Syaiful. "Agama dalam Perspektif Sosiologis". *Jurnal Al-Adyan*. Vol. 12, No. 2. Juli-Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbullah. “Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal: Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada). *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVII, No. 2. Juli 2011.

Jannah, Miftakhul “Peran Nadhatul Ulama Sidoarjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Sidoarjo Tahun 2005-2015”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, 2015).

Jati, Wasisto Raharjo. “Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama”. *Journal Walisongo*. Vol. 22, No. 1. 2014.

Karakoc, Ekrem. “Religion in Politics: How Does Inequality Affect Public Secularization?”. *Jurnal Comparative Political Studies*. Vol. XX, No. X. September 2012.

KPUD Sidoarjo. “Laporan Hasil Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu: Kesukarelaan Warga dalam Politik”. 2015.

Mukti, Abdul. “Ulama, Masjid dan Ruang Demokrasi: Pergumulan Elit Agama Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kalimantan Barat”. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3, No. 2. November 2019.

Mushodiq, Muhammad Agus. “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19, Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*. Vol. 7, No. 5. 2020.

Priyanto, Joko. “Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi PILGUB Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucoult”. *Jurnal alQalam*. Vol. 34, No. 2. 2017.

Putra, Ahmad. “Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber”. *Journal of Religious Studies*. Vol. 1, No. 1. Juni 2020.

Putra, Ahmad. “Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber”. *Journal of Religious Studies*. Vol. 1, No. 1. Juni 2020.

Rosi, Fathur. “Kompetisi Politik Antar Aktor Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Alang-Alang Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan)”, Skripsi tidak diterbitkan, ( Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019).

Ruslan, Idrus. “Paradigma Politsasi Agama: Upaya Reposisi Agama dalam Wilayah Publik”. *Jurnal Madania*. Vol. XVII, No. 2. 2014

Sari, Eka Lukita. “Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih di Daerah Pemilihan Jawa Timur II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur)" Skripsi tidak diterbitkan, ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, 2019).

Sawri, Sofyan. "Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017-2022: Studi atas Fraksi Politik-Agama dan Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi". *Politiea:Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 12, No. 1. 2020.

Supraja, Muhammad". Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1, No. 2. November 2012.

**Sumber Internet**

Anonim, dalam http://www.sidoarjokab.go.id/ Diakses 14 Januari 2021.

Asfiati, Mufidah. "Kontribusi Muhammadiyah dan NU di Bidang Ekonomi dalam Pandemi Covid-19", dalam https://idealoka.com/2020/06/27/kontribusi-muhammadiyah-dan-nu-di-bidang-ekonomi-dalam-pandemi-covid-19// Diakses 27 April 2021.

Bawaslu Sidoarjo. "Sejarah BAWASLU", dalam https://sidoarjo.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu/ Diakses 03 Maret 2021.

BPS Kabupaten Sidoarjo. "Pemeluk Agama Menurut Agama dan Kecamatan, 2018", dalam https://sidoarjokab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/25/15/pemeluk-agama-menurut-agama-dan-kecamatan-2018.html/ Diakses 24 April 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, dalam http://portal.sidoarjokab.go.id/ Diakses 5 Febuari 2021.

Emmons, "Psikologi Agama", dalam www.annualreview.org/ Diakses 11 November 2020.

Haleel, Fuad Abi. "Pentingnya Agama dalam Kehidupan Politik", dalam www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/ Diakses 11 November 2020.

Heryana, Ade. "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", dalam https://www.researchgate.net/publication/329351816/ Diakses 19 November 2020.

Hilmy, Masdar. "Agama dan Demokrasi", dalam http://arjunacellular.blogspot.com/2014/07/agama-dan-demokrasi.html?m=0/ Diakses 21 Febuari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/pendaftaran/ Dikases 21 Januari 2021.

Huda, Bakhrul. "KH. Agoes Ali Masyhuri, Santri Kalong yang Menjadi Sosok Kiai Karismatik", https://pesantren.id/kh-agoes-ali-masyhuri-santri-kalong-yang-menjadi-sosok-kiai-karismatik-3581/ Diakses 28 April 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dalam https://kpud-sidoarjokab.go.id/ Diakses 6 Febuari 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dalam https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%205%20THN%202020/ Diakses 02 Maret 2021.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam https://www.kpu.go.id/ Diakses 6 Febuari 2021.

Kunaifi, Aang "Netralitas ASN dalam Pilkada dan Kewenangan BAWASLU", dalam https://jatim.bawaslu.go.id/2020/01/netralitas-asn-dalam-pilkada-dan-kewenanganbawaslu/#:~:text=Pasal%20lain%20yang%20berkaitan%20dengan,Satu%20Calon%20selama%20masa%20Kampanye%E2%80%9D. / Diakses 17 Maret 2021.

PDM Kabupaten Sidoarjo, "Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo", http://sidoarjo.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html/ Diakses 27 April 2021.

Portal Informasi Indonesia, "Sudahkan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih di Pilkada 2020", https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2130/sudahkah-anda-terdaftar-sebagai-pemilih-di-pilkada-2020#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20warga%20negara%20Indonesia,DPT%20Tambahan%2C%20dan%20DPT%20Khusus./ Diakses 20 April 2021.

Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, "Penyelenggara Pemilu", https://paralegal.id/pengertian/penyelenggara-pemilu/ Diakses 16 April 2021.

Redaksi, "Anggap Pilkada Sidoarjo Pertarungan Ideologi, Mesin PKB dan NU Solid Bergerak Menangkan Gus Muhdlor-Subandi", dalam https://republikjatim.com/baca/anggap-pilkada-sidoarjo-pertarungan-ideologi-mesin-pkb-dan-nu-solid-bergerak-menangkan-gus-muhdlor-subandi/ Diakses 8 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simkada. “Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, dalam https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/ Diakses 02 Maret 2021.

Sundus, Elok. “Kontribusi Muhammadiyah di Kancah Ekonomi”, https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/29/196411/kontribusi-muhammadiyah-di-kancah-ekonomi/ 27 April 2021.

Surya. “Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Sidoarjo, PKB Naik 16 Kursi, PDIP 9 Kursi, PAN Turun Jadi 5 Kursi”, dalam https://jatim.tribunnews.com/2019/05/04/hasil-rekapitulasi-kpu-kabupaten-sidoarjo-pkb-naik-16-kursi-pdip-9-kursi-pan-turun-jadi-5-kursi?page=2/ Diakses 24 April 2021.

Ulum, Miftahul. “Gus Mudhlor, Bawa PKB Menang Lagi di Pilkada Sidoarjo”, dalam https://surabaya.bisnis.com/read/20201216/531/1331697/gus-muhdlor-bawa-pkb-menang-lagi-di-pilkada-sidoarjo?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_1/ Diakses 24 April 2020.

Wijayanto, Totok. “Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia”,, dalam https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia/ Diakses 04 Maret 2021.

Wikipedia. “Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia#:~:text=Berdasarkan%20Undang%2DUndang%20Nomor%2032,politik%20atau%20gabungan%20partai%20politik./ Diakses 18 April 2021.

**Wawancara**

A’hassa Rasyad. Warga Desa Kec. Waru. *Wawancara.* Waru 24 Januari 2021.

Agung Nugraha. Anggota BAWASU Sidoarjo. *Wawancara.* Sidoarjo 22 Desember 2020.

Akhmad Kharis Syafi’i. Ketua PPK Porong. *Wawancara*. Sidoarjo 6 Januari 2021.

Aries Kurniawan. Ketua PPK Sedati. *Wawancara.* Sidoarjo 9 Febuari 2021.

Aristia. Warga Desa Kec. Porong. *Wawancara*. Porong 14 Febuari 2021.

Cahyo Harjo P. Ketua Timses Paslon 1. *Wawancara.* Sidoarjo 22 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Devi Anggraeni. Warga Desa Kec. Porong. *Wawancara*. Porong 3 Febuari 2021.

Dwi Astutik. Wakil Paslon 3. *Wawancara.* Surabaya 06 Januari 2021.

Endang Setyawati. Warga Desa Kec. Candi. *Wawancara.* Candi 2 Febuari 2021.

Fahmi Ismail. Koordinator Timses Millenial Paslon 3. *Wawancara*. Sidoarjo 20 Desember 2020.

Finda Khoirun Nisa. Warga Desa Kec. Porong. Porong 24 Januari 2021.

Miftakul Rohma. Anggota KPUD Sidoarjo. *Wawancara.* Sidoarjo 11 Febuari 2021.

Nico. Warga Pondok jati. *Wawancara,* Porong 26 Maret 2021.

Risky Ilham. Warga Desa Kec. Sukodono. *Wawancara*. Porong 08 Maret 2021.

Silvy Rohmawati. Warga Desa Kec. Porong. *Wawancara.* Porong 24 Januari 2021.

Soni Wijaya (Koordinator Timses Paslon 2), *Wawancara,* Sidoarjo 20 Desember 2020.

Supriyono. Ketua Devisi Jaringan BHS. *Wawancara,* Sidoarjo 26 Maret 2021.

Suhadi. Ketua PPK Tanggulangin. *Wawancara.* Porong 10 Febuari 2021.

Suwignyo, Yoses Rezon. Sekretaris PGIS Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo 19 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id